

Edisi 128 TH. XLV, 2015



Parlementaria

MAJALAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Songsong MEA Siapakah?



ISSN 1979-5912
9 771979 591288

Parlementaria

PENGAWAS UMUM:

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/ KETUA PENGARAH:

Dr. Winantuningtyastiti, M. Si

(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH:

Achmad Djuned SH, M.Hum

(Wakil Sekretaris Jenderal DPR-RI)

Tatang Sutarsa, SH

(Deputi Persidangan dan KSAP)

PIMPINAN PELAKSANA:

Drs. Djaka Dwi Winarko, M. Si.

(Karo Humas dan Pemberitaan)

PIMPINAN REDAKSI:

Dadang Prayitna, S.IP. M.H.

(Kabag Pemberitaan)

WK. PIMPINAN REDAKSI:

Dra. Tri Hastuti (Kasubag Penerbitan),

Mediantoro, SE (Kasubag Pemberitaan)

REDAKTUR:

Sugeng Irianto, S.Sos

M. Ibnu Khalid

Iwan Armanias

Mastur Prantono

SEKRETARIS REDAKSI:

Suciati, S.Sos

ANGGOTA REDAKSI:

Nita Juwita, S.Sos

Supriyanto

Agung Sulistiono, SH

Rahayu Setiowati

Muhammad Husen

Sofyan Efendi

REDAKTUR FOTO:

Eka Hindra

FOTOGRAFER:

Rizka Arinindya

Naefuroji

M. Andri Nurdriansyah

Yaserto Denus Saptoadji

Andi Muhamad Ilham

Jaka Nugraha

SEKRETARIAT REDAKSI:

I Ketut Sumerta, S. IP

SIRKULASI:

Abdul Kodir, SH

Bagus Mudji Harjanta

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA:

BAGIAN PEMBERITAAN DPR-RI,

Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI,

Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta

Telp. (021) 5715348,5715586, 5715350

Fax. (021) 5715536,

e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com;

www.dpr.go.id/berita

 @dpr_ri



PENGANTAR REDAKSI

Indonesia bersama 10 negara Asean lainnya pada akhir tahun 2015 ini akan memasuki babak baru, yaitu diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pemberlakuan Asean Economic Community atau MEA merupakan realisasi Visi Asean 2020 untuk melakukan integrasi terhadap ekonomi negara-negara anggota Asean dengan pasar tunggal dan produk bersama. Sementara rencana pemberlakuan MEA sudah dicantumkan dalam Piagam Asean yang disahkan tahun 2007.

Ada lima hal yang perlu diperhatikan dengan berlakunya MEA, yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal dan arus bebas tenaga terampil. Karena sudah merupakan kesepakatan maka siap tidak siap harus disongsong untuk dilakukan.

Menghadapi MEA dituntut adanya perubahan atau reformasi jati diri birokrasi, dari stereotype pegawai pemerintah yang kinerja dan kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang profesional. Tuntutan global dengan diberlakukannya MEA mensyaratkan daya saing yang tinggi, maka perlu upaya mem-

perbaiki atau meningkatkan daya saing produksi dan kompetensi SDM.

Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia adalah melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi. Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan berbagai strategi menghadapi MEA, apabila tidak terkena arus masuk barang dan tenaga kerja dari ASEAN.

Pesaing utama Indonesia di pasar ASEAN adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam terlebih kondisi Indonesia masih direpotkan dengan permasalahan perekonomian dan kepastian sektor dalam berusaha, termasuk masih rumitnya perijinan usaha di berbagai sektor.

Kesiapan dan berbagai keunggulan kita harus segera dilakukan kalau kita ingin tetap eksis bahkan bisa membawa manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita harus mendapatkan manfaat dan meminimalisasi mudarat MEA pada akhirnya masyarakat puas bukannya tergilas. (mp)



**Kini Majalah
dan Buletin
Parlementaria
hadir lebih dekat
dengan Anda.**

Dapatkan di:

Loby Gedung Nusantara 1 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 2 DPR RI
Loby Gedung Nusantara 3 DPR RI
Loby Gedung Setjen DPR RI
Ruang Loby Ketua
Ruang Loby Wakil Ketua
Ruang Yankes

Terminal 1 dan 2
Bandara Soekarno Hatta

Stasiun Kereta Api Gambir

Semua Majalah dan Buletin Parlementaria dibagikan secara gratis tanpa dipungut biaya apapun. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Bagian Sirkulasi Majalah dan Buletin Parlementaria di Bagian Pemberitaan DPR RI, Lt.III Gedung Nusantara II DPR RI, Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta, Telp. (021) 5715348, 5715586, 5715350 Fax. (021) 5715341, e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.

DAFTAR ISI

PROLOG	
Songsong MEA, Siapkah?	8
LAPORAN UTAMA	
Jelang MEA: Sektor Pendidikan Paling Tertinggal	10
SUMBANG SARAN	
Tantangan dan Prospek Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asian(MEA)	24
PENGAWASAN	
DPR Dan Pemerintah Antisipasi Dampak Kekeringan	29
Fundamental Ekonomi Indonesia Jauh Lebih Kuat	31
ANGGARAN	
Ketua DPR RI Setya Novanto APBN 2016 Menjadi Stabilisator Perekonomian	34
RAPBN 2016 Diharapkan Tingkatkan Kepercayaan Pasar	36
Pandangan Umum Fraksi	38
LEGISLASI	
Mengantisipasi Krisis Melalui RUU JPSK	44
KIAT SEHAT	
Olah Raga Terlalu Pagi Atau Terlalu Malam	46
PROFIL	
Muhamad Lukman Edy Politisi yang Berjiwa Seni	48
KUNJUNGAN KERJA	54
SOROTAN	
Pemerintah Perlu Bantu Masyarakat Terdampak Tol Cipali	63
LIPUTAN KHUSUS	
Sidang APA di Jakarta, Delegasi Parlemennya Besar, Hasilnya Optimal	66
SELEBRITIS	
Glenn Fredly Terus Jalankan Kontrol Sosial	69
PERNIK	
Pesta Rakyat DPR, Bagus	72
PARLEMEN DUNIA	
Norwegia Sebagai Model Negara Kesejahteraan Di Dunia	74
POJOK PARLE	
Lebih Merakyat	78

PROLOG 8

SONGSONG MEA, SIAPKAH?

Sebelas negara anggota Asean yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste akan memasuki babak baru dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015. MEA adalah kesepakatan yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian kawasan dengan meningkatkan daya saing di kancah internasional agar ekonomi tumbuh merata.



LAPORAN UTAMA 14



PERILAKU BIROKRASI KORUP HARUS DIROMBAK

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dituntut adanya perubahan atau reformasi jatidiri birokrasi, dari stereotype pegawai pemerintah yang kinerja dan kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang profesional. tuntutan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini mensyaratkan daya saing yang tinggi.

PERNIK 72

Pesta Rakyat DPR, Bagus

Lomba panjat betung dalam Pesta Rakyat kali ini menjadi lebih istimewa karena dilengkapi dengan penyerahan rekor MURI oleh langsung dari pendirinya Jaya Suprana





PEMOTONGAN UANG GANTI RUGI UNTUK PEMILIK LAHAN

Kepada Komisi III DPR RI, kami laporkan perihal pengaduan tentang pemotongan uang ganti rugi pemilik lahan (warga) sebesar 40% oleh pihak LBHN Jakarta atas proyek transmisi PLTU - PT. PLN (Persero) 275kV - 200 MW GI. Binjai - P. Susu di Kabupaten Langkat.

Kami menduga telah terjadi konspirasi antara LBHN Jakarta dengan Kepala Desa Tangkahan Durian dan Camat Brandan Barat dengan cara memaksa masyarakat Kecamatan Brandan Barat

untuk menandatangani Surat Kuasa dari warga pemilik lahan untuk LBHN Jakarta guna mengurus dan memperjuangkan hak-hak pemilik tanah ke PT PLN (Persero) UIP II Medan.

Bahwa potongan sebesar 40% tersebut, dipergunakan oleh LBHN Jakarta sebagai pengganti biaya mengurus pencairan ganti rugi masyarakat kepada PT PLN (Persero) UIP II Medan.

Bahwa tindakan Kepala Desa Tangkahan Durian dan Camat Brandan Barat yang mengarahkan masyarakat untuk memberikan kuasa kepada LBHN merupakan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan oleh seorang pejabat pelayan publik yang seharusnya dapat menjadi

panutan dan bukan melakukan tindakan penipuan yang melanggar peraturan yang berlaku.

Kami berharap uang ganti rugi tersebut dapat segera dibayarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga ada kepastian hukum, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Pengadu memohon Ketua Komisi III DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut dengan memproses tindakan Kepala Desa Tangkahan Durian dan Camat Brandan B

*Ir. Suhaimi Akbar
Langkat, Sumatera Utara*

KETIDAKSEPAKATAN PEMBERIAN THR

Kami mewakili Komisariat Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (PK F-SBSI 1992) PT Abadi Nylon Rope Mfg Gedangan Indonesia Prosperity Trade Union 1992, yang ditujukan kepada Komisi IX dan Komisi III DPR RI, mengenai pengaduan dan penjelasan tentang perselisihan perburuhan di PT Abadi Nylon Rope Mfg Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur.

Permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi antara PT Abadi Nylon Rope Mfg dengan karyawan bermula dari ketidaksepakatan pemberian THR tahun 2014, yang pada tahun sebelumnya pe-

rusahaan memberikan sebesar 1,5 kali dari gaji pokok, namun saat ini menjadi sebesar 1 kali dari gaji pokok.

Kami menyampaikan permasalahan tersebut kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Sosial Sidoarjo dan telah ditindaklanjuti dengan surat No. 560/3943/404.3.3/2014 tanggal 29 Agustus 2014, perihal keberlangsungan pekerjaan karyawan karyawan, namun PT Abadi Nylon Rope Mfg tidak pernah menghadiri panggilan Disnaker Sidoarjo, sehingga diduga tidak ada niat baik dari perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Kami telah mengupayakan penyelesaian permasalahan tersebut melalui perundingan dengan perusahaan, na-

mun karena tidak terjadi kesepakatan, pengadu melakukan aksi mogok kerja, setelah 7 (tujuh) hari sebelumnya memberitahukan akan adanya aksi mogok tersebut kepada pihak terkait.

Selain itu, perusahaan telah melakukan *lock out* atau penutupan perusahaan akibat peristiwa tersebut.

Kami memohon Ketua Komisi IX dan III DPR RI membantu menyelesaikan perselisihan perburuhan di PT Abadi Nylon Rope Mfg Gedangan, Sidoarjo, Jawa Timur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

*Ahmad Khusaini
Sidoarjo, Jawa Timur*

PERAWATAN SUNGAI YANG TIDAK SEMESTINYA

Saya adalah korban bencana banjir yang berlokasi di RT. 03/RW 01 Desa Sugiharwas, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah.

Saya ingin melaporkan bahwa perawatan sungai Banda/Telomoyo beserta anak sungainya yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sehingga dikawatirkan akan mengakibatkan banjir di Kabupaten Kebumen.

Saya mengharapkan Pemkab Kebu-

men bertindak pro aktif untuk melakukan normalisasi dan pemeliharaan rutin terhadap sungai-sungai tersebut agar tidak terjadi banjir yang disebabkan pendangkalan akibat erosi dan sedimentasi sungai-sungai tersebut.

Saya telah menyampaikan permasalahan tersebut ke beberapa instansi terkait, diantaranya Ombudsman RI dan telah ditindaklanjuti oleh Ombudsman RI dengan mengirimkan surat kepada Bupati Kebumen. Bupati Kebumen juga telah mengklarifikasi permasalahan tersebut berdasarkan surat No. 610/0298 tanggal 24 Februari 2014, yang intinya menjelaskan bahwa Pemkab Kebumen selalu memperhatikan masalah ban-

jir, genangan dan kondisi infrastruktur Sumber Daya Air yang ada di Kabupaten Kebumen.

Namun demikian karena kompleksitas permasalahan, maka pemeliharaan sungai, penanganan banjir dan genangan, perbaikan infrastruktur Sumber Daya Air, dilaksanakan sebatas kewenangan yang dimiliki Pemkab Kebumen.

Saya mohon Ketua DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

*Turmidi Marto Wardoyo
bin Sanmukmin Sakun
Kebumen, Jawa Tengah*

MENOLAK PROGRAM HOLDING BUMN

Bersama ini dengan hormat, kami sampaikan surat dari Sdr., SP. selaku Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Perkebunan Nusantara (FSP BUN), yang ditujukan kepada Ketua DPR RI, sebagai berikut.

FSP BUN adalah Induk Organisasi Serikat Pekerja di lingkungan BUMN Perkebunan yang dibentuk secara *bottom up* berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER-05/MEN/1998 tanggal 27 Mei 1998 tentang Pendaftaran Organisasi Pekerja yang Berbentuk Serikat Pekerja dan UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh. Adapun FSP BUN beranggotakan 25 Serikat Pekerja Perkebunan (SP BUN) PTPN I – XIV, Lembaga, Anak Perusahaan dan Dapenbun yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan jumlah Anggota + 360.000 karyawan, yang berkedudukan di DKI Jakarta.

Kami menolak program *holding*

BUMN yang diluncurkan oleh Kementerian BUMN RI pada tanggal 2 Oktober 2014, karena program tersebut bukan merupakan satu-satunya cara untuk mengatasi persoalan-persoalan mendasar di masing-masing PTPN, sehingga dalam perjalanannya perlu dikaji dan dianalisis secara komprehensif dengan melibatkan seluruh *stakeholder* terhadap kepentingan Pemerintah, Perusahaan dan Karyawan.

Bahwa program *holding* BUMN bertujuan meningkatkan daya saing BUMN, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan profesionalisme serta citra BUMN perkebunan dan kehutanan. Dalam *holding* perkebunan, PTPN III akan menjadi induk *holding*nya, sedangkan untuk *holding* kehutanan, induk *holding* diserahkan ke Perum Perhutani.

Bahwa pembentukan *holding* BUMN, perkebunan dan kehutanan ini dilakukan dengan mekanisme pengalihan saham negara sebagai tambahan penyertaan modal negara kepada BUMN *champion* dan relatif tidak berpengaruh

secara langsung terhadap kegiatan operasional perusahaan masing-masing. Selanjutnya, dengan adanya *holding* ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dari sisi deviden dan pajak serta dampak ganda perekonomian nasional atas pengembangan usaha yang dilakukan.

Bahwa FSP BUN telah memberikan Kuasa Khusus kepada Lembaga Bantuan Hukum (LBHI) Perkebunan untuk melakukan kajian sekaligus *Judicial Review* di Mahkamah Agung terhadap ketentuan PP No. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan PTPN III pada tanggal 17 Oktober 2014, dengan Registrasi No. 67 P/HUM/2014, namun sampai saat ini belum diputuskan oleh MA RI.

Kami memohon Ketua DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai ketentuan berlaku.

*Tuhu Bangun
DKI Jakarta*

DISKRIMINASI KONFLIK TANAH

Saya Ketua RW 04 Kelurahan Kelapa Gading Barat, mengajukan permohonan perlindungan dan keadilan dari tindakan diskriminasi, intimidasi, dan arogansi serta pengklaiman/ pengambilalihan secara sepihak yang dilakukan oleh Lantamal III terhadap lahan yang ditempati warga di Jalan Inspeksi Kali Sunter, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara.

Bahwa permasalahan konflik tanah antara warga dengan pihak Lantamal III, dimana tanah yang didiami oleh warga tersebut telah berlangsung sejak tahun 1960.

Bahwa tindakan pihak Lantamal III terhadap lahan warga tersebut telah berlangsung selama 2 bulan, diantaranya:

- a. Melakukan pembongkaran paksa terhadap sebuah rumah (4 petak) di Jalan Inspeksi Kali Sunter No. 1 RT. 010 RW 04, Kelurahan Kelapa Gading

Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara.

- b. Melakukan pendataan rumah warga di sepanjang Jalan Inspeksi Kali Sunter, dari RT. 002 s.d RT 010 pada tanggal 3 September 2014 dan 4 September 2014.

- c. Melakukan pendataan dan mengemukakan dengan pengeras suara agar warga melakukan pembongkaran rumah di Jalan Inspeksi Kali Sunter RT. 02 RW 04, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Kotamadya Jakarta Utara Pada 21 Oktober 2014,.

- d. Memberikan Surat Peringatan (SP) I pada tanggal 28 Oktober 2014, SP II pada tanggal 3 November 2014 dan SP III pada tanggal 7 November 2014 serta Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Pembongkaran pada tanggal 11 November 2014.

Bahwa Lantamal III dengan melibatkan para petugas berseragam secara mendadak melakukan tindakan tersebut sehingga membuat warga resah, trauma

serta takut, terutama bagi lansia dan anak-anak.

Kami berpendapat, bahwa pendataan terhadap warga tersebut merupakan tupoksi dari Dinas Kependudukan, bukan TNI AL, sedangkan RT dan RW merupakan wadah formal yang ada di lingkungan tersebut, namun RT dan RW tidak diinformasikan/mendapat pemberitahuan.

Tim Pendamping sebagai perwakilan warga telah mengirimkan surat kepada Lurah Kelapa Gading Barat, Camat Kelapa Gading, dan Walikota Jakarta Utara untuk melakukan klarifikasi atas tindakan Lantamal III tersebut, namun sampai saat ini belum mendapat tanggapan.

Kami memohon Ketua Komisi III DPR RI segera membantu menyelesaikan permasalahan tersebut sesuai dengan ketentuan berlaku.

Demikian untuk menjadi periksa dan terima kasih.

*Usman
Jakarta Utara*



MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

SONGSONG MEA
SIAPKAH?



Sebelas negara anggota Asean yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Philipina, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste akan memasuki babak baru dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015. MEA adalah kesepakatan yang dibangun untuk meningkatkan perekonomian kawasan dengan meningkatkan daya saing di kancah internasional agar ekonomi tumbuh merata

Pemberlakuan Asean Economic Community atau Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) juga merupakan realisasi Visi Asean 2020 untuk melakukan integrasi terhadap ekonomi negara-negara anggota Asean dengan pasar tunggal dan produk bersama. Sementara rencana pemberlakuan MEA sudah dicantumkan dalam Piagam Asean yang disahkan tahun 2007.

MEA mendapat prioritas pertama selain Asean Political Security

Community (integrasi dan kerjasama politik dan keamanan) dan Asean Socio-Culture Community (kerjasama sosial budaya). Dengan diberlakukannya MEA ada lima hal yaitu arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi, arus bebas modal dan arus bebas tenaga terampil. Tidak serta merta berlaku sebab ada proses dan tahapan yang masih dibahas namun karena sudah merupakan kesepakatan maka siap tidak siap harus disongsong untuk dilakukan.

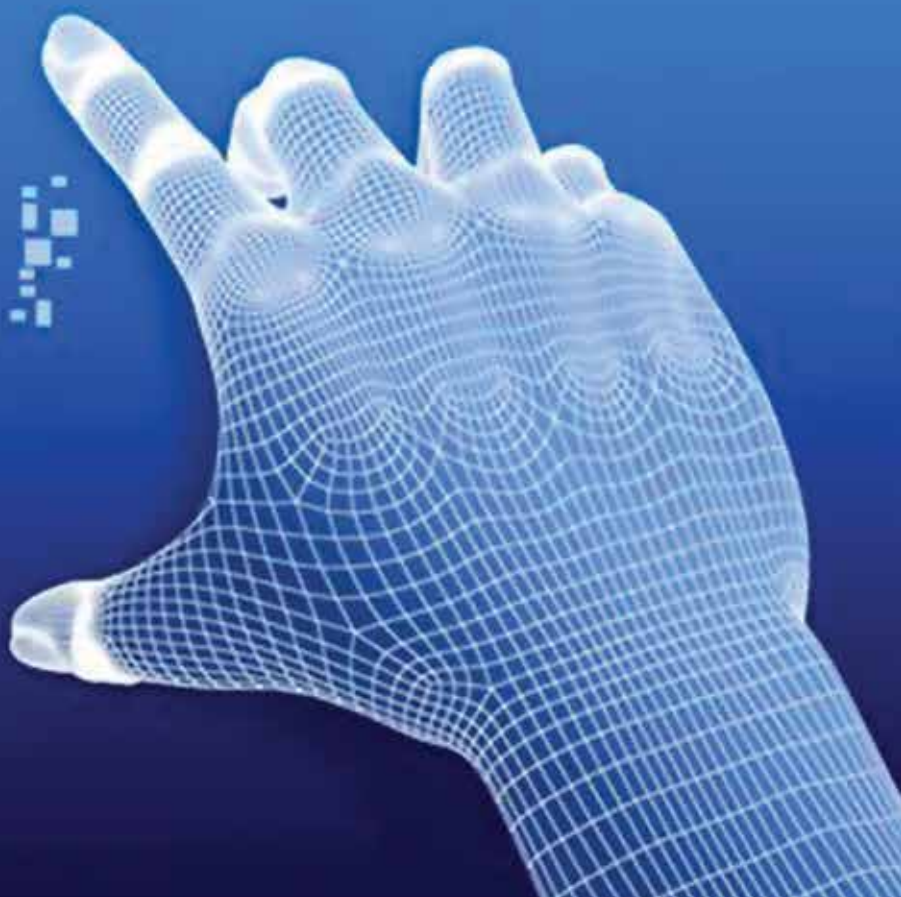
Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dituntut adanya perubahan atau reformasi jatidiri birokrasi, dari stereotype pegawai pemerintah yang kinerja dan kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang profesional. Tuntutan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini mensyaratkan daya saing yang tinggi.

Menurut anggota Komisi X Sofyan Tan, faktor-faktor yang menyebab-

kan daya saing rendah, diantaranya adalah persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan kapasitas inovasi yang kurang memadai. Karena itu perilaku birokrasi korup harus dirombak.

Sementara Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisyam mengingatkan, sektor pendidikan harus dapat menjadi palang pintu utama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) meski faktanya, persiapan di sektor pendidikan masih lemah dibandingkan yang lainnya.

Saat diberlakukannya MEA yang akan terkena dampaknya yaitu para buruh yang tidak memiliki *skill* dan pendidikan yang memadai. Selama ini pemerintah selalu menggemborkan bahwa MEA merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengambil keuntungan dari potensi persaingan bebas tersebut. Kita songsong MEA, tekadkan untuk menjadi pemenang jangan jadi pecundang. (tim)





Wakil Ketua Komisi X Ridwan Hisjam saat Kunter ke Papua

Jelang MEA: SEKTOR PENDIDIKAN PALING TERTINGGAL

Sektor pendidikan harus dapat menjadi palang pintu utama dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) namun faktanya, persiapan di sektor pendidikan masih lemah dibandingkan yang lainnya. Saat diberlakukannya MEA tentunya yang akan terkena dampaknya yaitu para buruh yang tidak memiliki skill dan pendidikan yang memadai. Seperti kita ketahui, selama ini pemerintah selalu menggemor-gemborkan bahwa MEA merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk mengambil keuntungan dari potensi persaingan bebas tersebut.

Kategori yang disepakati di MEA nantinya akan meliputi pada profesi insinyur, arsitektur, perawat, tenaga survei, tenaga pariwisata, praktisi medis, dokter gigi dan akuntan. Ini akan semakin menunjukkan bagaimana ancaman *output* pendidikan yang hanya mencetak tenaga kerja yang siap saji di pasaran ASEAN, tanpa adanya usaha meningkatkan tenaga-tenaga kerja Indonesia yang mengabdikan dirinya membangun bangsa Indonesia yang mandiri dan berdaulat.

“Saya menyatakan sektor pendidikan belum siap menghadapi MEA, baru sekarang ini kita mulai mem-

persiapkan diri kemarin masih tertinggal. Contohnya saat MEA nantinya sudah tidak ada sekat lagi, orang yang ahli dari Malaysia, Filipina bisa masuk ke Indonesia itu tidak boleh diperlakukan berbeda, begitu juga sebaliknya ahli kita tidak boleh dibedakan,” jelas Wakil **Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam** kepada Parleментарia, baru-baru ini.

Menurutnya, belum ada ada proses sertifikasi yang berstandar internasional khusus sektor Pendidikan di Indonesia. “Karena yang diperlukan itu kompetensi yang dilihat keahliannya yaitu proses sertifikasi, untuk

itu kita baru menuju kesana, seharusnya sudah dilakukan lima tahun lalu sehingga pada tahun 2015 sudah tidak ada masalah,” paparnya.

Selama ini, dia menambahkan, Sekolah Menengah Kejuruan seperti kelautan atau kemaritiman masih belum ada ada sertifikasi. “Bayangkan anak-anak itu tidak punya sertifikasi, yaitu sertifikat yang dikeluarkan organisasi maritim internasional. Nantinya akan berdampak di lapangan dimana para pengusaha kapal dan pelayaran tidak akan mengambil ahli dari Indonesia tetapi dari Filipina, Thailand yang memiliki sertifikasi, kita hanya diterima sebagai tenaga kasarnya saja yaitu tukang bersih yang bukan bagian dari tenaga profesi di bidang teknis dan sebagainya,” tambahnya.

Khusus Kejuruan Teknik, paparnya, memang sudah ada UU Keinsinyuran, dimana sampai saat ini aturan pelaksanaannya juga belum turun. “Insinyur juga harus dilakukan sertifikasi yaitu dari Persatuan Insinyur Indonesia, dan PII Asean, sehingga para Insinyur di bidang pengeboran minyak nanti bisa bekerja dimana saja setelah mendapatkan sertifikasi,” jelasnya.

Jika di ASEAN kita belum disertifikasi tentu akan tertinggal lagi, tanpa sertifikasi para pekerja kita akan mendapatkan klasifikasi profesi yang lebih rendah. “Kita tertinggal apalagi awal-awal ini kita gaduh politik sehingga persoalan ini tidak tersentuh, dengan sisa empat bulan harus dikebut semua itu adalah kerja keras,” paparnya.

Mengapa kita harus mempersiapkan sektor pendidikan, lanjutnya, karena para tenaga kerja Indonesia terdidik akan memberikan devisa bagi pemerintah Indonesia. Diakuinya, dengan adanya MEA tentu para pekerja kita bisa kerja diluar negeri dan orang luar juga

bisa bekerja di Indonesia. “Kalau ada sertifikasi tentu bayarannya tidak rendah. Kita digaji bisa tinggi oleh perusahaan,” terangnya.

Pada tahun 2020, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi seperti halnya Jepang disekitar tahun 1980, paparnya, jika tidak diantisipasi maka bonus demografi tersebut akan memberikan kerugian bagi negara. “Pada tahun 2020 nanti usia kerja umur 16-40 tahun itu akan mencapai 70 persen dibandingkan penduduk yang berumur diatas 60 tahun yang sudah tidak bisa bekerja, apabila tidak tertampung di dunia kerja tentunya akan menimbulkan pengangguran maka negara akan hancur nantinya,” paparnya.

“ Tahun 2020 nanti usia kerja 16-40 tahun akan mencapai 70 persen dibandingkan penduduk yang berumur diatas 60 tahun yang sudah tidak bisa bekerja. Apabila tidak tertampung di dunia kerja akan menimbulkan pengangguran, negara akan hancur. ”

Dia mengatakan, selama ini anggaran pendidikan di Indonesia nuansanya project saja. Artinya anggaran besar sehingga agar itu terserap maka dibikin proyek-proyek yang tidak berguna. “Anggaran pendidikan 20 persen harus konsisten dilaksanakan tetapi harus dalam bentuk satu pintu, artinya dilaksanakan oleh Menteri pendidikan kalau memang anggaran yang diurus itu terlalu besar maka dibuat

Menteri Koordinator Pendidikan,” jelasnya.

Anggaran pendidikan yang berada di Kementerian Pendidikan tinggi maupun Pendidikan dan Kebudayaan itu cukup besar atau kurang lebih Rp100 triliun. Sementara sebesar Rp800 Triliun tidak jelas. Anggaran tersebut berada di Kementerian Agama, Kementerian Pertahanan dan sebagainya.

“Pendidikan kita tidak sinkron harus dalam satu kordinator, aratinya bentuk konsep harus satu namun pelaksanaan dimana-mana boleh. Jika terjadi perbedaan sekolah madrasah dan sekolah umum, karena memang pemerintah sudah membeda-bedakan seharusnya satu tetap menteri pendidikan, Menko pendidikan itu harus *full power* dari sisi kebijakannya,” katanya.

Dia menilai, bidang pendidikan di semua Kementerian yang ada adalah bagaimana menjadikan anggaran pendidikan menjadi proyek-proyek semata, atau menjadi kepentingan ekonomi untuk pribadi, atau kelompok bukan untuk anak bangsa yang harus ditingkatkan. “Khusus MEA kita masih belum memiliki UU yang memberikan perlindungan terhadap pengusaha kecil atau UMKM, kita terlalu takut dengan asing padahal mereka di negaranya itu dilindungi, mereka juga disubsidi dan diproteksi,” jelasnya

Dia menegaskan, keterlibatan Indonesia di MEA tidak akan membawa keuntungan bagi Indonesia. Artinya Indonesia akan dijadikan tempat dagang atau pasar buat negara ASEAN lainnya. “Kita tidak ada untungnya ikut MEA karena memang belum siap, jika siap tenaga kerja kita otomatis bisa masuk ke Singapura dengan gaji tinggi, Malaysia, bahkan bisa-bisa negara kita menyerbu kesana semua,” ungkapnya.

(si) Foto: Nita/Parle/IW



Wakil Ketua Komisi X DPR Nuroji saat kunjungan ke NTT

PERGURUAN TINGGI BERPERAN SIAPKAN TENAGA PROFESIONAL

Wakil Ketua Komisi X DPR Nuroji menyatakan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) salah satu tugas Perguruan Tinggi (PT) adalah mempersiapkan tenaga profesional termasuk para akademisi menghadapi persaingan di antara negara-negara anggota Asean.

Karena itu pemerintah harus fokus pada program-program prioritas dengan memajukan keunggulan lokal. Seperti perikanan mandiri untuk menghadapi persaingan global dan secara khusus Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan tantangan kondisi geografisnya maka unggulannya adalah mencetak tenaga ahli bidang pertanian lahan kering.

Menurut Nuroji selaku Pimpinan Komisi yang membidangi pendidikan, perlunya regulasi khusus untuk mengakselerasi daerah-daerah

tertinggal, sebab kondisi sekolah-sekolahnya terlihat dibawah standar dibanding di Pulau Jawa atau daerah-daerah lain. “Ini harus ada intervensi, tidak harus mengikuti aturan yang ada, tetapi perlu semacam terobosan baru. Kalau tidak ya akan terus seperti itu,” ia menjelaskan.

Seperti pengaturan DAK (Dana Alokasi Khusus) yang sudah ada rumusnya, diantaranya bagi hasil pendapatan daerah yang disumbangkan ke pusat. Kalau sumbangannya kecil maka DAK nya juga kecil. “Nah saya ini *nggak* berlaku

“ Saya optimis, apabila fasilitas pendidikannya ditingkatkan, maka mereka akan mampu bersaing dengan para mahasiswa dari PT unggulan. Pada gilirannya maka PT di luar Jawa akan mampu mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang handal dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara anggota Asean.”

di sini. Makin kecil PAD, DAK akan kecil juga sementara yang dibangun banyak. Beda sekali dibanding di DKI atau Kaltim sebagai daerah yang kaya, karena sumbangan ke pusat tinggi sehingga dapat DAKnya tinggi padahal daerah itu sudah kaya dengan hasil tambangnya, dengan pajaknya,” ungkapnya.

Daerah-daerah yang kaya diharapkan bisa andil membangun SDM melalui PT yang ada di daerah yang bersangkutan mampu bersaing. “ Saya optimis, apabila fasilitas pendidikannya ditingkatkan, maka mereka akan mampu bersaing dengan para mahasiswa dari PT unggulan. Pada gilirannya maka PT di luar Jawa akan mampu mempersiapkan tenaga-tenaga profesional yang handal dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara-negara anggota Asean,” katanya.

Sekolah Kejuruan

Menurut Nuroji, peran sekolah kejuruan dalam menyiapkan tenaga terampil memiliki peran penting menghadapi diberlakukannya MEA. Dalam kaitan ini, pemerintah telah mencanangkan dan meningkatkan pendidikan kejuruan supaya bisa langsung bekerja sekaligus mampu bersaing bidang ketrampilan dan kompetensinya tidak hanya di lokal tetapi regional. Salah satu yang sudah dilakukan yang lalu adalah Akademi Komunitas untuk meningkatkan potensi tenaga kerja kita.

Juga pendidikan kedokteran, dalam hadapi MEA dokter-dokter Malaysia dan Singapura masuk ke NTT. “Kita memang membutuhkan, tetapi itu

berarti dokter kita tak mampu bersaing,” jelasnya. Sedangkan kaitannya dengan peraturan perundang-undangan, ia menilai masih banyak yang perlu disesuaikan seperti jarak untuk pendidikan bagi dosen tidak boleh lebih 60 km, ini sangat menyulitkan. Apalagi wilayah kita banyak terdiri dari kepulauan, maka hampir semua wilayah sulit memenuhi ketentuan 60 km itu, apalagi PT masih jarang sehingga masalah perlu direvisi.

Kemudian UU yang mengatur tunjangan-untuk para dosen dan pendidikan atau Aparatur Sipil Negara (ASN) maka Menpan & RB itu mungkin perlu ditinjau lagi antara tunjangan professor, rektor dan lainnya sangat jomplang, maka regulasinya perlu ditinjau lagi, baik tingkat peraturan menteri (Permen), peraturan pemerintah (PP) maupun undang-undang (UU).

Ketika ditanyakan apakah siap

menghadapi MEA, politisi Partai Gerindra ini menegaskan “mau nggak mau harus siap.” Mungkin ada beberapa bidang yang tidak siap, namun dalam era keterbukaan kita mau nggak mau harus disiapkan”.

Sekali lagi pembangunan sumber daya manusianya (SDM), terutama peran PT nanti dalam MEA bukan hanya soal perdagangan tetapi juga soal kualitas tenaga kerja. Misalnya dokter masuk ke pasar bebas, maka kompetensi dokter-dokter Indonesia harus ditingkatkan. Begitu pula komoditas lain baik hasil pertanian, perdagangan maupun jasa, peningkatan mutu, kemasan, dan pelayanan perlu senantiasa diperbaiki. “Kita lihat sendiri, buah lokal tak mampu bersaing dengan buah impor, bisa karena faktor biaya tinggi, bibit dan juga teknologi. Perlu intervensi pemerintah membantu subsidi pertanian berupa bibit, pupuk serta teknologi,” tegasnya lagi. (mp) Foto:

Mastur/Parle/IW



Kunjungi sekolah rusak, salah satu fokus Komisi X DPR ke NTT



Anggota Komisi X DPR Sofyan Tan berdialog dengan siswi SMP

PERILAKU BIROKRASI KORUP HARUS DIROMBAK

Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menuntut adanya perubahan atau reformasi jatidiri birokrasi, dari stereotype pegawai pemerintah yang kinerja dan kapasitas minimal menjadi jajaran baru yang profesional. tuntutan global dengan diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akhir tahun ini mensyaratkan daya saing yang tinggi.

Faktor-faktor yang menyebabkan daya saing rendah, diantaranya adalah persoalan korupsi, birokrasi yang tidak efisien, dan kapasitas inovasi yang kurang memadai.

Menurut laporan Global Competitiveness atau daya saing global, tahun 2013-2014 Indonesia menempati peringkat ke-38, naik dibandingkan tahun 2008-2009 di peringkat ke-55, namun masih dibawah Malaysia, Brunei serta Thailand.

Institusi pemerintah dituntut untuk menjalankan fungsi-fungsinya secara efektif dan efisien, serta responsif terhadap kebutuhan rakyat. Maka keberadaan birokrasi yang berkualitas dan kapabilitas tinggi syarat mutlak terciptanya pemerintahan yang baik.

Menurut anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Sofyan Tan, persoalan birokrasi dan kebijakan memang harus dibenahi artinya jangan adalagi anak bangsa dijadikan sebagai tempat menarik upeti.

“Ini sering terjadi juga saat kasat mata, apabila ada anak didik ingin masuk sekolah saja harus dimintai uang padahal dia keluarga tidak mampu dan memiliki hasil baik yang berakibat tidak bisa masuk sekolah bagus,” jelasnya.

Dia menambahkan, swasta juga ha-

rus dilibatkan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) guna mengantisipasi membludaknya tenaga kerja asing di Indonesia. “Rangkulah swasta kemudian siapkan SDM, MEA ini bukan perang senjata kuat atau otot tetapi otak. Jika sudah menekan MEA memang tidak bisa diproteksi tetapi diberikan kemudahan. Karena itu kita antisipasi dengan perbanyak teknikal, dan workshop yang baik bagi pengusaha kecil,” jelasnya.

Sofyan menegaskan, meskipun 10 tahun lagi Indonesia masih belum siap melawan gempuran negara ASEAN lainnya. “Ini sudah tanggungjawab Negara untuk bersiap diri dalam menghadapi MEA, semua stakeholder dan pemangku kepentingan harus aktif hadapi serangan luar. Keberpihakan pemerintah sangat penting dengan cara meningkatkan efisiensi dan kemudahan kepada WNI. Artinya jangan mau bikin usaha saja dipersulit, kita juga tidak bisa menahan apabila pendidikan luar negeri ingin membuka cabang di Indonesia,” paparnya.

“ Menurut anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDIP Sofyan Tan, persoalan birokrasi dan kebijakan memang harus dibenahi artinya jangan adalagi anak bangsa dijadikan sebagai tempat menarik upeti. ”

Sekarang ini, persoalan utama UMKM berkaitan dengan skill atau pendidikan para SDM kita, berikutnya teknologi. Untuk *packaging* (kemasan) kita saja masih kalah, kalau soal makanan kita memang hebat namun bagaimana mengemasnya dengan baik itu yang kalah dibandingkan luar negeri. “Di In-

donesia kita memiliki potensi yang besar, seperti industri kreatif atau kerajinan yang luar biasa, jadi yang utama yaitu bagaimana mengemasnya menjadi lebih baik dan pemasaran yang masif,” katanya.

Faktor yang tidak kalah penting yaitu mempersiapkan infrastruktur dengan baik, seperti akses jalan dapat menjadi poin penting dalam pariwisata. “Untuk meningkatkan daya saing SDM, mau tidak mau kita harus berpaling kepada pendidikan. Yaitu pendidikan seperti apa yang meningkatkan daya saing seperti misalnya pendidikan IT, serta unsur ramah tamah dalam industri pariwisata memegang peranan penting,” tandasnya.

Untuk industri kreatif, paparnya, seperti Riau memiliki ciri khas seperti songket yang indah namun perlu diberikan ruang oleh pemerintah agar mereka mendapatkan kemudahan seperti, mengimimalisir perijinan, pendaftaran HAKI, serta jangan mengambil hak mereka, dengan cara itu industri lokal akan berkembang pesat. “Jika tidak dilindungi bahkan mungkin saja nanti batik Riau jadi milik Malaysia,” katanya.

Faktor internal lainnya dalam menghadapi MEA khususnya dalam promosi pariwisata, lanjutnya yaitu perlu adanya kenyamanan sehingga ketika menginjakkan kakinya di Indonesia, Mereka disambut oleh imigrasi yang ramah dan tidak dipersulit. Selain itu, hotel dan kota yang bagus dan bersih juga dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

“Yang tidak kalah pentingnya yaitu adanya atraksi di kota tersebut, yang menjadi ciri khas bagi para wisatawan, selain itu perasaan aman juga sangat penting dalam mendorong industri pariwisata kita,” tambahnya. (si) Foto: Nita/Parle/IW



Anggota Komisi IX DPR Okky Asokawati saat Kunter ke rumah sakit

DPR DORONG SERTIFIKASI PEKERJA DI INDONESIA

Salah satu persoalan bangsa ini adalah menyediakan atau mencetak SDM yang mempunyai daya saing ataupun yang siap kerja di industri. Persoalan ini akan semakin rumit ketika nantinya MEA diberlakukan mulai awal 2016 nanti. Meski dari sisi kualitas SDM bangsa ini cukup mumpuni, dalam persaingan atau kesiapan kerja di level regional, mereka selalu sulit.

Ini yang menjadi persoalan bangsa ini. Salah satu isu mengemuka adalah bagaimana para pemangku kepentingan di bidang pendidikan nasional memberikan pendidikan *soft skill* bagi para pekerja Indonesia. Pendidikan *soft skill* lebih dibutuhkan dunia industri dibandingkan SDM yang memiliki *hard skill*, meski masih banyak industri pula yang menempatkan *hard skill* sebagai saringan awal.

Terkait kompetensi SDM Indonesia dalam menyambut MEA juga dikhawatirkan oleh anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PPP Okky Asokawati.

Dirinya sangat khawatir terkait persiapan pemerintah dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Pasalnya, aturan yang diterapkan oleh Kementerian Tenaga Kerja yang membebaskan pekerja asing tidak harus mampu berbahasa Indonesia akan mengancam kelangsungan hidup para pekerja baik level manajerial maupun pekerja bawah.

“Saya sebetulnya sangat khawatir dengan MEA ini, tadinya saya pikir yang akan menjadi ancaman itu yaitu pekerja *white collar* yaitu di level manajerial tetapi dengan adanya penghapusan tidak perlunya para pekerja asing berbahasa Indonesia, maka ancaman itu akan diiringi dengan merangseknya pekerja Tiongkok di Indonesia, yang saya khawatirkan mereka akan mengancam keberadaan buruh lokal,” jelasnya.

Menurutnya, level pendidikan para pekerja di Indonesia masih banyak yang berpendidikan SMP ke bawah, oleh karena itu perlu adanya kebijakan yang berpihak kepada rakyat. “Sebetulnya sudah ada pembatasan misalnya saja satu tenaga asing didampingi 10 tenaga kerja lokal,

didalam aturan Kemenaker itu ternyata disanggah, untuk pekerja sementara 1 banding 10 itu tidak berlaku, karena menurut Menaker para pekerja Tiongkok itu kategorinya sementara karena mereka bekerja 6-12 bulan,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga meminta, Kementerian Tenaga Kerja untuk melakukan revisi Permenaker Nomor 16 Tahun 2015 yang berpotensi melanggar norma di UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu poin penting dari UU Nomor 13 Tahun 2013 itu, TKA dapat bekerja di Indonesia dengan catatan melakukan transfer pengetahuan ke Tanah Air.

“Melalui revisi ini diharapkan peluang bagi pekerja lokal terutama buruh kasar untuk mendapatkan pekerjaan *transfer knowledge* tetap ada,” paparnya.

Terkait sektor kesehatan, jelasnya, pemerintah belum terlihat adanya sikap yang efektif dan signifikan dalam mengantisipasi membeludaknya tenaga kerja asing di sektor kesehatan tersebut. “Belum ada sikap yang efektif dan signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja profesional di sektor kesehatan,” katanya.

Hal yang harus dilakukan pemerintah dalam hal ini yaitu harus memberikan pemberdayaan kompetensi bagi para pekerja kesehatan. Berikutnya yaitu memberikan fasilitas bagi para profesional untuk mendapatkan sertifikat dari organisasi profesi tingkat internasional. “Memang hal itu sudah dilakukan BNP2TKI dimana mereka memanggil fasilitator dari Filipina yang tergabung dari asosiasi perawat internasional agar mereka melakukan training untuk mendapatkan sertifikat internasional sehingga dapat bekerja di luar negeri,

Menurutnya, hal yang dilakukan BNP2TKI masih belum maksimal yaitu hanya untuk sektor tenaga kerja perawat. Oleh karena itu, tambahnya, perlu ditindaklanjuti atau dikembangkan untuk sektor profesional lainnya.

Okky menilai, sektor swasta khususnya di pariwisata juga akan terkena dampaknya saat MEA nanti. Karena memang kemampuan bahasa Inggris para *guide* pariwisata itu lebih baik dibandingkan dengan *tour guide* kita. “Orang Singapura bahasa Inggrisnya tentu lebih lancar dibandingkan orang kita, karena itu perlu adanya pemberdayaan bagi pekerja profesional dan memfasilitasi mereka dengan sertifikat internasional, dan kursus lainnya,” jelasnya.

“Belum ada sikap yang efektif dan signifikan dalam memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja profesional di sektor kesehatan.”

Dirinya menyalahkan langkah Menteri Tenaga Kerja dalam, menghadapi MEA ini, pasalnya saat Rapat Kerja (Raker) mereka jawabannya selalu terkesan tidak solid dan programnya tidak *real*. “Menurut saya pemerintah belum punya misi atau program yang *solid* dan jelas untuk memberikan perlindungan bagi pekerja yang di Indonesia. Saya pernah mengingatkan saat menghadiri kuliah umum, apabila pemerintah tidak memberdayakan potensi anda maka anda yang akan keluar usaha sendiri seperti *training*, kursus dan sebagainya,” jelasnya. (si) Foto: Husen/Parle/IW



Anggota Komisi VI DPR Sungkono

PERLINDUNGAN BAGI PENGUSAHA NASIONAL HARUS DIPERKUAT

Sebagai negara dengan penduduk terbesar di Asia Tenggara (Asean), Indonesia akan menjadi sasaran pasar bagi negara-negara anggota Asean lainnya. Karena itu efisiensi harus dilakukan, dari awal hingga akhir produksi, hilir ke hulu harus koordinasi secara baik jangan parsial peminanannya.

“Ini yang saya khawatirkan menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada akhir tahun 2015 nanti. Masih banyak banyak masalah berkaitan dengan dunia usaha kita,” ungkap **anggota Komisi VI DPR Sungkono** dalam perbincangan dengan Parle di ruang kerjanya, Senayan, Jakarta.

Menghadapi ini, maka proteksi atau perlindungan kepada pengusaha nasional harus diperkuat. Lembaga Standardisasi Mutu harus mengawasi produk asing yang masuk, apakah benar sesuai standar atau

tidak. Antara *sampling* yang diberikan dan barang keseluruhan harus sama dan pengawasannya harus ketat termasuk komplain masyarakat.

Di pelabuhan, aparat Bea Cukai dan lembaga survey harus secara ketat mengawasi barang-barang yang masuk sesuai standar mutu di Indonesia. Penetapan standardisasi dalam rangka memproteksi sehingga barang-barang yang masuk selain bermutu juga dijamin keamanan dan kesehatan serta keselamatannya.

Selaku pengusaha, politisi dari

Fraksi PAN ini melihat sektor UMKM menghadapi MEA masih kurang siap. Dari hampir 56 juta UMKM dan bisa menyerap tenaga kerja cukup banyak yang bisa menghidupi hampir separuh jumlah penduduk Indonesia, masih minim kesiapan seperti ketidaksiapan kemampuan produksi, permodalan, manajemen termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan sasaran pasarnya. “Yang sudah siap hanya perusahaan yang sudah mapan dan jumlahnya relatif sedikit,” katanya.

Meski demikian, Sungkono menegaskan, mau tidak mau MEA harus dihadapi, makanya pemerintah harus melakukan percepatan berusaha ekstra keras membantu dan membesarkan UMKM. Seperti mempermudah permodalan, membantu proses pemasaran, *blending* merek-merek dalam negeri serta menjaga standardisasi mutu. Diingatkan, kita memasuki pertarungan ekonomi global maka benar-benar ada usaha keras pemerintah dan tidak bisa dianggap remeh.

Anggota Dewan yang mengikuti industri kecil berupa barang jadi kulit, sepatu, tas dan produk lainnya mengaku berupaya memproduksi barang bagus dan punya daya saing kualitas dan harga dan mencoba *membranding* sendiri dengan penuh kreatif dinamis.

“Saya memiliki strategi sendiri, yang penting kalau menghadapi kesulitan jangan menyerah. Makanya pemerintah diharapkan memberikan pembinaan tidak hanya teknis saja, tetapi juga pembinaan persiapan mental sebagai calon wira usaha. Pemerintah harus membuat kader-kader wira usaha baru yang tangguh,” ujarnya.

Soal persyaratan sertifikasi, politisi PAN ini menyatakan diperlukan untuk meyakinkan konsumen kalau produk itu sudah dijamin kualitasnya. Apalagi yang berkaitan dengan keselamatan jiwa, kesehatan kenyamanan, bukan hanya tekad pemerintah, tapi pengusaha juga ingin seperti itu.

Tapi hambatannya, apakah mereka

semua mampu. Kalau modal kecil, bagaimana bicara sertifikasi, untuk bisa makan saja sudah untung. Yang bersertifikasi adalah perusahaan yang manajemennya sudah matang.

Meski demikian, harapan bisa memiliki sertifikasi harus selalu didengarkan supaya produk dalam negeri benar-benar layak tampil bahkan disandingkan dan mampu bersaing dengan produk luar termasuk dari negara Asean lainnya. Layak untuk dikompetisikan.

Untuk menjaga kenyamanan pengusaha yang belum siap ini, ia minta dikawal betul, dijaga benar yang masuk adalah mutunya dijamin, jangan kasih kesempatan masuk. Bagi pengusaha dalam negeri, belajar meningkatkan mutu, mempercepat proses standardisasi supaya bisa ekspansi. “Ibaratnya kita mau diserang jangan diam saja. Ini memasuki perang dunia dalam bidang bisnis. Dulu perang dengan mengangkat senjata, sekarang perang ekonomi dan bisnis,” kata Sungkono mengingatkan. (mp) Foto:

Jaka, Dok./Parle/IW





Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono

INDONESIA HARUS TERAPKAN SISTEM CABOTAGE DI BIDANG STRATEGIS

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo Soekartono mengatakan Indonesia dengan pemerintahan yang sekarang ini sangat belum siap menghadapi MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ia melihat tidak ada keseriusan pemerintah untuk menyikapi hal itu. Mulai dari industri, dan perdagangannya serta BSN (Badan Standardisasi Nasional) dan KPPU (Komisi pengawas persaingan usaha) nya juga belum siap. Pelatihan dan perhatian berupa bantuan modal bagi Industri kecil menengah (IKM) misalnya sangat minim, bahkan belakangan cenderung dikurangi.

Tidak hanya itu menurut Bambang, IKM masih diberikan satu beban yang luar biasa, yakni dengan beban pajak yang demikian tinggi satu persen dari *revenue* (pendapatan),

atau sama dengan lebih dari lima puluh persen dari pajak keuntungan, karena sebenarnya UKM-UKM yang berjumlah jutaan itu belum tentu mendapatkan untung yang besar. Belum lagi dari fasilitas yang ada, sangat sulit bagi UKM-UKM itu bersaing dengan Negara-negara yang ada di kawasan ASEAN ini.

“Kalau kita tidak siap sebenarnya sangat-sangat memalukan, karena Indonesia sebagai penggagas ASEAN, ketika zaman pak Harto, pak Harto sebagai penyatu ASEAN. Kita (Indonesia-red) *leader* dibanding negara-negara lain di ASEAN,” ungkap Bambang yang juga menjadi anggota Banggar DPR RI.

Sektor Industri

Sejatinya, menurut Bambang dengan sisa waktu yang hanya beberapa bulan sebelum memasuki MEA

ini, pemerintah sudah harus mulai berkoordinasi dengan negara-negara ASEAN untuk bersama-sama merumuskan apa yang harus dilakukan bersama tanpa saling menjatuhkan, tanpa saling mengancam, dan bahkan menghasilkan produk yang sesuai dengan karakter masing-masing Negara. Bahkan jika diperlukan bisa mengkartelisasi harga di ASEAN untuk di jual ke negara yang lain.

Indonesia perlu merebut segmen (pasar) yang tidak ada di negara tetangga, karena komoditas baik itu pangan, ataupun *mining* (pertambangan). Belerang contohnya, Indonesia satu-satunya negara di ASEAN yang memiliki belerang. Tidak hanya itu, Thailand, Vietnam, Singapura tidak memiliki batu bara. Begitu juga dengan emas.

Sementara untuk hasil pertanian dan perkebunan, walaupun Malaysia juga memiliki kelapa sawit, namun tetap Indonesia yang terbesar untuk itu. Begitupun dalam perikanan, Indonesia dengan jumlah lautan terbesar sudah pasti menghasilkan lebih banyak ikan dengan beraneka ragam spesies.

Dengan kekayaan alam yang dimiliki Indonesia itu sejatinya dapat dijadikan modal untuk mulai membangun pabrik-pabrik Industri setengah hilir. Jangan sampai kesempatan ini diambil oleh negara lain. Saat ini Bambang melihat Indonesia masih berketergantungan mengimpor bahan baku dan bahan setengah jadi, yang kemudian dikuasai oleh negara lain termasuk Singapura yang notabene merupakan negara kecil dengan sumber daya alam yang sangat minim.

Dalam industri pariwisata, Bambang menilai sejatinya Indonesia juga bisa menjadi *leader* dibanding negara ASEAN lainnya. Tidak hanya dilihat dari sumber daya alam de-

ngan keindahan alamnya, namun sejarah Indonesia dengan lebih dari 800 kerajaan itu bisa menghasilkan budaya yang sangat banyak. Kondisi itu dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

“Coba kita lihat kenapa Thailand bisa merebut Industri Pariwisata, dengan jumlah wisatawan sekitar 8-10 kali lipat lebih banyak dari Indonesia. Indonesia hanya sekitar 8 juta turis per tahun dengan hasil sekitar 60 triliun, sementara Thailand dengan jumlah turis 50 juta lebih dengan pendapatan sekitar 400-600 triliun dalam satu tahunnya. Padahal dilihat dari sumber daya alam, keindahan alam, keragaman budaya jelas Indonesia sangat unggul. Ini adalah pertanyaan besar yang harus dicari jawaban dan solusinya,” papar Bambang.

Langkah-Langkah Antisipasi

Berbagai langkah antisipatif yang bisa dijadikan rujukan untuk melindungi produk, perusahaan dan tenaga kerja Indonesia dalam menyongsong MEA. BSN (Badan Standardisasi Nasional) yang berwenang dalam mengeluarkan Standar Mutu Nasional yang dinamakan SNI, memiliki tugas melindungi agar produk-produk luar negeri ini tidak mudah masuk ke Indonesia. Tapi kenyataannya anggaran untuk BSN dikurangi lebih dari 20%. Begitupun dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) dimana anggarannya dipotong sebesar 15%. Padahal semua itu seharusnya diperkuat untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN ini. Tentunya, disamping untuk mendidik pengusaha-pengusaha dalam negeri agar memiliki standardisasi nasional yang kuat.

Politisi dari Fraksi Partai Gerinda ini menilai, hingga saat ini Pemerintah belum membuat satu pernyata-

an kepada masyarakat akan ajakan (kampanye) penggunaan produk dalam negeri. Seharusnya Kementerian perindustrian mengampurkan hal itu sejak dini. Karena dengan menggunakan produk dalam negeri, akan memperkuat ekonomi bangsa ini. Dengan memperkuat produk dalam negeri, tentunya akan membuat ekonomi kita kuat dan itu pada akhirnya bisa menyejahterahkan masyarakat Indonesia. Dimana ada 150 juta rakyat Indonesia tergantung pada usaha-usaha kecil dan menengah ini.

“Misalnya kebiasaan menggunakan produk kertas dari Jepang. Untuk merubah semua ini butuh waktu, butuh penyesuaian, termasuk penyesuaian menggunakan produk-produk Indonesia,” ujarnya.

“Hingga saat ini Pemerintah belum membuat satu pernyataan kepada masyarakat akan ajakan (kampanye) penggunaan produk dalam negeri. Seharusnya Kementerian perindustrian mengampurkan hal itu sejak dini. Karena dengan menggunakan produk dalam negeri, akan memperkuat ekonomi bangsa ini.”

Negara juga wajib memberikan menyediakan payung hukum yang kuat berupa undang-undang dan peraturan lain yang berpihak pada pengusaha dan produk dalam negeri. Asas *cabotage* menurut Bambang wajib diterapkan di Indonesia. *Cabotage* merupakan prinsip yang memberi hak untuk beroperasi secara komersial di dalam suatu negara hanya kepada perusahaan dari

negara itu sendiri secara eksklusif.

Cabotage harus diterapkan khususnya pada bidang-bidang strategis, dan asing tidak boleh menguasai bidang strategis itu. Sebut saja pelabuhan Pelindo yang sejatinya tidak boleh diberikan kepada perusahaan asing. Karena menurutnya jika pintu gerbang perekonomian ini diberikan kepada asing, maka akan mudah bagi negara lain untuk melumpuhkan negara kita. Selain itu industri lain seperti pertambangan juga seharusnya benar-benar dikuasai oleh negara untuk sepenuhnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945.

Selain itu dalam hal sumber daya manusia (SDM), Bambang menilai SDM Indonesia *oversupply*. Singapura hanya memiliki 3 juta jiwa, Malaysia hanya punya 26 juta, Filipina 80 juta, Thailand 60-70 juta, sementara Indonesia memiliki 250 juta jiwa. Dengan kondisi itu seharusnya tenaga kerja Indonesia mampu tersebar di semua pasar perdagangan. Adanya MEA membuka kesempatan bagi tenaga kerja Indonesia untuk mendapatkan pekerjaan di negara lain. Sayangnya, saat ini banyak SDM Indonesia masih berpendidikan rendah. Dengan begitu, sejak dini menurutnya harus diberikan pendidikan yang cukup, mulai dari sisi *knowledge* atau pengetahuan serta *skill* atau keahlian.

“Tidak hanya itu, perlindungan bagi SDM Indonesia atau TKI salah satunya dengan membatalkan keputusan pencabutan undang-undang yang mewajibkan tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia. karena untuk TKI yang ingin bekerja ke luar negeri saja wajib lulus test TOEFL sebesar 500. Jadi sudah seharusnya juga Indonesia mewajibkan tenaga kerja asing bisa berbahasa Indonesia,” tegas Bambang mengakhiri. (Ayu) Foto: Naefuroji/Parle/IW



Wakil Ketua KADIN Rauf Purnama

PEMERINTAH HARUS BANGUN INDUSTRI HULU

Lebih dari satu dekade silam pemimpin negara di ASEAN sepakat membentuk sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang disebut ASEAN Economic Community atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada akhir 2015 mendatang. Hal ini dilakukan agar daya saing negara-negara di Asean meningkat sehingga bisa menyaingi Cina dan India dalam menarik investasi asing.

Lewat MEA, nantinya memungkinkan Indonesia menjual barang dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh negara di Asia Tenggara, begitupun sebaliknya. Dengan demikian tentu saja kompetisi atau persaingan akan semakin ketat. Masyarakat Ekonomi Asean tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya.

Menurut Rauf Purnama, Wakil Ketua KADIN (Kamar dagang In-

donesia) mengatakan untuk menjawab apakah Indonesia sudah siap untuk menghadapi MEA, maka sejatinya perlu dilihat dari empat faktor terlebih dahulu, yakni SWOT. S (strengths) atau kekuatan, W (weaknesses) atau kelemahan, O (opportunities) atau peluang, dan T (threats) atau ancaman.

“Indonesia memiliki *strengths* atau kekuatan di sektor produksi pertanian, sementara di bidang industri Indonesia sangat lemah,” ungkap Rauf.

Ia mencontohkan botol minuman gelas, dimana Indonesia hanya mampu memproduksi 600 ribu, sementara Singapura yang notabene merupakan negara yang lebih kecil dibanding Indonesia mampu memproduksi 1,8 juta, Malaysia 2,7 juta dan Thailand 3,2 juta. Kenapa demikian? Karena Indonesia kalah dalam industri, namun tentu hal itu tidak harus membuat kita berdiam diri, menurut Rauf Indonesia harus menyiapkan industri yang kuat, salah satu caranya dengan memperkuat industri hulu. Untuk hal ini tentu harus ada campur tangan pemerintah. Seperti halnya yang dilakukan pemerintah Taiwan, Singapura dan Korea yang menyiapkan industri hulu (upstream), sementara Industri hulu Indonesia dikuasai oleh swasta.

Untuk membangun Industri hulu ini memang sangat mahal investasinya, selain itu juga membutuhkan teknologi tinggi, dengan begitu risikonya pun sangat tinggi (high investment, high technology, high risk) Oleh karena itu Rauf menilai pemerintah tidak perlu membangun banyak Industri hulu. Petrokimia misalnya, di bawahnya bisa menghasilkan sekitar lima ribu industri hilir.

Rauf menilai sumber daya alam (SDA) Indonesia sangat kaya, itu menjadi keunggulan tersendiri bagi Indonesia dibanding negara lain. Sejatinya, keunggulan itu dapat dijadikan modal bagi negara kita tercinta ini untuk bisa bersaing dengan negara lain. Mengontrol atau mengawasi penjualan SDA ke negara lain. Selama ini dengan alasan kurang memadainya teknologi yang dimiliki, Indonesia memilih mengekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah atau bahan baku ke negara lain. Sayangnya ketika negara kita membeli hasil SDA Indonesia yang sudah diolahnya tersebut, harga yang dikenakan

sangat tinggi. Hal ini tentu sangat merugikan Indonesia. Sangat miris memang, Indonesia dengan SDA terkaya membeli hasil sumber daya alamnya sendiri yang sudah diolah dari negara lain dengan harga yang tinggi.

Meski demikian bukan berarti Industri hilir tidak penting, tapi keberadaannya akan mengikuti industri hulu. Jika diibaratkan Kereta, industri hilir merupakan gerbongnya, sementara industri hulu merupakan lokomotifnya. Dari perumpamaan tersebut dijelaskan Rauf, industri hilir tidak akan dapat berjalan jika tidak ada industri hulu.

“Pemerintah harus memberi kemudahan untuk membangun industri hulu. Disini juga diperlukan peran swasta meski hanya sekitar dua puluh persennya saja, karena memang *high risk* tadi,” jelas Rauf.



Suasana di bursa tenaga kerja

Terkait dengan rencana pemerintah membangun lima ribu pasar sebagai realisasi nawacita dalam menyambut MEA, Rauf mengatakan hal tersebut sejatinya tidak terlalu *urgent*. Pasalnya pasar hanya sekedar sarana, yang terpenting dari itu adalah produk yang akan dipasarkan.

“Lima ribu pasar, produknya dari mana, import? Lebih baik kita punya produk yang dihasilkan sendiri dan jualnya pun tidak perlu di pasar, namun di gubuk biasa saja, itu tentu akan lebih baik dibanding kita membangun banyak gedung tetapi tidak ada produknya,” ungkapnya.

Selain memberi kemudahan untuk membangun industri hulu, merubah pola ekspor dari bahan baku menjadi bahan jadi, yang juga harus dilakukan pemerintah dalam menyongsong MEA adalah dengan memberi perlindungan dan pelatihan kepada tenaga kerja Indonesia untuk bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

“Pelatihan dan pendidikan yang cukup bagi tenaga kerja Indonesia akan menjadi modal tersendiri dalam bersaing dengan tenaga kerja asing dalam era MEA mendatang.

Sementara perlindungan kepada TKI juga dilakukan lewat berbagai kebijakan dan regulasi yang memihak TKI. Bukan malah memudahkan tenaga kerja asing untuk masuk dan berkompetisi di Indonesia,” pungkaskah kelahiran 21 Maret 1943 ini kepada Parleментарia. (Ayu) Foto: Nae-furoji, Ist/Parle/IW

Tantangan dan Prospek Indonesia Memasuki Masyarakat Ekonomi Asian(MEA)

Oleh:



Mandala Harefa



Juli Panglima Saragih

Sejak terbentuk pada bulan Agustus 1967 oleh 6 (enam) Negara pendiri, ASEAN terus berkembang sampai saat ini dengan 11 (sebelas)¹ negara. Kesepakatan penting dan strategis ASEAN biasanya diambil melalui pertemuan tingkat tinggi dalam setiap KTT. Pada KTT ASEAN ke-10 di Vientien, Laos tahun 2004 pemimpin ASEAN sepakat merealisasikan Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) pada tahun 2020 dengan membentuk komite *High Level Tasks Force* (HLTF) yang memiliki kewenangan dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Namun pada KTT ASEAN ke-12 di CEBU, Filipina tahun 2007 menyepakati percepatan realisasi MEA dari Tahun 2020 menjadi tahun 2015. Keputusan mempercepat pembentukan MEA ini adalah dalam rangka memperkuat daya saing ASEAN menghadapi kompetisi ekonomi dan perdagangan global. Untuk itulah disusun The ASEAN Charter sebagai payung hukum, panduan terwujudnya MEA, serta menjadi basis komitmen dalam meningkatkan kerjasama Negara anggota ASEAN ke depan, khususnya ekonomi.

Terdapat 4 (empat) prinsip utama yang menjadi fokus MEA pada 2015 yang dapat dijadikan suatu momentum baik untuk Indonesia ke depan. *Pertama*, negara-negara di kawasan Asia Tenggara ini akan dijadikan se-

1 Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, Singapura, Philippina, Thailand, Vietnam, Laos, Kamboja, Myanmar, dan Timor Leste.

buah wilayah kesatuan pasar atau pasar tunggal (*single market*)² dan basis produksi. Dengan terciptanya kesatuan pasar dan basis produksi, maka akan membuat arus barang, jasa (khususnya jasa keuangan), investasi, modal dalam jumlah yang besar, dan SDAM, (*skilled labour*) menjadi tidak ada hambatan dari satu negara ke negara lainnya di kawasan Asia Tenggara.

Kedua, MEA—sebagai kawasan ekonomi dan perdagangan baru dengan tingkat kompetisi yang tinggi memerlukan suatu kebijakan bersama masing-masing anggota yang meliputi *competition policy, consumer protection standard, Intellectual Property Rights (IPR), tax regulations and laws, dan E-Commerce*. Dengan demikian, dapat tercipta iklim persaingan usaha yang *fair* dan adil; perlindungan berupa sistem jaringan dari agen-agen perlindungan konsumen; mencegah terjadinya pelanggaran hak cipta, merek (dagang), dan patent; menciptakan jaringan transportasi yang efisien, aman, dan terintegrasi; menghilangkan sistem *Double Taxation*, dan meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri dengan media elektronik berbasis *online E-commerce*

Ketiga, dengan terbentuknya MEA, maka diharapkan terjadi pemerataan pertumbuhan ekonomi di kawasan, dengan memprioritaskan pengembangan pada Usaha Kecil, dan Menengah

2 Bandingkan dengan terbentuknya Pasar Tunggal Eropa dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) di Uni Eropa dengan mata uang bersama *Euro*-nya.

(UKM). Kemampuan daya saing UKM Indonesia dapat ditingkatkan dengan memfasilitasi akses yang sama terhadap informasi terkini, kondisi (informasi) pasar, pengembangan sumber daya manusia (SDM) dengan meningkatkan kemampuan/kompetensi (*competence*), akses pada lembaga keuangan, serta teknologi.

Keempat, dengan terbentuknya MEA maka ekonomi ASEAN akan diintegrasikan secara penuh terhadap perekonomian global/internasional dengan membangun sebuah sistem untuk meningkatkan koordinasi antar-negara anggota ASEAN. Selain itu, akan ditingkatkan partisipasi negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada jaringan pasokan global melalui pengembangan paket bantuan teknis kepada negara Anggota ASEAN yang kurang berkembang, seperti Kamboja, Laos, dan Myanmar. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemampuan/kapasitas sektor industri dan produktivitas SDM di 3 negara tersebut, sehingga tidak hanya terjadi peningkatan peran dan partisipasi mereka pada skala regional ASEAN, namun juga memunculkan inisiatif untuk terintegrasi secara global.

MEA: DARI DAN UNTUK MASYARAKAT ASEAN

Berdasarkan ASEAN Economic Blueprint, terdapat beberapa keuntungan MEA bagi negara anggota, *pertama*, MEA menjadi sangat dibutuhkan untuk

memperkecil kesenjangan ekonomi antar-negara ASEAN seperti pertumbuhan ekonomi (PDB), dengan meningkatkan kerja sama dan memunculkan saling ketergantungan antar-anggota ASEAN didalamnya.

Kedua, MEA juga dapat mengembangkan konsep meta-nasional dalam rantai suplai bahan makanan (pangan) yang dibutuhkan masing-masing negara guna menjaga dan meningkatkan ketahanan pangan negara anggota, apabila terjadi krisis pangan.

Ketiga, MEA juga dapat memiliki posisi tawar-menawar yang kuat (bargaining position) melalui “blok perdagangan baru” yang dapat menangani dan bernegosiasi dengan investor, eksportir, dan importir non-ASEAN, termasuk negara maju seperti AS, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Eropa. ASEAN juga dapat memainkan peran geo-strategis guna melindungi kepentingan ekonomi dan perdagangan masing-masing, melalui mekanisme yang disepakati bersama.

Arus keluar-masuk barang secara bebas tanpa hambatan (non-trade barriers) merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan kekuatan pasar tunggal. Mekanisme ini dapat membentuk jaringan produksi regional ASEAN secara berkesinambungan. Untuk mewujudkannya, anggota ASEAN

telah menyepakati the ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA) pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2008 di Bangkok, Thailand. ATIGA merupakan kodifikasi dari keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitas perdagangan, menuju ASEAN Free Trade Area yang sesungguhnya Arus keluar-masuk barang secara bebas tanpa hambatan (non-trade barriers) merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan Masyarakat Ekonomi ASEAN dengan kekuatan pasar tunggal. Mekanisme ini dapat membentuk jaringan produksi regional ASEAN secara berkesinambungan. Untuk mewujudkannya, anggota ASEAN telah menyepakati the ASEAN Trade in Good Agreement (ATIGA) pada KTT ASEAN ke-14 tahun 2008 di Bangkok, Thailand. ATIGA merupakan kodifikasi dari keseluruhan kesepakatan ASEAN dalam liberalisasi dan fasilitas perdagangan, menuju ASEAN Free Trade Area yang sesungguhnya.

Ekonomi ASEAN yang terintegrasi membutuhkan komitmen bersama dan persyaratan yakni adanya trade facilitator, ASEAN Single Window, dan Custom integration. Trade facilitator menghendaki dihapuskannya hambatan non-tarif (non-tariff barriers). Sedangkan ASEAN Single Window menghendaki sistem dan prosedur perijinan investasi dan berusaha yang

simple, mudah, dan cepat (perijinan terpadu satu pintu). Sedangkan *custom integration* mengharuskan adanya sistim kepabeanaan yang komprehensif dan terintegrasi dari semua sektor.

MEA: TANTANGAN DAN PROSPEK BAGI INDONESIA

Terbentuknya MEA—kawasan ekonomi dan perdagangan bebas Asia Tenggara menjadi tantangan dan peluang/prospek bagi Indonesia, khususnya ekonomi. Data BKPM menunjukkan pada Semester I/2015, investasi asing langsung ke Indonesia merupakan terbesar (USD13,66 milyar) dibandingkan ke negara ASEAN lain seperti Vietnam (USD7,53 milyar), dan Malaysia (USD7,01 milyar). Sedangkan konteks investasi intra-ASEAN, hanya Singapura yang menjadi salah satu investor terbesar ASEAN ke Indonesia.

Dari aspek tenaga kerja, tantangan ke depan bagaimana meningkatkan kompetensi dan keahlian SDM di berbagai bidang (skilled labor), karena arus SDM sudah tidak ada hambatan. Kemampuan TKI juga harus ditingkatkan tidak hanya ke Malaysia dan Singapura, tetapi juga ke negara anggota lain yang membutuhkan TKI. SDM Indonesia juga harus dapat bersaing dengan SDM negara anggota lain di bursa tenaga kerja dalam negeri, terutama posisi middle and top manager. Sehingga akan menambah para professional dan kelas menengah baru di masa datang.

Porsi angkatan kerja ASEAN terhadap total angkatan kerja dunia, misalnya dalam periode 1990-2010 berada dalam kisaran 8-9 persen. Pada tahun 1991 misalnya, jumlah angkatan kerja ASEAN sebesar 203,3 juta jiwa atau sekitar 8,44 persen dari angkatan kerja dunia 1991 yang mencapai 2,4 miliar jiwa. Pada 1998 jumlah angkatan kerja ASEAN meningkat menjadi 238,7 juta jiwa atau 8,85 persen dari total angkatan kerja dunia 1998 yang sekitar 2,7 miliar jiwa. Sementara tahun 2000, jumlah angkatan kerja ASEAN menjadi 252,1 juta jiwa atau sekitar 9,04 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 2000 yang mencapai 2,79 miliar jiwa.

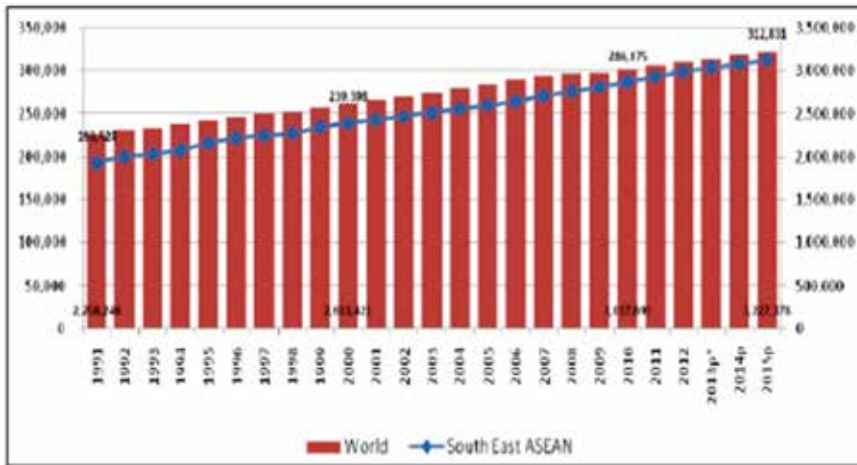
Tabel. Investasi Asing Langsung (foreign direct investment) Intra-ASEAN dan Investasi ASEAN ke Luar, Tahun 2012-2014

No.	Negara	Intra-ASEAN	Investasi ASEAN ke Luar	Investasi Asing ke ASEAN	Intra-ASEAN	Investasi ASEAN ke Luar	Investasi Asing ke ASEAN	Intra-ASEAN	Investasi ASEAN ke Luar	Investasi Asing ke ASEAN
1	Brunei Darussalam	31.5	833.3	864.8	-58.0	783.5	725.5	141.2	427.0	568.2
2	Cambodia	523.0	1,034.1	1,557.1	298.8	976.1	1,274.9	372.5	1,354.0	1,726.5
3	Indonesia	7,587.9	11,550.0	19,137.9	8,721.1	9,722.7	18,443.8	13,458.8	8,817.5	22,276.3
4	Lao PDR	73.6	220.7	294.4	104.6	322.1	426.7	137.9	775.3	913.2
5	Malaysia	2,813.9	6,586.1	9,400.0	2,187.5	10,109.9	12,297.4	2,771.1	7,943.0	10,714.0
6	Myanmar	151.2	1,203.0	1,354.2	1,186.8	1,434.1	2,620.9	683.6	262.6	946.2
7	Philippines	145.2	2,651.8	2,797.0	(41.7)	3,901.5	3,859.8	78.6	6,121.9	6,200.5
8	Singapore	8,302.0	52,678.3	60,980.3	3,665.0	52,473.3	56,138.3	4,532.7	67,565.6	72,098.3
9	Thailand	-342.0	11,041.2	10,699.2	1,256.8	11,743.0	12,999.8	653.9	10,884.0	11,537.9
10	Viet Nam	1,262.5	7,105.5	8,368.0	2,078.6	6,821.4	8,900.0	1,547.1	7,653.0	9,200.1
	Total	20,548.8	94,904.0	115,452.8	19,399.6	98,287.5	117,687.0	4,377.4	111,803.9	136,181.4

Keterangan: *)Proyeksi

Sumber: Diolah dari Database the ASEAN Working Group on International Investment Statistics (WGIIIS), the Secretariat of ASEAN, Jakarta, dalam www.asean.org, diakses 3 September 2015.

Gambar 1. Perkembangan Angkatan Kerja ASEAN, 1991-2014.



Sumber: *the Global Competitiveness Index (GCI), 2014-2015*

Pada tahun 2010, jumlah angkatan kerja ASEAN meningkat menjadi 301 juta jiwa atau sekitar 9,37 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 2010 yang sebesar 3,2 miliar jiwa. Dalam implementasi MEA tahun 2015 ini, jumlah angkatan kerja ASEAN diperkirakan mencapai 326,9 juta jiwa atau sekitar 9,51 persen dari total angkatan kerja dunia tahun 2015 yang diperkirakan mencapai 3,4 miliar jiwa.

Terdapat kesempatan besar bagi para pencari/calon tenaga kerja Indonesia (TKI) karena dapat banyak tersedia lapangan kerja dengan berbagai kebutuhan akan keahlian yang beraneka ragam. Selain itu, akses TKI untuk pergi keluar negeri dalam rangka mencari pekerjaan menjadi lebih mudah bahkan bisa jadi tanpa ada hambatan tertentu. MEA juga menjadi kesempatan yang baik bagi para wirausahawan baru (*entrepreneur*) untuk mencari pekerja terbaik sesuai dengan kriteria/kompetensi yang diinginkan. Namun sebaliknya, hal ini dapat memunculkan risiko ketenagakerjaan bagi Indonesia, karena dari aspek pendidikan dan produktivitas, SDM Indonesia masih kalah bersaing dengan tenaga kerja Malaysia, Singapura, Thailand, bahkan Vietnam.

Meskipun dalam hal pemenuhan pendidikan di Indonesia telah terlaksana, tetapi masih pula ditemui masalah pengangguran terdidik 7.244.905 jiwa per Agustus 2014 dimana yang me-

namatkan pendidikan jenjang universitas sebesar 495.143 jiwa dan diploma sebesar 193.517 jiwa. Ke depan pendidikan bukan hanya diarahkan untuk mencapai angka partisipasi pendidikan, tetapi lebih fokus pada peningkatan kualitas SDM.³

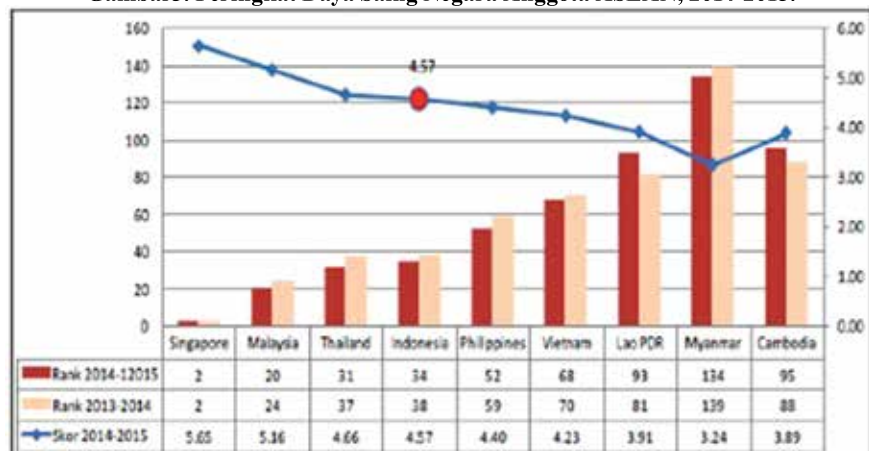
Dengan hadirnya MEA, Indonesia memiliki peluang untuk memanfaatkan keunggulan skala ekonomi dalam negeri khususnya UMKM, sebagai basis memperoleh keuntungan melalui ekspor. Namun demikian, Indonesia masih memiliki banyak tantangan dan risiko yang akan muncul. Oleh karena

dapat lebih peka terhadap fluktuasi yang akan terjadi agar dapat mengantisipasi risiko yang muncul dengan tepat dan cepat. Kolaborasi dan koordinasi yang antara-otoritas negara/antar-instansi pemerintah dengan para pelaku usaha sangat diperlukan. Selain itu tantangan percepatan pembangunan infrastruktur, baik fisik dan sosial (hukum dan kebijakan) perlu dibenahi. Jangan sampai Indonesia hanya menjadi penonton di negara sendiri.

Tantangan lain adalah laju inflasi Indonesia yang masih tergolong tinggi dibandingkan dengan Negara lain di kawasan ASEAN. Tingkat kemakmuran Indonesia juga masih lebih rendah dibandingkan negara lain. Populasi Indonesia yang terbesar di ASEAN membawa konsekuensi tersendiri terhadap upaya pemerataan pendapatan. Tiga negara ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand cenderung lebih siap dan lebih baik dalam menarik investasi asing, dengan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari Indonesia.

Lahirnya MEA dapat menciptakan iklim yang mendukung masuknya *Foreign Direct Investment*(FDI) guna menstimulus pertumbuhan ekonomi (PDB) melalui perkembangan teknologi, pen-

Gambar3. Peringkat Daya Saing Negara Anggota ASEAN, 2014-2015.



Sumber: *the Global Competitiveness Index (GCI), 2014-2015*

itu, para *risk professional* diharapkan 3 Tahun 2014: ASEAN Economic Community dan Post-MDGs yang "Terlupakan", dalam <http://www.kompasiana.com>, diakses 4 September 2015.

ciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia (*human capital*), dan akses yang lebih mudah ke pasar dunia. Meskipun demikian, kondisi

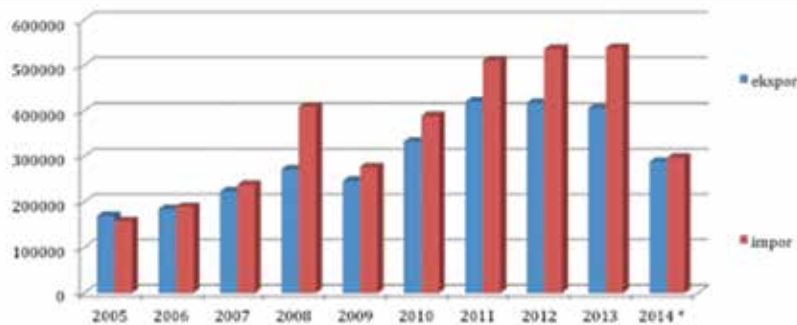
tersebut dapat memunculkan adanya *exploitation risk*. Indonesia masih memiliki tingkat regulasi yang kurang mengikat sehingga dapat menimbulkan tindakan eksploitasi skala besar terhadap sumber daya alam (SDA) oleh perusahaan asing (*multi-national corporation*) yang masuk ke Indonesia dibandingkan negara ASEAN lain yang

beli mereka. Sebagai gambaran, Brunei Darussalam dengan PDB per kapita per tahun sebesar USD92,3 ribu; Singapura dengan PDB per kapita sebesar USD92,0 ribu; Malaysia dengan PDB per kapita USD33,3 ribu; Thailand dengan PDB per kapita sebesar USD15,4 ribu, Indonesia dengan PDB per kapita USD9,5 ribu, Filipina dengan PDB per

Indonesia belum memanfaatkan pasar ASEAN secara maksimal. Produk-produk unggulan Indonesia yang berpotensi besar ke pasar ASEAN antara lain: produk olahan kayu, produk tekstil dan garment, produk kulit olahan, dan produk elektronik. Produk ekspor non-migas tersebut lebih unggul dan memiliki daya saing tinggi dibandingkan Malaysia, Singapura, dan Vietnam. Perekonomian Vietnam yang sedang tumbuh, merupakan pasar potensial bagi produk non-migas Indonesia dengan adanya MEA. Ekspor Indonesia ke pasar Vietnam tahun 2005 baru sebesar USD677,77 juta, namun tahun 2010 naik pesat menjadi USD1.946,2 juta. Meningkat setiap tahun sebesar 37,43%. Tahun 2013 telah mencapai USD2.400,9 juta.⁶

Potensi yang sangat penting akhir-akhir ini dan merupakan program menjadikan maritim sebagai salah satu prioritas dalam pemerintahan 5 tahun ke depan. Dan bahkan program pembangunan utama adalah menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD) yakni sebuah Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam, dan budaya maritim. Sekedar gambaran bahwa potensi dari sektor kelautan saja bahwa total potensi sektor kelautan Indonesia mencapai US\$ 1,2 triliun per tahun atau 7 kali lipat APBN 2014 (Rp 1.845 triliun = US\$ 170 miliar) atau 1,2 kali PDB nasional saat ini. Namun demikian, sebelumnya lebih dahulu Indonesia harus dapat meningkatkan daya saing di kawasan MEA. Pembangunan sektor perikanan mestinya ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas, daya saing, dan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, serta masyarakat lainnya secara ramah lingkungan dan berkelanjutan.⁷

Gambar 3. Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia ke ASEAN, 2005-2014, (USD Juta)



Keterangan: *Ekspor-Impor Non-Migas 2014

Sumber: Diolah dari Statistik Indonesia Tahun 2013, dan Indikator Ekonomi, Juli 2013 dan Juli 2014, BPS Jakarta.

minim SDA. Tidak tertutup kemungkinan eksploitasi SDA skala besar dapat merusak ekosistem dan lingkungan, sebagaimana yang terjadi pada sektor tambang mineral dan batu bara.

Dari sisi ekspor-impor, pasar ASEAN belum merupakan tujuan utama ekspor non-migas Indonesia. Ekspor non-migas ke pasar ASEAN relatif kecil. Pada tahun 2005 ekspor non-migas ke ASEAN sebesar USD14,580 milyar. Pada 2010 meningkat menjadi USD33,347 milyar—termasuk Migas atau 21,13% dari total ekspor. Sampai saat ini, negara utama ekspor Indonesia adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedangkan ekspor ke anggota ASEAN lain seperti Laos, Kamboja, dan Myanmar sangat kecil (lihat tabel).

Dari tabel di atas, Indonesia mengalami defisit neraca ekspor-impor cukup besar dengan ASEAN terutama sejak 2008–2013. Defisit ekspor-impor tersebut menjadi tantangan bagi Indonesia ke depan dengan MEA. Tingkat pendapatan per kapita penduduk Singapura, Malaysia dan Thailand yang relatif tinggi akan meningkatkan daya

kapita sebesar USD9,2 ribu, Vietnam dengan PDB per kapita sebesar USD5,5 ribu; Laos dengan PDB per kapita sebesar USD5,0 ribu; Kamboja dengan PDB per kapita sebesar USD3,6 ribu; dan Myanmar dengan PDB per kapitas USD3,4 ribu.⁴ Hal ini merupakan peluang bagi ekspor non-migas Indonesia di masa datang dengan adanya MEA. Di sisi lain, dengan jumlah penduduk Indonesia sebesar 249 juta, akan menjadi sasaran pasar produk non-migas dari negara ASEAN lain.

Porsi ekspor Indonesia ke ASEAN rata-rata setiap tahun baru mencapai 20–22% dari total ekspor secara keseluruhan. Tahun 2010, porsi ekspor ke ASEAN sebesar 21,13%; tahun 2011 sebesar 20,68%; tahun 2012 sebesar 22,01%; tahun 2013 sebesar 22,25%, dan tahun 2014 sebesar 22,0%. Sedangkan impor dari ASEAN rata-rata setiap tahun mencapai 25–28% dari total impor.⁵ Dari gambaran di atas,

4 Posisi Indonesia di ASEAN Mengkhawatirkan, dalam <http://sp.beritasatu.com>, diakses 4 September 2015.

5 Indikator Ekonomi, berbagai terbitan, Penerbit BPS, Jakarta.

Penutup

6 Indikator Ekonomi, Juli 2014, Penerbit BPS Jakarta, hal.113.

7 Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS. "Pembangunan Perikanan Menuju Poros Maritim Dunia" <http://pk-spl.ipb.ac.id/berita.html>, Sabtu, 11 Juli 2015. Diakses 7 September 2015

Dari uraian di atas, MEA—sebagai pasar tunggal bersama ASEAN merupakan suatu kawasan ekonomi dengan tingkat daya saing ekonomi yang tinggi. Agar Indonesia dapat bersaing dan memberikan kontribusi dalam mendukung basis produksi regional dan daya saing tinggi tersebut, maka perlu upaya memperbaiki atau meningkatkan daya saing produksi dan kompetensi SDM. MEA yang dimulai tahun 2015 ini, peluang Indonesia tentunya sangat besar bila terus meningkatkan daya saing, mengingat ekonomi Indonesia didukung oleh proporsi penduduk usia produktif dan pertumbuhan kelas menengah yang sangat besar. Hal ini merupakan pasar yang besar dan potensial. Stabilitas makro ekonomi dengan struktur ekonomi dan fundamental ekonomi yang semakin kuat, akan semakin memberi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (PDB) Indonesia.

Indonesia juga perlu terus mengembangkan dan meningkatkan nilai tambah produk unggulan ekspor non-SDA, seperti ekspor komoditas pertanian, perkebunan, perikanan dan produk sektori manufaktur lainnya. Disamping itu, Indonesia perlu mengantisipasi dampak pelaksanaan MEA dan daya tahan ekonomi dalam menghadapi

persingan bila semakin tingginya level liberalisasi arus barang dan jasa antar-negara ASEAN.

Mobilitas tenaga kerja terampil intra-ASEAN pada saat MEA diberlakukan, tidak semata-mata secara bebas murni, tetapi tetap diatur dalam suatu norma yang disebut *Mutual Recognition Arrangement (MRA)*. Dalam mekanisme MRA, sector tujuan akan mengakui kualifikasi sector asal atau sector pengirim.

Peningkatan efisiensi pasar tenaga kerja, misalnya, khususnya dalam hal permasalahan regulasi tenaga kerja yang kondusif terkait masalah yang sangat sensitif seperti kebijakan upah minimum (UMP). Hubungan antara pekerja dan pemberi kerja (hubungan industrial) haruslah semakin baik. Persoalan kebijakan *out-sourcing* perlu fleksibilitas di beberapa sektor, agar terjadi kepastian dan ketenangan pekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan buruh.

Kesiapan teknologi dan perbaikan kesehatan pekerja (K3) juga menjadi faktor penting. Pemerintah harus meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia agar mampu bersaing dengan tenaga-tenaga kerja dari berbagai sek-

tor lain di kawasan ASEAN. Salah satu kebijakan yang ditempuh Pemerintah untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja Indonesia adalah melalui Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi. Untuk itu, pemerintah perlu mempersiapkan berbagai strategi menghadapi MEA, apabila tidak terkena arus masuk barang dan tenaga kerja dari ASEAN. Pesaing utama Indonesia di pasar ASEAN adalah Malaysia, Thailand, dan Vietnam terlebih kondisi Indonesia masih direpotkan dengan permasalahan perekonomian dan kepastian sector dalam berusaha, termasuk masih rumitnya perijinan usaha di berbagai sektor.

Dan sangat penting mengembangkan salah satu potensi yang ada dihadapan kita adalah dari sector kemaritiman dan kelautan. Bukan saja dari sector perikanan yang akan berkontribusi signifikan dalam mengatasi permasalahan kekinian bangsa seperti pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk, tetapi juga bagi terwujudnya Indonesia yang menguasai seluruh kegiatan kemaritiman dan pariwisata pada era MEA 2015, bahkan menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) pada 2025.

Foto: Naefuroji/Parle/IW





DPR DAN PEMERINTAH ANTISIPASI DAMPAK KEKERINGAN

Ancaman kekeringan, gagal panen, dan penurunan produksi masih terus menghantui petani. Demikian juga warga kebingungan mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan antara DPR dan Pemerintah sudah jauh-jauh hari mengantisipasi musim kekeringan dan fenomena El Nino. Dia menyebut pihaknya telah memberikan solusi terkait pelimpahan anggaran untuk kegiatan antisipasi kekeringan, di antara pembelian pompa di sejumlah daerah.

“Kementerian Pertanian menyampaikan pada kami (Komisi IV) akan antisipasi menanggapi El Nino se-

hingga ada beberapa langkah diambil salah satunya mengubah beberapa kegiatan anggaran yang penyerapannya tidak optimal dialihkan untuk mengantisipasi kekeringan ini,” kata Edhy Prabowo.

Selain pembelian pompa air untuk daerah rawan kering, lanjut Eddy, Kementerian Pertanian dan Komisi IV juga telah membuat sumur sintesis bagi daerah yang memang sulit akses sungainya atau tidak adanya sumber air.

“Salah satunya solusinya pembuatan sumur sintesis itu jangka pendek. Tentunya dalam jangka panjang nanti kami meminta Kementerian Pertanian berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum karena berhubungan dengan

irigasi dan bendungan air dan Kementerian Kehutanan untuk mulai menanami tidak ada cara lain,” tutur politisi Partai Gerindra itu.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, saat melaporkan kepada Komisi IV terkait dampak kekeringan serta pengaruhnya terhadap capaian produksi pertanian, bahwa BMKG memprediksi bahwa el nino pada tahun ini bersifat moderat dan cenderung menguat yang diperkirakan akan berlangsung hingga bulan November 2015.

“Dampak yang diperkirakan terjadi adalah adanya beberapa daerah endemis kekeringan yang mengalami puso dan mundurnya awal musim hujan 2015-2016,” tuturnya.



Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo

Sampai dengan tanggal 22 Agustus 2015, lahan yang terkena puso seluas 35.202 ha atau sebesar 0,25% dari total luas panen 14.332.049 ha. Daerah-daerah yang terkena dampak kekeringan cukup luas, antara lain Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan.

Data dampak el nino terhadap produksi padi tahun 1977-2015 menunjukkan luas rata-rata areal padi yang terdampak el nino kuat tidak selal lebih luas dibanding dengan areal padi yang terdampak al nono moderat dan lemah. Hal ini terjadi karena pada el nino lemah sering petani terkecoh prakiraan musim tanam, sehingga pertanamannya puso.

Amran menjelaskan dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, kegiatan antisipasi kekeringan yang telah dan sedang dilakukan antara lain memberikan bantuan pompa air sebanyak 21.953 unit sejak bulan November 2014, melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier seluas 1,50 juta ha, membentuk

Brigade penanganan kekeringan, membangun embung, dam-parit, long storage dan sumber air tanah dangkal, serta melaksanakan hujan buatan bekerja sama dengan BNPB, BPPT, dan TNI.

Upaya-upaya antisipasi kekeringan tersebut telah menunjukkan hasilnya, yaitu pada periode Oktober 2014-Juli 2015 luas lahan yang terkena puso 52.918 ha, puso tersebut lebih rendah jika dibandingkan periode yang sama pada Oktober 2013-Juli 2014 yang tidak ada el nino namun luas lahan yang terkena puso seluas 167.625 ha. Apabila kondisi puso pada kedua periode tersebut dibandingkan maka lahan yang bisa diselamatkan dari puso seluas 114.707 ha.

Selain karena adanya upaya antisipasi dampak kekeringan, pengaruh el nino secara umum mengancam pada areal luas panen padi periode September-Oktober 2015 seluas 2,1 juta ha atau 15,11% dari luas panen padi 2015 seluas 14.332.049 ha. Luas

panen 10.931.346 ha (76,37%) dan telah menghasilkan produksi padi seluas 58,46 juta ton GKG.

Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan ketersediaan beras, serta kehilangan produksi akibat dampak kekeringan maka diperkirakan pada tahun 2015 ini masih akan surplus. Hal ini juga didukung dengan adanya penambahan luas tanam pada Oktober 2014-Agustus 2015 seluas 494.397 ha. Apabila dikurangi dengan luas tanaman yang terkena puso, maka masih terdapat luas areal tambah tanam seluas 441.479 ha.

“Kementerian Pertanian sejak awal sudah mengantisipasi kekeringan ini dengan melakukan berbagai kegiatan Program Upaya Khusus. Namun kami menyadari bahwa yang harus kita jaga adalah masalah gejolak harga beras. Untuk itu, kami bersama instansi terkait berupaya mencegah terjadinya gangguan para spekulasi beras,” paparnya. (as)

Foto: Rizka, Ist/Parle/IW



Mentan memberikan bantuan pompa air kepada petani



Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan

FUNDAMENTAL EKONOMI INDONESIA JAUH LEBIH KUAT

Nilai tukar rupiah sudah menyentuh angka lebih dari Rp 14.000 per dolar Amerika Serikat. Padahal, di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara – Perubahan (APBN-P) 2015, ditetapkan sebesar Rp 12.500 per dolar AS. Sementara, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, diusulkan sebesar Rp 13.400 per dolar AS.

Untuk mendalami hal ini, Parlementaria berkesempatan mewawancarai Wakil Ketua Komisi XI DPR Marwan Cik Asan (F-PD, Dapil Lampung), di ruang kerjanya, beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan ini juga dibahas kondisi ekonomi terkini Indonesia yang dinilai juga melambat. Berikut petikan wawancaranya:

Apa penyebab nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar AS?

Selain faktor kondisi perekonomian global terutama ketidakpastian tentang The Fed (Bank Sentral Amerika) yang akan menaikkan harga. Ini kan menimbulkan ketidakpastian, sehingga orang-orang memprediksi, seolah-olah memiliki aset dolar AS itu akan lebih aman, karena akan ada kenaikan bunga di The Fed.

Berikutnya, tentu dengan membaiknya ekonomi Amerika, para investor ingin berinvestasi disana dengan menggunakan dolar AS. Makanya orang sering mengistilahkan dengan dolar pulang kampung. Inilah dampak global yang terjadi di seluruh mata uang di dunia.

Yang ketiga, terkait faktor internal kita sendiri. Sering dikatakan oleh Bank Indonesia ataupun orang-orang yang berkompeten di bidang valas, nilai tukar kita sudah *undervalue*, atau sudah di bawah yang seharusnya tidak terjadi. Kita bisa memahami seperti dolar AS pulang kampung, ekonomi Amerika membaik, The Fed akan menaikkan suku bunga, Yuan devaluasi, otomatis semua mata uang dunia akan melemah, tetapi tidak *undervalue*.

Seharusnya kisaran nilai tukar rupiah kita kan masih pada angka Rp 13.000-an, seperti yang kita bahas di RAPBN 2016. Tapi kenyataan sekarang kan sudah Rp14.100 lebih.

Jadi, tambahan sekitar Rp600 s/d Rp1.000 itu karena ketidakpercayaan pasar terhadap kondisi nasional.



Kalau kita bandingkan dengan kondisi makro ekonomi tahun 1998 atau tahun 2008, fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat. Kita punya cadangan devisa, sekitar 108 juta dolar AS, dibanding dulu tidak sampai 20 juta dolar AS.

Apakah hal ini mirip Krisis 1998?

Kalau kita bandingkan dengan kondisi makro ekonomi tahun 1998 atau tahun 2008, fundamental ekonomi kita jauh lebih kuat. Kita punya cadangan devisa, sekitar 108 juta dolar AS, dibanding dulu tidak sampai 20 juta dolar AS. Perbankan kita relatif sehat, ekonomi kita masih terus bergerak, dan inflasi kita tidak terlalu tinggi, secara makro ekonomi, kita cukup baik. Artinya tanda-tanda kita mengalami krisis masih cukup jauh, tapi itu tadi kegamangan pasar akan kondisi ketidakjelasan kebijakan yang diambil oleh para *stakeholder* itu tadi yang membuat *undervalue*.

Kita masih punya keyakinan bahwa kondisi ini jauh lebih baik dari tahun 1998 maupun tahun 2008. Tetapi kita tidak boleh lengah dan

menganggap enteng, harus tetap waspada. Persoalan *undervalue* ini kan adanya ketidakpercayaan pasar terhadap para pengambil kebijakan, nah jangan sampai membuat mereka semakin tidak yakin. Karena dampaknya, akan membuat fundamental ekonomi kita jebol.

BI Rate perlu diturunkan?

Saya pikir kita harus hati-hati, jangan sampai misalnya BI Rate kita turunkan, tapi ekonomi tidak terlalu menggeliat, sudah pasti dolar AS akan tambah pergi. Orang-orang pada prinsipnya investasi uang ini mendapat hasil. Kalau BI Rate kita turunkan, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) kita turunkan, belum tentu ekonomi kita langsung bisa tumbuh. Di sisi lain *capital flow* pergi. Tingginya suku bunga BI ini salah satu yang hari ini bisa membantu menahan kabur atau pulangnya semua dolar AS.

Harapan kita menurunkan SBI supaya ekonominya tumbuh, padahal orang-orang juga bisa pinjam uang atau sebagainya, malah ekonomi tidak tumbuh, dolar AS tambah kabur atau malah kurs kita tambah tinggi. Kebijakan ini betul-betul harus di pertimbangkan dengan matang. Kebijakan BI saat ini untuk mempertahankan pada level 7,5 persen itu sudah tepat sampai saat ini.

Apa yang perlu dilakukan Pemerintah dalam waktu dekat?

Pemerintah harus mendorong daya beli masyarakat. Dengan daya beli ini meningkat, kan konsumsi terhadap produk meningkat. Pabrik-pabrik dapat menjalankan produksinya lagi, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bisa dihindari. Lalu, bagaimana cara pemerintah meningkatkan daya beli, ya dengan mempercepat penyerapan APBN dipercepat. Kemudian beri kemudahan supaya produsen bisa ekspor. Memang dari sisi komo-

ditas kita lagi loyo, tapi kita punya potensi untuk ekspor, seperti rotan, dan lain-lain.

Agar serapan anggaran semakin optimal, para Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tak perlu khawatir untuk mempercepat, sepanjang itu tidak melanggar aturan. Kita butuh percepatan penyerapan anggaran. Kalau itu tidak bisa dilakukan, daya beli masyarakat makin tergerus, imbasnya ekonomi semakin tidak tumbuh.

Sikap Komisi XI kepada Pemerintah?

Menyikapi hal ini, kami di Komisi XI dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan, BI, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, terus-menerus melakukan evaluasi. Kita akan merencanakan dalam waktu dekat ini ingin mengadakan pertemuan khusus bersama Menteri Keuangan, OJK, BI, periset, dan beberapa tokoh ekonomi keuangan, untuk membahas hal ini.

Kapan rupiah akan terus melemah?

Kalau menurut saya, sampai The Fed punya waktu yang jelas. Kalau The Fed sudah mengambil keputusan, berarti spekulasi sudah hilang. Orang-orang kan sampai sekarang masih harap-harap cemas. Kita juga berharap perekonomian Tiongkok segera pulih, sehingga transaksi kita dengan Tiongkok juga segera pulih. (sf) Foto: Jaka/Parle/IW

NILAI RUPIAH TAK STABIL JADI CIRI INDONESIA

Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menegaskan, pelemahan nilai tukar rupiah merupakan cerminan dari pondasi ekonomi Indonesia yang tidak kuat. Bahkan nilai tukar yang tak stabil ini sudah menjadi ciri dari Indonesia. Bahkan ia menyebutkan, kurs rupiah yang berada di angka Rp 14.000 per dolar AS, sudah berada di kondisi yang nyaman.

“Sepertinya (nilai tukar rupiah) di Rp 14.000 ini rupiah sudah nyaman. Apakah ini sudah jaminan? Kembalikan saja ke sistem perekonomian kita. Pertanyaannya, siapa yang paling bertanggung jawab menjaga stabilitas rupiah bertengger di angka Rp 14.000 ini,” kata Misbakhun seolah bertanya, dalam acara Dialektika Demokrasi, “Dolar Tekuk Rupiah”, di pressroom DPR, beberapa waktu lalu.

Politikus F-PG ini mengatakan, kesepakatan nilai tukar rupiah antara DPR bersama Pemerintah dalam RAPBN 2015 sebesar Rp 12.500 dan RAPBN 2016 yang diusulkan sebesar Rp 13.400 per dolar AS, dinilai sulit untuk direalisasikan.



Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun pada acara Dialektika Demokrasi

“Kesejahteraan ini sulit untuk direalisasikan karena Bank Indonesia sebagai satu-satunya institusi pengawas valuta asing terkesan tidak menjalankan tugas secara baik. Bank Indonesia hanya mengeluarkan pernyataan selalu hadir di pasar. Tapi kehadiran BI di pasar ternyata untuk membuat rupiah stabil di angka Rp 14.000,” analisisnya.

Di satu sisi, lanjut Misbakhun, walaupun nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing dikatakan babak belur, namun BI masih tetap mendapat keuntungan. Ia menaksir, setidaknya sepanjang 2014, BI membukukan keuntungan

sebesar Rp50 triliun. Keuntungan itu diperoleh karena posisi BI sebagai satu-satunya lembaga negara yang menjabarkan valuta asing di Indonesia.

“Sekarang, bagaimana kita dorong BI sebagai lembaga penjabaran valas memberikan keuntungan untuk bangsa dan negara ini. Dalam konteks itu, kalangan DPR sedang merencanakan BI untuk diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” tegas Misbakhun.

Politikus asal dapil Jawa Timur itu menjelaskan, DPR mendesak agar kebijakan moneter BI perlu diaudit oleh BPK. Dengan audit tersebut,


maka kebijakan moneter BI bisa dipertanggungjawabkan dan akuntabel. Selama ini BI tidak bisa diaudit karena alasan independensi BI, yang dilandasi payung hukum, UU BI.

“BI inikan seolah negara dalam negara, selalu beralasan independen dan tak mau diintervensi. Apakah benar BI ini telah menjalankan tata kelola valas secara benar. Kenapa BI hanya menjalankan dua cara untuk penjabarkan mata uang asing yakni intervensi pasar dan BI rate untuk mengamankan rupiah,” kata Misbakhun, seakan bertanya.

(sf) Foto: Andri/Parle/IW



**KETUA DPR SETYA NOVANTO:
APBN 2016 MENJADI STABILITATOR
PEREKONOMIAN**



Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat menjadi fungsi stabilisasi agar pemerintah dapat menstabilkan perekonomian serta mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Jumat, 14 Agustus 2015, menjadi agenda Presiden Joko Widodo menyampaikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 beserta Nota Keuangannya di depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Namun, sebelum Presiden membacakan pidatonya, RAPBN 2016 sudah mendapat sorotan dari DPR RI.

Ketua DPR RI Setya Novanto menegaskan, DPR berharap APBN 2016 dapat menjadi fungsi stabilisasi perekonomian Indonesia. Hal itu ia sampaikan saat membacakan Pidato Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2015-2016, dalam Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara.

“Hal itu dapat dilakukan dengan menjaga pasokan dan kestabilan harga pangan dan kebutuhan pokok serta mendorong Usaha Mikro Kecil Menengah, dengan berbagai kebijakan baru agar mampu berperan dalam perekonomian nasional bukan saja sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dalam penyerapan tenaga kerja,” jelas Novanto.

Politikus Fraksi Partai Golkar ini

menambahkan, sifat dari pembiayaan pembangunan yang semakin terdesentralisasi itu harus terus didorong. Sehingga akan mempercepat proses pemerataan pembangunan. Agar pembangunan semakin merata, DPR terus mendukung penambahan alokasi Dana Desa.

“DPR mengingatkan agar Pemerintah benar-benar mengawasi dan menjaga realisasinya agar tujuan dana desa untuk kemajuan dan kemakmuran bagi masyarakat desa serta mengurangi kesenjangan antara desa dan kota dapat tercapai,” imbuh Novanto.

Sementara terkait kebijakan APBN khususnya dalam pelaksanaan program subsidi, tambah Novanto, DPR menghimbau agar dilaksanakan revalidasi data, dengan data yang akurat kebijakan dan tujuan APBN dapat tercapai dan program subsidi akan tepat sasaran.

Dalam kesempatan ini, Novanto juga menyoroti penyerapan anggaran pemerintah pusat khususnya belanja Kementerian/Lembaga. Sebagaimana diketahui, penyerapan anggaran Pemerintah pada Semester I Tahun 2015 lebih rendah daripada tahun sebelumnya pada posisi yang sama yaitu baru sebesar Rp 208,5 triliun atau 26,2 persen.

“DPR mendorong agar Kementerian/Lembaga segera menyelesaikan dokumen anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) termasuk perubahan nomenklatur Kementerian/Lembaga serta segera merealisasikan proyek-proyek infrastruktur sehingga penyerapan di Semester II Tahun 2015 akan semakin meningkat dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi,” harap politikus asal daerah pemilihan NTT itu.

Novanto memastikan, RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hanya dapat diajukan oleh Presiden.

“Hal inilah yang menjadi dasar dari munculnya konvensi ketatanegaraan Pidato Presiden tentang Penyampaian atas RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Nota Keuangan pada setiap bulan Agustus,” tutup Novanto.

Rangkaian pembahasan RAPBN 2016 dilanjutkan dengan tanggapan seluruh fraksi DPR RI pada 20 Agustus 2015, dan jawaban Pemerintah atas tanggapan Fraksi DPR pada 25 Agustus 2015. Setelah itu, RAPBN 2016 akan mulai dibahas oleh DPR dengan Pemerintah. (sf) Foto: Andri/Parle/IW



RAPBN 2016 DIHARAPKAN TINGKATKAN KEPERCAYAAN PASAR

Asumsi dasar ekonomi makro yang ditetapkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2016 diharapkan dapat mencerminkan kondisi perekonomian yang lebih realistis sehingga akan mendorong tingkat kepercayaan pasar yang lebih tinggi.

Demikian ditegaskan Presiden Joko Widodo saat membacakan Pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2016 Beserta Nota Keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR, di Gedung Nusantara, Jumat (14/08/15) lalu.

“RAPBN tahun 2016 disusun berdasarkan pokok-pokok kebijakan fiskal yang mengacu pada tema ‘Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkuat fundamental

pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas’. Penguatan pengelolaan fiskal diarahkan melalui sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan,” jelas Presiden.

Asumsi ekonomi makro tahun 2016, jelas Presiden, meliputi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang ditargetkan sebesar 5,5 persen. Menurut Presiden, kondisi ekonomi global diproyeksikan membaik sehingga kinerja ekspor-impor serta permintaan global atas produk-produk Indonesia juga meningkat. Pembangunan infrastruktur juga akan mendorong kinerja Pembentukan Modal Tetap Bruto dan konsumsi nasional.

“Peningkatan konektivitas nasional dan realokasi belanja ke sektor-sektor produktif diharapkan mampu

menggerakkan perekonomian nasional, menjaga daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi,” imbuah Presiden.

Laju inflasi tahun 2016 diperkirakan mencapai 4,7 persen. Besaran ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti perkembangan harga komoditas pangan dan energi dunia, pergerakan nilai tukar rupiah, serta perubahan iklim. Untuk itu, janji Presiden, Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan menggerakkan pemerintah daerah dalam rangka pengendalian inflasi nasional.

“Berikutnya, nilai tukar rupiah diperkirakan sebesar Rp 13.400 per dolar Amerika Serikat. Perbaikan performa perekonomian global yang dimotori oleh Amerika Serikat dan

perlambatan perekonomian Tiongkok, depresiasi yuan serta pemulihan ekonomi Uni Eropa dan Jepang, diperkirakan akan berpengaruh pada nilai tukar rupiah tahun mendatang,” kata Presiden.

Asumsi berikutnya, rata-rata suku bunga Surat Perbendaharaan Negara 3 bulan diasumsikan berada pada tingkat 5,5 persen. Rata-rata harga minyak mentah Indonesia diperkirakan sebesar 60 dolar Amerika Serikat per barel.

“Kapasitas produksi minyak dan gas bumi selama tahun 2016 diperkirakan mencapai 1,985 juta barel setara minyak per hari, yang terdiri dari produksi minyak bumi sebesar 830 ribu barel per hari dan gas bumi sekitar 1,155 juta barel setara minyak per hari,” menurut Presiden.

Dari sisi pendapatan negara, tambah Presiden, pemberian insentif fiskal ditujukan untuk kegiatan ekonomi strategis guna mendukung iklim investasi dan dunia usaha. Kebijakan perpajakan yang akan dilakukan Pemerintah adalah optimalisasi penerimaan perpajakan tanpa mengganggu iklim investasi dunia usaha.

“Di samping itu, kebijakan perpajakan juga diarahkan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi nasional dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat, serta meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional,” kata Presiden.

Tata Ulang Penyaluran Subsidi

Presiden menjelaskan, dalam RAPBN 2016, subsidi dianggarkan sebesar Rp 201,4 triliun. Subsidi dialokasikan untuk subsidi energi sebesar Rp 121,0 triliun, dan subsidi energi sebesar Rp 80,4 triliun. Presiden menegaskan, Pemerintah akan menata ulang kebijakan subsidi, dengan menyusun sistem seleksi penerima yang tepat sasaran.

“Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah akan menggunakan basis data yang transparan, dan akan menata ulang sistem penyaluran subsidi yang lebih akuntabel. Dengan begitu, anggaran subsidi diharapkan dapat dialihkan untuk belanja yang lebih produktif, sehingga efisiensi dan kualitas belanja negara dapat ditingkatkan guna mempercepat perwujudan Nawacita,” jelas Presiden.

Kemudian, lanjut Presiden, dalam upaya mendukung pelaksanaan kebijakan belanja negara, pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun. Anggaran tersebut lebih besar dari alokasi anggaran infrastruktur dalam APBN-P tahun 2015.

“Alokasi ini akan digunakan antara lain untuk pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara, termasuk bandara perintis agar konektivitas dan pemerataan antarwilayah menjadi lebih baik,” kata Presiden.

Defisit Rp 273,2 Triliun

Masih dalam kesempatan yang sama, Presiden juga menjelaskan, dalam RAPBN 2016, pendapatan negara ditargetkan sebesar Rp 1.848,1 triliun. Dari jumlah tersebut, penerimaan perpajakan direncanakan sebesar Rp 1.565,8 triliun, naik 5,1 persen dari target APBNP tahun 2015. Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto tahun 2016 mencapai 13,25 persen.

“Di sisi lain, Pemerintah juga terus mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Penerimaan Sumber Daya Alam, terutama migas, diperkirakan akan mendominasi PNBP, meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak,” imbuh Presiden.

Presiden melanjutkan, dalam RAPBN 2016, belanja negara dialokasikan sebesar Rp 2.121,3 triliun. Alokasi RAPBN 2016 tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.339,1 triliun dan transfer daerah Rp 558,7 triliun. Untuk belanja pemerintah pusat terdiri dari belanja kementerian/lembaga Rp 780,4 triliun dan belanja non kementerian/lembaga Rp 558,7 triliun.

Dengan demikian, masih kata Presiden, defisit anggaran dalam RAPBN 2016 adalah sebesar Rp 273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto. Defisit RAPBN 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp 272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp 1,2 triliun.

“ Defisit anggaran dalam RAPBN 2016 adalah sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1 persen terhadap Produk Domestik Bruto. ”

“Sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur, Pemerintah memerlukan kebijakan fiskal yang ekspansif, sehingga berdampak pada terjadinya defisit anggaran. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan fiskal, defisit anggaran tersebut akan ditutup oleh sumber-sumber pembiayaan dari dalam dan luar negeri,” kata Presiden.

Presiden memastikan, sumber pembiayaan luar negeri dipilih secara selektif, sehingga bersifat tidak mengikat dan dengan biaya yang rendah. (sf) Foto: Iwan Armanias/Parle/IW

PANDANGAN UMUM FRAKSI

TENTANG RANCANGAN UNDANG –UNDANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2016 BESERTA NOTA KEUANGANNYA

FRAKSI PARTAI PDI PERJUANGAN

Juru Bicara: Sirmadji Tjondro Pragolo

Keputusan alokasi anggaran negara yang akan dibahas antara DPR dengan Pemerintah, bukan semata-mata menyusun sebuah postur anggaran. Anggaran yang akan diputuskan merupakan sebuah keputusan arah politik yang berpijak pada kesadaran geopolitik Indonesia dalam kesemestaan dunia.

“Terkait pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2016 sebesar 5,5 persen, Pemerintah patut untuk melakukan kinerja yang lebih nyata dan berupaya keras, yang harus difokuskan pada alokasi anggaran untuk program-program yang lebih berpihak pada sektor yang mampu menggerakkan roda perekonomian” kata Sirmadji.

Sirmadji menambahkan, perkiraan target inflasi pada titik 4,7 persen juga



harus dicapai. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan dan pengawasan ketat terhadap pengendali dan harga pangan. Terkait nilai tukar mata uang, F-PDI Perjuangan menilai ada “perang mata uang” (currency war) antara Tiongkok dan Amerika. Pemerintah diminta menunjukkan sikap serius dengan melakukan koordinasi yang baik antara Pemerintah dan Bank Indonesia.

“Terkait *lifting* minyak yang ditetapkan sebesar 830 ribu barel per hari dan *lifting* gas sebesar 1,15 juta barel setara minyak per hari, Pemerintah diminta untuk terus berupaya dalam meningkatkan

lifting minyak meningkat dan mendorong peningkatan kemampuan produksi gas bumi,” tegas anggota Komisi II itu.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara sebesar Rp 1.848 triliun, dengan mengandalkan penerimaan pajak sebesar Rp 1.565,8 triliun, F-PDI Perjuangan menilai target itu akan sulit dicapai. Pasalnya, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2015 tidak mencapai target antara Rp 120-200 triliun.

“Rendahnya realisasi penerimaan pajak harus disikapi dengan cermat oleh Pemerintah, karena pajak merupakan sumber utama dari penerimaan negara, sekaligus merupakan instrumen pendistribusian keadilan dari yang mampu kepada mereka yang kurang beruntung,” tegas politikus asal dapil Jawa Timur itu.

Dalam kesempatan itu, F-PDI Perjuangan juga mengapresiasi kinerja pemerintah dalam belanja negara, anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, hingga Program Indonesia Pintar.

FRAKSI PARTAI GOLKAR

Juru Bicara: Ridwan Bae

Fraksi Partai Golkar memberikan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi yang diusulkan sebesar 5,5 persen pada tahun 2016 masih dapat ditingkatkan hingga kisaran 5,6 persen. Pencapaian pertumbuhan juga harus dibarengi dengan akselerasi transformasi struktural dalam perekonomian nasional.

“Dan yang pasti, F-PG akan mengawal proses pencapaian pertumbuhan tersebut agar senantiasa mengedepankan dimensi keberlanjutan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia,” jelas Ridwan.

Inflasi yang diperkirakan sebesar 4,7 persen, lanjut Ridwan, diharapkan mampu dicapai dalam rangka menjaga tingkat konsumsi dan tabungan masyarakat. Terkait nilai tukar rupiah, F-PG berharap Pemerintah terus meningkatkan kerja sama dengan Bank Indonesia dalam upaya menjaga stabilitas rupiah yang sedang

mencari titik keseimbangan baru.

“Terkait penerimaan pajak, F-PG mendesak Pemerintah untuk segera mempersiapkan skenario alternatif terbaik untuk menyelamatkan RAPBN 2016, apabila target penerimaan pajak tidak tercapai di tahun 2016,” pesan Anggota Komisi V itu.

Belajar dari kenyataan penyerapan anggaran belanja Kementerian atau Lembaga pada semester I tahun 2015 yang masih sangat rendah, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar K/L belum memiliki kinerja yang baik.

“Penyaluran subsidi juga perlu ditata kembali dan dialokasikan secara tepat sasaran agar betul-betul dinikmati masyarakat yang membutuhkan, tidak membebani keuangan negara serta tidak mencederai rasa keadilan masyarakat,” saran Ridwan.

Terkait defisit anggaran yang diusulkan sebesar Rp 273 triliun atau 2,1 persen dari GDP, F-PG mengingatkan kehati-ha-



tian Pemerintah dalam pengelolaan defisit anggaran agar tetap dibawah batasan yang ditetapkan sebesar 3 persen.

“F-PG meminta ketegasan Pemerintah agar berupaya dalam penyelesaian segala bentuk jenis piutang terutama telah jatuh tempo,” ingat politikus asal dapil Sulawesi Tenggara itu.

Walaupun memberikan beberapa catatan terkait usulan RAPBN 2016, F-PG menyetujui RAPBN 2016 beserta Nota Keuangannya untuk dibahas lebih lanjut menjadi UU.

FRAKSI PARTAI GERINDRA

Juru Bicara: Rachel Maryam Sayidina



Fraksi Partai Gerindra menilai masih belum adanya perubahan fundamental terhadap RAPBN 2016 dibandingkan APBN Perubahan 2015. Selama 50 persen postur APBN 2016, hanya untuk anggaran rutin, maka sulit kiranya untuk bisa mewujudkan keadilan ekonomi dalam konteks pluralisme.

“Oleh karena itu, penting untuk melakukan perubahan atas postur APBN agar sesuai dengan amanat UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 23, bahwa APBN ditetapkan dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” jelas Rachel.

Rachel menambahkan, target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen memberikan cerminan upaya Pemerintah untuk sungguh-sungguh bekerja dalam menggerakkan ekonomi. Target inflasi sebesar 4,7 persen juga belum memunculkan aspek penting yaitu dampak inflasi yang dirasakan oleh sebagian besar lapisan masyarakat Indonesia.

“Terkait nilai tukar rupiah, Pemerintah harus menjelaskan secara *gambling* dampak setiap pelemahan sebesar Rp 100 per dolar AS, terhadap tambahan beban total utang dan beban pembayaran dalam APBN. Produksi minyak 850 ribu barel per hari juga tidak menggambarkan adanya peningkatan dibanding peme-

rintahan sebelumnya. Tidak ada upaya Pemerintah untuk meningkatkan *lifting* minyak dan mengurangi ketergantungan impor,” papar Anggota Komisi I itu.

Sementara di satu sisi, F-Partai Gerindra mengapresiasi kebijakan Pemerintah yang akan mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun. Apresiasi juga diberikan karena Pemerintah telah meningkatkan jumlah dana transfer ke daerah, khususnya terkait dengan dana desa. Namun sangat disayangkan, dana tersebut difokuskan pada alokasi khusus di Kementerian, sehingga masih terpusat.

“F-Partai Gerindra memandang kebijakan Pemerintah dalam RAPBN 2016 belum dilandasi agenda yang terencana untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional. Pemerintah juga belum memiliki agenda untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan energi,” imbuh politikus asal dapil Jawa Barat itu.

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Juru Bicara: Verna Gladies Merry Inkiriwang

Fraksi Partai Demokrat memahami adanya kebutuhan masyarakat terkait pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, kelautan, dan ekonomi kerakyatan. Untuk itu, F-PD meminta Pemerintah untuk terus memberikan dan meningkatkan program-program pro rakyat yang pernah dilakukan nomenklaturnya berbeda.

“Program tersebut seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa untuk siswa miskin tingkat pendidikan dasar, menengah dan tinggi, Jamkesmas, BPJS, Raskin, Bantuan Keluarga Harapan, dan lain-lain,” jelas Verna.

Terkait pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5 persen pada 2016, cukup realistis dan bisa dicapai jika pemerintahan secara serius dan sungguh-sungguh menjalankan kebijakan dan program-program pembangunan secara konstruktif, kreatif, inovatif dan memperbaiki komunikasi.

“F-PD menyoroti adanya ketidakstabilan nilai tukar rupiah terhadap mata uang



internasional. F-PD meminta Pemerintah secara cepat dan serius untuk tidak membiarkan terjadinya fluktuasi yang tinggi terhadap nilai tukar rupiah dengan membuat kebijakan efektif untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah,” papar Anggota Komisi IX DPR itu.

Pemerintah juga diminta untuk bekerja keras dalam menjaga dan menekan laju inflasi yang ditetapkan sebesar 4,7 persen pada 2016. Realisasi penyerapan anggaran juga diingatkan untuk dapat dioptimalkan. Pemerintah juga diharapkan cermat dalam mengurangi ketergantun-

gan terhadap minyak mentah dunia ditengah fluktuasi harga pada saat ini.

“Pemerintah diminta memperhatikan konektivitas ekonomi nasional dan konektivitas ekonomi internasional Indonesia yang menghubungkan integrasi Indonesia dengan pusat perekonomian regional dan

global dalam rangka meningkatkan daya saing nasional,” tegas politikus asal dapil Sulawesi Tengah itu.

F-PD juga meminta Pemerintah untuk terus melakukan peningkatan pelatihan bagi tenaga kerja terlatih dan terampil ke luar negeri. Pasalnya, tantangan ketenagakerjaan saat ini adalah kemampuan Pemerintah dalam menurunkan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dibawah 5 persen, menghindari terjadinya PHK dan memberikan perlindungan hukum bagi pekerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

**FRAKSI PARTAI
KEBANGKITAN BANGSA**
Juru Bicara; Syaikhul Islam Ali



F-PKB memprediksi bahwa perkembangan perekonomian nasional pada tahun 2016 akan semakin stabil bisa dibandingkan tahun 2015, meski belum begitu kondusif dan dibayangi tekanan global. Dengan membaiknya trend kondisi ekonomi global dan domestik di tahun mendatang, maka target kebijakan fiskal diharapkan tidak hanya terpaku pada capaian kuantitatif pertumbuhan ekono-

mi, namun juga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara riil.

“Penetapan asumsi makro sebesar 5,5 persen, Pemerintah cukup optimis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengingat realisasi pertumbuhan ekonomi pada 2015 maksimal hanya 5 persen. Perlu adanya sinergitas kebijakan antara kebijakan Pemerintah selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia selaku otoritas moneter, untuk menjaga ekspektasi target inflasi 4,7 persen,” jelas Syaikhul.

Pemerintah, BI dan OJK juga diminta *extra effort* untuk mencapai nilai tukar rupiah yang ditetapkan sebesar Rp 13.400 per dolar AS, mengingat saat ini sudah bergerak melebihi Rp 14.000. Tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen juga perlu dijaga, dengan memperhatikan eksesus dari resiko rencana kenaikan suku bunga The Fed.

“Penetapan *lifting* minyak dan *lifting* gas bumi tidak mengalami perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Kami menyangkan sikap Pemerintah yang tidak

cukup optimis dan menetapkan target ini, mengingat potensi dari kedua sumber daya alam tersebut masih sangat besar,” kata Anggota Komisi VII itu.

Terkait pendapatan negara, F-PKB mendorong Pemerintah untuk terus meningkatkan rasio pertumbuhan penerimaan pajak terhadap pertumbuhan PDB (*tax buoyancy*), yang dalam beberapa tahun ini merosot dan meningkatkan *tax ratio* mencapai kisaran 15-17 persen. Pemerintah juga diminta mengoptimalkan penerimaan di bidang kepabeanan dan cukai.

“Secara khusus, F-PKB mengapresiasi keseriusan Pemerintah dalam pemenuhan alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen. Pemerintah juga diminta untuk memaksimalkan tingginya anggaran infrastruktur sebesar Rp 313,5 triliun, sehingga target pembangunan infrastruktur Pemerintah dapat memiliki *multiplier effect* yang besar bagi perekonomian nasional,” kata politikus asal dapil Jawa Timur itu.

**FRAKSI PARTAI
KEADILAN SEJAHTERA**
Juru Bicara: Abdul Fikri

F-PKS menilai, kondisi perekonomian nasional saat ini cukup mengkhawatirkan seiring perlambatan pertumbuhan ekonomi, tergerusnya daya beli masyarakat, dan potensi semakin meningkatnya angka pengangguran akibat terpuruknya dunia usaha. Selain itu, Indonesia juga menghadapi tekanan pelemahan rupiah yang sudah menyentuh lebih dari Rp 13.800 per dolar AS.

“Yang lebih mengkhawatirkan lagi, kualitas pertumbuhan itu sendiri, khususnya dalam hal kualitas daya saing. Sebagai negara terbesar di ASEAN, kita tertinggal cukup jauh dibanding beberapa negara sekawasan. Tanpa daya saing yang kuat, kita hanya akan menjadi pasar raksasa yang tidak berdaulat,” jelas Fikri.

Terkait target pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, F-PKS menilai target ini akan sulit dicapai. F-PKS memandang bahwa potensi nasional sesungguhnya memungkinkan untuk dapat tumbuh lebih tinggi

dan berkualitas. Sayangnya, Pemerintah belum memberikan arah yang jelas terkait dengan transformasi struktural perekonomian.

“Asumsi nilai tukar rupiah dalam RAPBN 2016 sebesar Rp 13.400 per dolar juga tidak mencerminkan keadaan saat ini, dimana posisi Rupiah terus melemah. Hal ini harus dicermati secara sungguh-sungguh oleh Pemerintah, karena pelemahan yang semakin dalam akan berbahaya bagi sektor keuangan dan berdampak buruk bagi sektor riil,” papar Anggota Komisi VIII itu.

F-PKS juga menyarankan agar pendapatan negara dari sektor perpajakan untuk dikaji ulang, karena selalu tidak tercapai. Peningkatan alokasi belanja infrastruktur sebesar Rp 313 triliun juga harus diikuti dengan kemampuan eksekusi yang baik.

“F-PKS menyambut baik terkait de-



ngan alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 106 triliun, atau 5 persen dari belanja negara. Alokasi ini telah memenuhi amanat UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Kami mendorong Pemerintah untuk segera membenahi layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang masih buruk, serta memenuhi kekurangan infrastruktur layanan kesehatan secara luas,” imbuh politikus asal dapil Jawa Tengah itu.

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Juru Bicara: Laila Istiana

Perekonomian domestik pada tahun 2016 diperkirakan masih lambat dibandingkan beberapa tahun lalu. Untuk itu, F-PAN meminta Pemerintah untuk menjaga perekonomian domestik dengan memanfaatkan gejolak perekonomian dunia, khususnya melalui peluang peningkatan ekspor dengan perbaikan di sektor *dwelling time*. Pemerintah tidak hanya mengejar proyek 'ambisius', namun juga memperhatikan kebutuhan ekonomi masyarakat bawah.

"Dengan situasi tersebut, kami mengharapkan melalui RAPBN 2016, Pemerintah untuk lebih cermat dalam pengambilan kebijakan. Meski beberapa kebijakan dianggap 'ambisius', tetapi Pemerintah tetap harus menjaga momentum secara tepat agar tidak menjadi kontraproduktif bagi perekonomian nasional," tegas Laila.

Terkait pertumbuhan ekonomi sebe-



sar 5,5 persen, FPAN menganggap target tersebut masih sangat ambisius, mengingat capaian pertumbuhan ekonomi di tahun 2015 tidak mencapai 5 persen. Potensi inflasi di atas 5 persen juga masih dapat terjadi sepanjang tahun 2016, yang berasal dari faktor *administred price*, faktor musiman, dan iklim.

"Mengantisipasi pelemahan nilai tukar rupiah, F-PAN mendorong Pemerintah untuk segera memperbaiki kinerja ekspor dan pengurangan impor barang modal

agar terjadi pengurangan defisit transaksi berjalan hingga 2,5 persen. F-PAN juga meminta Pemerintah dapat menekan laju inflasi serendah-rendahnya hingga di bawah 4,5 persen dengan mengoptimalkan peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID)," imbuh Anggota Komisi X itu.

Untuk *lifting* minyak dan gas bumi, Pemerintah diminta untuk terus mengawasi produksi minyak di beberapa lokasi, khususnya Blok Cepu. Selain itu, dengan semakin tidak seimbang produksi minyak dalam negeri serta konsumsi minyak yang jauh lebih tinggi, maka F-PAN mendesak Pemerintah secara serius melaksanakan energi alternatif.

"F-PAN melihat, Pemerintah akan sulit untuk mencapai target penerimaan dari sektor perpajakan. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan, khususnya perbaikan regulasi perpajakan, penyediaan opsi peningkatan kepatuhan wajib pajak, hingga penegakan hukum perpajakan," tegas politikus asal dapil Jawa Tengah itu.

FRAKSI PPP

F-PPP menilai, asumsi makro dalam RAPBN 2016 yang diusulkan Pemerintah, memberikan gambaran bahwa perekonomian saat ini sedang dalam kondisi konsolidasi yang cenderung melambat, karena proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi tahun lalu.

Problem ekonomi yang dihadapi rakyat dan bangsa Indonesia sangat membutuhkan kerja keras dan prestasi tinggi untuk bangkit dari krisis dan mewujudkan perekonomian yang semakin maju di masa mendatang. Tanda-tanda menuju krisis bisa dilihat dari target pertumbuhan yang kian menurun.

Indonesia membutuhkan laju pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi pada tahun depan, untuk mengatasi penumpukan kemiskinan dan pengangguran pada tahun ini. Jika gagal terwujud, maka kredibilitas Pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah akan semakin jatuh.

F-PPP menilai, sesungguhnya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang



lebih tinggi minimal 5,5 persen, bukanlah sesuatu yang mustahil jika Pemerintah serius dalam mengupayakan peningkatan investasi atau pembentukan modal tetap bruto Pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi tekanan rupiah yang kian melemah, F-PPP sangat prihatin, dan meminta penjelasan Pemerintah terhadap strategi untuk menghadapi tekanan pelemahan rupiah, maupun kemampuan fiskal Pemerintah terutama terhadap beban utang dan beban impor BBM yang kian meningkat, sementara di sisi lain, penerimaan dari sumber migas justru menurun.

Meski defisit cukup lebar, namun tidak terdapat peluang bagi Pemerintah untuk mendorong ekspansi ekonomi, karena Pemerintah tidak memiliki strategi untuk mengembangkan ekonomi yang mampu menghindari tekanan

ekonomi global melalui kemandirian ekonomi.

Terkait alokasi belanja negara, F-PPP meminta Pemerintah harus memiliki instrumen yang tepat dalam membelanjakan anggaran pusat dan daerah, termasuk anggaran Kementerian dan non Kementerian secara efisien dan efektif. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola APBD juga harus terus ditingkatkan.

Pemerintah juga perlu memberikan *reward and punishment* terhadap Kementerian dan Lembaga, maupun Pemerintah Daerah yang gagal menyerap seratus persen anggaran belanjanya, maupun dalam mengelola anggaran.

FRAKSI PARTAI NASDEM

Juru Bicara: Donny Imam Priambodo



F-Nasdem menilai, pertumbuhan ekonomi pada 2016 masih cukup realistis, dan masih menunjukkan optimisme mengingat pertumbuhan ekonomi yang sudah dicapai saat ini. Namun, F-Nasdem mengingatkan, ukuran kualitas pertumbuhan adalah jika Pemerintah mampu memperbaiki angka gini rasio. Karena rasio inilah yang bisa menggambarkan

tingkat kesenjangan ekonomi dalam sebuah negara.

“Tingkat inflasi sebesar 4,7 persen cukup ideal, untuk itu F-Nasdem mendorong Pemerintah dan BI agar bersama-sama menjaga tingkat inflasi yang terkendali di bawah 5 persen. Dan tingkat bunga SPN 3 bulan sebesar 5,5 persen masih sesuai dan cukup moderat, dan diharapkan dapat mendorong pembiayaan pembangunan dan penciptaan iklim investasi,” kata Donny.

Perlambatan ekonomi yang masih terasa hingga kuartal III 2015, diharapkan Pemerintah tidak hanya memandang hal tersebut hanya persoalan ekonomi semata, tetapi juga tanggap terhadap persoalan geopolitik. Pelemahan nilai tukar rupiah dan penurunan daya beli masyarakat karena situasi ekonomi dikhawatirkan akan memperburuk gini rasio.

Pemerintah dan BI juga diminta untuk terus melakukan upaya pengendalian agar stabilitas nilai tukar tetap terjaga. F-Nasdem juga mendorong agar *lifting* mi-nyak dapat dipastikan tercapai.

“Belanja negara agar didorong kearah program-program pembangunan yang produktif dengan orientasi ekspor serta mampu berekspansi mencari pasar baru hingga secara signifikan bisa menumbuhkan cadangan devisa negara,” saran anggota Komisi XI itu.

F-Nasdem juga mendorong agar penyerapan anggaran harus diusahakan terlaksana dengan cepat, tepat, berkualitas, dan akuntabel. Perlu juga dipertimbangkan adanya *reward and punishment* untuk rendahnya serapan anggaran, karena itu menjadi kunci mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Perlu adanya dukungan, aturan-aturan, serta kebijakan inovatif yang mampu mempercepat penyerapan anggaran, tetapi tetap berpedoman pada UU serta perundangan yang berlaku. Sasaran pembangunan pada 2016 harus lebih positif dibanding tahun anggaran 2015. Pemerintah diharapkan menyusun anggaran yang realistis dan memberikan stimulus lebih bagi rakyat miskin,” kata politikus asal dapil Jawa Tengah itu.

FRAKSI PARTAI HANURA

Juru Bicara: Dadang Rusdiana

Melambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini seharusnya menjadi *warning* bagi Pemerintah, karena pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah diambang resesi yang menjurus pada perlambatan total, meskipun tidak sampai pertumbuhan negatif.

“F-Hanura meminta Pemerintah untuk lebih fokus dalam membangun dan mengalokasikan anggaran, untuk menumbuhkan sektor-sektor kerakyatan seperti meningkatkan pembiayaan untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan subsidi untuk pertanian, perikanan serta usaha-usaha yang bisa menyerap lapangan pekerjaan,” jelas Dadang.

Terkait pertumbuhan ekonomi 5,5 persen, akan sulit dicapai jika penyerapan belanja Pemerintah terutama untuk belanja infrastruktur selalu rendah dan pengeluaran untuk konsumsi rumah tang-

ga. Angka inflasi 4,7 persen juga dinilai kurang realistis bila melihat perkembangan inflasi di kuartal I 2015.

“Terkait tingkat bunga SPN 3 bulan yang ditetapkan sebesar 5,5 persen. Angka tersebut masih cukup realistis. Namun, F-Hanura meminta Pemerintah untuk selalu waspada terhadap resiko kenaikan suku bunga The Fed, yang akan berpengaruh terhadap pergerakan suku bunga SPN,” kata Anggota Komisi X itu.

Pemerintah dinilai kurang fokus dan belum optimal dalam meningkatkan penerimaan pajak. Rendahnya penyerapan anggaran negara juga selalu berulang di awal tahun, dan di akhir tahun akan terjadi lonjakan serapan anggaran.

Pemerintah merencanakan anggaran untuk kedaulatan pangan pada tahun 2016 sebesar Rp 126,6 triliun. F-Hanura menilai Pemerintah kurang serius dalam mendorong kedaulatan pangan jika melihat perbandingan anggaran dengan jum-



lah penduduk Indonesia.

“Untuk itu, F-Hanura meminta Pemerintah untuk meningkatkan anggaran dalam mendorong kedaulatan pangan dan menjaga stabilitas harga pangan nasional,” kata politikus asal dapil Jawa Barat itu.

F-Hanura memberikan apresiasi kepada Pemerintah yang telah merencanakan anggaran kesehatan pada 2016 sebesar Rp 106,1 triliun. Besaran anggaran ini sudah sesuai dengan amanat UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan, yang mengamanatkan anggaran 5 persen dari APBN. (sf) Foto: Iwan Armanias, Andri, Denus/Parle/IW



FOKUS PEMERINTAH DALAM RAPBN 2016

Pemerintah setidaknya memiliki lima fokus dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016. Demikian disampaikan Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, di depan Rapat Paripurna DPR, menjawab pandangan umum fraksi DPR, beberapa waktu lalu.

Pertama, meningkatkan anggaran transfer ke daerah secara signifikan, sehingga untuk pertama kalinya dalam APBN, total anggaran transfer ke daerah dan dana desa Rp 782,2 triliun. Lebih besar dari anggaran Kementerian dan Lembaga pemerintah pusat yang sebesar Rp 780,4 triliun.

Kedua, pengalihan belanja yang kurang produktif dan tidak tepat sasaran seperti subsidi listrik ke belanja yang lebih produktif melalui peningkatan belanja infrastruktur, pertanian, perikanan dan pariwisata.

Ketiga, pemenuhan anggaran kesehatan 5% dari APBN yang untuk pertama kalinya diwujudkan di tahun 2016 sebagai komitmen pemerintah sesuai amanah UU.

Keempat, memperkuat dan memperluas program perlindungan sosial ke masyarakat yang kurang mampu, dengan menambah, penerima bantuan tunai bersyarat dari 3,5 juta keluarga sangat miskin menjadi 6 juta keluarga.

Kelima, memperluas program kredit usaha rakyat untuk mendukung kegiatan usaha menengah kecil dan mikro melalui peningkatan anggaran.

Subsidi Bunga

Terkait target pertumbuhan ekonomi dalam RAPBN tahun 2016 sebesar 5,5% berada pada batas bawah rentang pertumbuhan ekonomi, sesuai kesepakatan dalam pembahasan pendahuluan RAPBN yaitu 5,5 sampai 6%.

“Pemerintah akan tetap responsif dalam melihat perekonomian aktual dan akomodatif dalam menampung berbagai masukan dalam proses pembahasan dengan DPR, sehingga dapat merefleksikan kondisi realistik digabung dengan upaya maksimal dari Pemerintah,” jelas Menkeu.

Pemerintah dan BI tidak pernah berdiam diri untuk mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah, seperti yang dihadapi juga oleh mata uang negara lainnya terhadap dolar AS. Menkeu menyatakan, stabilitas nilai tukar rupiah perlu dijaga agar tidak berdampak luas terhadap aspek perekonomian nasional.

“Gejala global yang terjadi 1-2 tahun yang lalu tersebut terkait rencana langkah lanjutan normalisasi kebijakan moneter di AS, yang kemudian diperparah pada beberapa waktu terakhir dengan kebijakan devaluasi Yuan Tiongkok,” tegas Menkeu.

Dalam RAPBN 2016 diperkirakan rata-rata nilai tukar rupiah akan mencapai Rp 13.400 per USD.

“Kondisi aktual yang terjadi saat ini di pasar mata uang nasional dan global, pasti akan diperhitungkan pemerintah, BI dan DPR dalam pembahasan RAPBN 2016. Selain itu, penetapan asumsi akan memperhitungkan langkah-langkah antisipatif dan perbaikan yang telah dan akan dilakukan,” tutur Menkeu.

(sf) Foto: Iwan Armanias/Parle/IW

MENGANTISIPASI KRISIS MELALUI RUU JPSK

Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan.

Dalam kerangka JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab lembaga terkait yakni Kementerian Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain dalam jaring pengaman keuangan.

Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah.

Kerangka JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang JPSK yang pada saat ini masih dalam tahap pembahasan. Dengan demikian, UU JPSK kelak akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebi-

jakan dan peraturan yang ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabilitas sistem keuangan.

Anggota Komisi XI
DPR Mukhamad
Misbakhun

Menurut Anggota Komisi
XI DPR dari Fraksi Partai Gol-

kar Mukhamad Misbakhun, UU JPSK bertujuan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya krisis ekonomi Indonesia seperti 17 tahun silam.

“UU JPSK bertujuan untuk mengantisipasi krisis sehingga dalam penanggulangan krisis itu tidak terjadi lagi seperti kasus *Bailout Bank Century*, pengucuran atau pinjaman dana untuk bank yang terancam bangkrut,” kata Misbakhun.

Menurut Misbakhun, dengan UU JPSK nantinya bakal terjadi konsolidasi dan koordinasi yang baik antara BI, LPS, OJK, dan Menteri Keuangan untuk menentukan dan memastikan terjadinya krisis dan jelas pula bagaimana penanggulangan dari krisis itu.

Dijelaskan Misbakhun, sepuluh fraksi yang ada di DPR mendukung pembahasan RUU JPSK. Jika dulu ada yang menolak, itu karena masih ada hak imunitas bagi pembuat kebijakan *baillout*, yaitu dapat perlindungan hukum, tak bisa dipidana karena kebijakannya.

“Itu kan bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar penegakan hukum, di mana semua orang bisa dipidana jika yang bersangkutan terbukti melanggar hukum,” tegasnya.

Dalam RUU JPSK yang masih dibahas DPR bersama pemerintah, ada kategori krisis itu seperti apa, siapa yang akan meniupkan-mengumumkan alarm pertama bahwa negara ini sedang terjadi krisis, otoritas jasa keuangan itu bukan saja BI, tapi juga Menkeu, LPS dan OJK.

“Jadi, sistemnya ini yang diatur secara menyeluruh terkait protokolernya. Seperti dalam *baillout*, apakah BI, Menkeu RI, LPS, dan OJK,” kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur ini.

Sementara itu pengamat ekonomi dari INDEF, Eny Sri Hartati mengapresiasi dukungan DPR karena UU JPSK memang sangat penting agar tidak terjadi kesalahan masa lalu dalam penanganan krisis di tanah air pada masa mendatang.

Hanya saja, kata pengamat ini, persoalannya semua UU pasca reformasi ini tumpang-tindih, sehingga harus diharmonisasi. Apalagi UU BI, OJK, LPS, dan UU Perbankan sendiri sebagai prioritas. Tapi, kalau tidak diharmonisasi akan berujung di Mahkamah Konstitusi (MK). “Kalau berujung di MK berarti tidak produktif,” kata dia.

Setidaknya ada delapan hal *urgent* dalam

RUU JPSK tersebut. Pertama, resiko ketidakpastian, instabilitas keuangan yang meningkat akibat dinamika sistem keuangan, baik internal maupun eksternal.

“Ketergantungan pada investasi dan impor asing Indonesia masih tinggi, sehingga rentan terjadi gejolak ekonomi. Perbankan sebagai lembaga intermediasi, tapi fungsinya masih rendah akibat besarnya konsumsi, bukan produksi,” ujarnya.

Perbankan itu beresiko, karena rakyat hanya menguasai aset 40 persen (tabungan Rp 2 juta – Rp 10 juta), sedangkan tabungan sebesar Rp 2 M ke atas dikuasai kelas menengah ke atas (60 persen), sehingga terjadi perang suku bunga.



Eny Sri Hartati

Kedua, mengantisipasi ketidakpastian global, di mana ketergantungan impor dan investasi asing masih tinggi. Ketiga, harus mampu mendeteksi dini terhadap ancaman krisis. Keempat, kejelasan parameter bank yang berdampak krisis. Kelima, mitigasi-pengendalian terhadap ketidakseimbangan resiko keuangan.

Keenam, peran lembaga intermediasi untuk mendorong pembangunan yang berkualitas untuk membangkitkan sektor riil, ketujuh mengantisipasi krisis global yang jangka waktunya (interval) makin pendek, dan kedelapan menyiapkan payung hukum.

Dengan demikian UU JPSK akan sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya krisis. Ada kejelasan dan kewenangan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, dan siapa melakukan apa saat krisis. Hal itu sekaligus untuk mencegah terjadinya kriminalisasi keuangan negara di perbankan. (nt) Foto: Naefuroji/Parle/IW

OLAH RAGA TERLALU PAGI ATAU TERLALU MALAM



Dr. Happy Apriyanti, MKK, Sp.Ok*

Tanya :

Akhir-akhir ini karena padatnya kegiatan, saya terpaksa berolahraga malam hari, sepulang kerja atau terkadang pagi hari pukul 4 pagi. Saya bersepeda statis, mengangkat beban sambil mencermati berita pagi di sejumlah media. Apakah kegiatan olahraga terlalu malam atau terlalu pagi itu sehat? (Bambang-Depok)

Jawab :

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang sebaiknya dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh. Untuk menentukan waktu yang sesuai melakukan olahraga, perlu kita kenal terlebih dahulu apa yang disebut dengan irama biologis tubuh.

Ritme circadian sebagai suatu ritme dari fungsi tubuh yang "ups" dan "down" yang secara teratur, dalam rentang waktu kurang lebih 24 jam. Fungsi-fungsi tubuh yang dimaksud antara lain suhu badan, tingkat metabolisme, kesiagaan, detak jantung, tekanan darah, pola tidur-bangun, kemampuan mental, dan komposisi kimia tertentu pada tubuh. Fungsi-fungsi tubuh tersebut akan meningkat atau sangat aktif pada siang

hari tetapi akan menurun atau tidak aktif pada malam hari atau sebaliknya. Sehingga ritme circadian seseorang akan terganggu jika terjadi perubahan jadwal kegiatan. Dengan terganggunya ritme circadian pada tubuh akan terjadi dampak pada individu seperti gangguan gastrointestinal, gangguan pola tidur dan gangguan kesehatan lain.

Ritme circadian untuk setiap individu berbeda. Ada individu yang merasa lebih aktif dan siaga pada siang hari dan ada yang merasa lebih aktif dan siaga pada malam hari. Ada dua tipe circadian, yaitu tipe siang (*Morningness*) dan tipe malam (*Eveningness*). Individu yang termasuk kategori tipe siang (yang sering disebut dengan *Larks*) adalah individu yang ritme circadiannya kurang lebih 2 jam lebih cepat/awal daripada ritme circadian populasi individu secara keseluruhan. Mereka pada umumnya bangun sekitar pukul 04.00 – 06.00 pagi dan tidur pada pukul 20.00 – 22.00 malam. Sedangkan individu yang termasuk kategori malam (yang sering disebut dengan istilah *Owls*) adalah individu yang ritme circadiannya kurang lebih 2 jam lebih lambat daripada ritme circadian populasi individu secara keseluruhan. Mereka

ka umumnya bangun sekitar pukul 08.00 – 10.00 pagi dan baru tidur sekitar pukul 24.00 tengah malam – 02.00 pagi.

Salah satu faktor lain yang mempengaruhi ritme circadian dan pola tidur-bangun adalah *usia*. Sejalan dengan bertambahnya usia, biasanya antara 40 – 45 tahun, terjadi perubahan pada jam biologis internal yang mempengaruhi koordinasi antara beberapa fungsi tubuh seperti suhu badan, siklus tidur-bangun dan tingkat hormon. Perubahan ini menyebabkan tidur menjadi mudah terganggu terutama pada malam hari.

Kunci untuk menjaga tubuh tetap sehat dan bugar adalah selain menerapkan pola makan yang sehat dan olah raga secara rutin juga sangat penting untuk menjaga kualitas tidur yang baik. Olahraga terbukti membantu tubuh lebih mudah dan lebih lama tertidur pulas.

Kendati demikian, dikarenakan kesibukan, banyak dari kita yang melakukan olahraga di pagi hari atau di malam hari. Pada prinsipnya, "Waktu terbaik untuk berolahraga adalah ketika bisa melakukannya secara konsisten," (Jessica Ma-

Irama Biologis Tubuh



Matthews, ahli fisiologi olahraga dan juru bicara di American Council on Exercise). Hal ini berarti, melakukan olahraga di waktu pagi atau malam hari, tetap memberikan manfaat bagi kebugaran tubuh daripada tidak melakukan sama sekali, atau melakukan olahraga tidak secara rutin.

Di bawah ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, bila kita melakukan olahraga dini atau malam hari :

- Jam 4 -5 pagi atau malam hari : suhu tubuh paling rendah.

Lakukan pemanasan lebih lama karena pada, otot-otot tubuh belum siap untuk melakukan aktivitas tubuh, untuk mengurangi risiko cedera

- Jam 5-6 pagi : terjadi peningkatan tekanan darah yang tajam.

Produksi melatonin atau hormon yang memicu rasa kantuk mulai berhenti, sementara tekanan darah meningkat paling tajam dibandingkan waktu lainnya. Produksi kortisol atau hormon stres meningkat sehingga otak siap untuk bekerja seharian, na-

mun peningkatannya tidak sampai memicu stres. Lebih berhati-hati pada penderita hipertensi bila melakukan olahraga dini hari.

- <jam 5 pagi : (sebelum matahari terbit), Polusi udara di sisa malam yang kaya karbon monoksida membuat orang mudah capek. Akibatnya latihan dan aktivitas jadi kurang bergairah. demikian halnya bila olahraga dilakukan di malam hari, waspadai polusi udara.

Lakukan olah raga di dalam ruangan.

- Sehubungan perlunya kualitas tidur yang baik, agar supaya tidak terganggu, aturlah jam olahraga paling sedikit 3 jam sebelum tidur sehingga suhu tubuh dapat kembali normal ketika bersiap untuk tidur.

“The best time for you to exercise is when you will do it consistently; listen to your body and let it guide you”

**saat ini bekerja di Klinik Yankes DPR RI*





Muhamad Lukman Edy

POLITISI YANG BERJIWA SENI

Sosoknya sederhana penuh keramahan. Tuturnya jelas penuh wawasan. Dia juga punya jiwa seni yang tinggi. Inilah Muhamad Lukman Edy, Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi PKB. Bicara soal dunia konstruksi dan seni, Lukman orang yang tepat untuk diajak berbincang. Kebetulan karir profesionalnya bergelut dengan dunia kontraktor. Dia juga seorang pelukis dan penulis kaligrafi yang sangat indah.

Kepada Parleментарia dalam wawancara eksklusifnya, Lukman berbagi cerita tentang masa kecilnya di Riau, romantika masa kuliah di Malang, dan perjalanan karir politik dan profesionalnya di Riau dan Jakarta. Kehidupannya, memang, tak terpisahkan dari tiga kota besar; Riau, Malang, dan Jakarta.

SISWA BERPRESTASI

Teluk Pinang, Riau, 1970. Sebuah desa terpencil di tepi sungai Indragiri, Kabupaten Indragiri Hilir, Riau. Untuk sampai ke desa ini perlu mempersiapkan fisik yang kuat, karena perjalanannya harus ditempuh berjam-jam lewat transportasi darat dan sungai. Dari Pekanbaru, ibu kota Riau butuh waktu tujuh jam ke Indragiri Hulu. Kemudian untuk sampai ke desa Teluk Pinang, masih harus menyeberangi sungai dengan perahu kecil hingga tiga jam.

Mayoritas penduduk di desa ini berprofesi sebagai petani kelapa hibrida dan sagu. Profesi pedagang sedikit sekali dan biasanya dilakoni orang-orang Tionghoa. Oleh masyarakat desa setempat para pedagang Tionghoa itu disebut *tauke*. Hasil pertanian masyarakat biasanya dijual ke para *tauke* tersebut. Keberadaan para *tauke* sangat membantu warga setempat, karena mereka suka membantu memenuhi kebutuhan warga. Bahkan, meminjam uang pun bisa ke para *tauke*.

Adalah Muhamad Adnan seorang pamong (wakil camat) yang tinggal di Desa Teluk Pinang, Kecamatan Gaung Anak Serka, sedang berbahagia, karena segera dikaruniai anak ketiga. Tahmid tiada henti terucap ketika tangis bayi mungil laki-laki memecah ketegangan. Nur'Aini ibu sang bayi yang baru saja menjalani persalinan, bersyukur atas kelahiran anak bungsu dari tiga bersaudara ini. Bayi kecil itu kemudian diberi nama Muhamad Lukman Edy.



Foto kenangan Lukman Edy bersama teman-teman

Kini, di rumah Adnan dan Aini ada jagohan kecil yang membahagiakan. Edy (sapaan masa kecil) tumbuh menjadi anak yang periang dan cerdas. Ia lahir di tengah keluarga yang religius. Bersama sahabat-sahabat kecilnya ia suka sekali bermain. Karena kehidupan dahulu sangat sulit dan bergantung pada alam, membuat anak-anak kecil seperti Edy begitu kreatif. Mereka membuat berbagai mainan dari kayu, memanfaatkan kekayaan alam yang ada.

Di kampungnya ada kayu pulai yang begitu ringan dan mudah dibuat mainan. Dari kayu pulai itu, Edy kecil sudah kreatif membuat mainannya sendiri, seperti mobil-mobilan dan perahu. Padahal, dahulu para orangtua di kampungnya kerap menyebut kayu pulai sebagai tempat tinggal jin. Tapi, Edy adalah anak yang pembarani. Ia tak peduli dengan sebutan itu. Dari kayu pulai ia berkreasi membuat berbagai mainan kesukaannya.

Alam telah membentuk anak-anak di kampung jauh lebih kreatif daripada anak-anak modern di perkotaan. Betapapun sulitnya ekonomi masyarakat di kampungnya saat itu, Edy kecil tak pernah mengeluh. Bersama para sahabatnya ia juga suka bermain bola. Saat bermain bola, Edy lebih suka berada di posisi penjaga gawang. Selain pos-

turnya paling tinggi, menjadi penjaga gawang baginya tak melelahkan daripada harus menjadi penyerang.

Bahkan, ia pernah menggalang anak-anak seusianya untuk membuat klub sepakbola. Klub sepakbola yang dibentuk Edy sering bertanding di sekolah maupun kampungnya. Kaos timnya dibuat sendiri dengan sablon. Dan yang menarik, Edy dan sahabat-sahabat kecilnya itu kerap bermain bola di lapangan berlumpur. Bila gerimis datang, itu tandanya harus bersiap ke lapangan untuk bermain bola. Wah, senangnya mengingat masa kecil di kampung.

Mengawali pendidikan formalnya, Edy bersekolah di SDN 4 Tembilahan. Pelajaran matematika dan kesenian sangat disukai Edy. Ia adalah siswa berprestasi yang selalu menempati ranking teratas di sekolahnya. Karena ia siswa yang cerdas, Edy selalu dipercaya menjadi ketua kelas di sekolahnya, dari kelas I sampai VI. Di lingkungan teman-temannya, ia memang sangat berpengaruh.

Di SDN 4 Tembilahan hanya sampai kelas V. Naik kelas VI, ia pindah ke SDN 01 Cintaraja, Pekanbaru. Mulai di Pekanbaru ini, panggilan akrabnya berubah menjadi Lukman. Kepindah-

annya itu, mengikuti kepindahan tugas ayahnya yang memang seorang birokrat di Riau. Banyak kenangan menarik semasa SD. Pulang pergi, ia selalu berjalan kaki ke sekolah bersama teman-temannya. Pernah punya sepeda untuk sekolah. Tapi sepeda itu dicuri di depan matanya sendiri. Ia melihat sepedanya dicuri dua orang bertubuh jauh lebih besar darinya.

Sedih rasanya melihat sepeda kesayangan dicuri orang begitu saja tanpa bisa melawan. Masa SD sebetulnya masa yang sulit secara ekonomi. Makan sehari-hari pun sangat sederhana di rumahnya. Bila ibundanya menggoreng telur, maka satu telur itu harus dibagi empat. Uniknya, sang ibu membelah telur itu dengan benang halus. Roti dan susu kaleng belum dikenal oleh Lukman kecil.

Sementara itu, lingkungan keluarga dan kampung yang religius, tak melupakan Lukman kecil untuk belajar agama. Mulai pukul empat sore, sepanjang dari SD, Lukman belajar agama di sebuah madrasah. Itu sekolah swasta satu-satunya di Tembilahan. Uniknya, di madrasah itu, anak-anak Tionghoa yang non muslim juga ikut bersekolah.

Tak heran, bila anak-anak Tionghoa di Tembilahan pandai mengaji dan menulis aksara Arab. Madrasah ini berada di tengah pasar. Dan para orangtua anak-anak Tionghoa itu kebetulan pedagang pasar. Waktu itu, anak-anak Tionghoa tidak bisa bersekolah di SD negeri. Untuk mencari sekolah swasta, jaraknya sangat jauh. Hanya madrasah itu yang paling dekat dan kebetulan berada di tengah pasar, tempat mereka beraktivitas.

Selepas Magrib, Lukman kecil masih belajar mengaji lagi di surau. Guru ngajinya bernama Nenek Izur yang sudah sepuh. Dia mengajari Lukman kecil membaca Al Quran secara tradisional. Ada sekitar 5-10 anak yang belajar mengaji. Dengan memegang rotan, Nenek Izur sangat runut me-

ngajari murid-muridnya. Bila murid-muridnya bercanda saat belajar, sang nenek langsung marah dan rotan yang dipegangnya menghentak.

Setiap bulan, Lukman dan teman-temannya selalu membawakan minyak tanah untuk Nenek Izur sebagai imbalannya. Minyak tersebut untuk kebutuhan lampu templok sebagai penerang. Kebetulan belum ada listrik waktu itu. Begitulah romantika masa kecil Lukman di kampung. Selepas tamat SD, ia dan keluarganya hijrah ke Kota Pekanbaru, lantaran sang ayah menjadi Anggota DPRD Provinsi Riau.

KULIAH KE MALANG

Saat tinggal di Pekanbaru, Lukman melanjutkan sekolah di SMPN 4 Pekanbaru. Sekolah ini merupakan sekolah teladan dan favorit, tempat berkumpulnya siswa-siswa berprestasi. Prestasi Lukman mulai tersaingi dengan siswa-siswa lainnya. Bila di SD selalu menempati pemuncak ranking, di SMP ia masuk lima besar ranking elit. Pelajaran matematika, sains, dan seni tetap disukai.

Ada guru olahraga dan guru melukis di SMP ini yang sangat galak dan ditakuti para siswa. Tapi, kepada Lukman begitu baik, tak pernah marah. Ketika duduk di SMP, Lukman kecil

sudah mencintai dunia seni. Ia mulai gemar melukis. Naluri seninya ini terus berkembang hingga dewasa. Objek lukisannya adalah pemandangan, bunga, dan manusia. Selain itu, ia juga piawai membuat kaligrafi yang begitu indah.

Setamat SMP tahun 1986, Lukman lalu melanjutkan ke SMAN 6 Pekanbaru (kini SMAN 8). Di SMA, ia masuk kelas A1 (jurusan fisika), kelas paling elit di sekolah. Matematika dan fisika sangat disukai. Tapi ia tak suka pelajaran kimia. Tak ketinggalan, bakat seninya yang mulai tumbuh sejak SMP terus terasah ketika SMA. Bahkan, Lukman muda mulai bisa mengikuti pameran seni. Karya lukisnya dipamerkan di mana-mana.

Di SMA, Lukman juga rajin berorganisasi. Selain menjadi pengurus OSIS, ia juga masuk Paskibra dan pramuka. Tahun 1989, Lukman menamatkan SMA. Dia pun mulai melirik perguruan tinggi negeri untuk melanjutkan kuliah. Kesukaannya pada dunia sains, membuat Lukman ingin mengambil studi teknik. Pilihan pun jatuh ke Universitas Brawijaya (Unibraw), Malang, Jawa Timur dan Universitas Gajah Mada (UGM), Yogyakarta.

Setelah mengikuti seleksi masuk, pemuda Lukman pun diterima di Fa-



Lukman Edy saat memimpin Kunker Komisi II DPR ke pulau Seram, Maluku

luktas Teknik, Unibraw, Malang. Ia mengambil jurusan teknik sipil. Bagi Lukman, Malang kota yang asing, belum pernah disinggahi sebelumnya. Saat menginjakkan kaki pertama kali di Malang, ia menumpang sementara di rumah teman kakaknya, dekat kampus Universitas Merdeka, Malang. Terbiasa hidup mandiri sejak kecil, tak ada masalah bagi pemuda Lukman tinggal menyendiri di Malang.

Yang menarik, kali pertama tinggal di Malang, ia sulit makan. Tak ada menu yang cocok dengan selernya yang suka pedas, asam, atau asin. Sementara di Malang, makanannya terasa manis. "Saat bulan pertama di Malang, saya tidak bisa makan, karena orang Sumatera tahunya pedas, asin, dan asam. Di Malang saya enggak ketemu dengan rasa itu. Yang ada hanya manis," katanya, penuh tawa.

Akhirnya, selama di Malang, Lukman hanya mengenal makanan soto, rawon, dan pecel. Tiga menu itu yang dirasa paling dekat dengan cita rasanya. Awalnya ia tak bisa membedakan mana makanan yang disebut soto dan rawon. Lukman melihatnya sama saja. "Rawon dan soto saya anggap sama, karena saya tidak bisa membedakannya. Jadi, bagi saya hanya itu yang bisa saya makan," terangnya.

Cukup lama Lukman beradaptasi dengan makanan setempat. Hanya soal makanan yang bermasalah, selebihnya ia tak menghadapi masalah apapun di Malang. Sementara mengawasi perkuliahannya, pemuda Lukman sangat menikmati semua mata kuliah. Dekan FT Unibraw Aziz Husen yang mengajar teknik pengairan sangat disukai Lukman. Begitu juga Ibnu Rubianto, dosen mata kuliah transportasi dan lapangan terbang jadi salah satu favoritnya di kampus.

Nama dosen terakhir itu, pernah menjadi pembimbing skripsi Lukman. Selain membagi ilmu teknik, dia juga berbagi ilmu kewirausahaan bagi para

mahasiswanya. Ibnu Rubianto ternyata juga pernah menjadi Bupati Malang tahun 2000-2002 dan bergabung dengan PKB. "Selain menjadi dosen, dia juga memiliki usaha real estate dan jasa konsultan. Ia sudah wafat," kenang Lukman tentang dosennya itu.



Lukman Edy mendapat Anugrah Bintang Kehormatan dari Presiden SBY

Selama di kampus, Lukman juga aktif berorganisasi. Ia menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil di kampusnya sekaligus anggota Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil untuk seluruh Indonesia. Di luar kampus, Lukman aktif di Paguyuban Mahasiswa Riau dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Pemuda Lukman adalah aktivis kampus yang idealis dan penuh daya kritis. Kapasitas intelektualnya terasah selama menjadi mahasiswa.

Ketika menjadi aktivis kampus, Lukman juga sering mengikuti aksi demonstrasi. Ia pernah berdemonstrasi di depan pengadilan negeri Surabaya yang sedang menyidangkan kasus larangan berjilbab bagi karyawan sebuah perusahaan. Waktu itu jilbab masih menjadi larangan, belum sebebaskan sekarang. Dan Lukman bersama para aktivis lainnya memprotes larangan berjilbab itu. Bersama para aktivis lainnya, Lukman mendesak pengadilan mengeluarkan keputusan yang adil.

Tahun 1995, Lukman menamatkan studi teknik sipilnya di Unibraw. Ia kemudian hijrah ke Jakarta. Di Ibu Kota, ia mendapat proyek perdananya sebagai profesional. Ia diminta membangun rumah di Rempoa, Jakarta Selatan. Rumah itu ternyata menjadi rumah mertuanya. Ia kerjakan semua detail pembangunannya, dari desain gambar, menghitung beton, semen, hingga mengawasi. "Saya seperti mandor bangunan. Tetapi, rumah itu sekarang sudah dijual," ceritanya.

KE PANGGUNG POLITIK

Memasuki masa krisis moneter, tahun 1998, Lukman pulang kampung ke Riau. Mantan Ketua DPD Gapensi Riau ini, membuka jasa konsultan manajemen untuk mendampingi koperasi-koperasi di kampungnya agar tetap survive di masa krisis. Pendampingan yang dilakukan Lukman adalah membantu membuat proposal bantuan dana dan menggerakkan ekonomi rakyat dari desa ke desa.

Selain itu, mantan Komisararis PT. Megah Karya Prima ini pernah mendapat proyek pembangunan rumah bagi para buruh perkebunan di tengah hutan. Kebetulan ada hutan tanaman industri (HTI) di sana. Selama membangun rumah itu, ia harus keluar masuk hutan. Bahkan, pernah tinggal di hutan selama seminggu. "Di hutan berteman dengan nyamuk, bertemu gajah, bahkan perampok. Saya membuat 40 unit perumahan untuk buruh perkebunan."

Kejadian yang memilukan pernah ia alami selama membangun rumah di tengah hutan. Syahdan, waktu itu ia sedang mengambil logistik ke Pekanbaru selama dua hari. Ketika balik lagi ke hutan, seng penutup atap rumah semuanya hilang digasak perampok. Para perampok itu datang menggunakan truk. Jumlah mereka banyak sekali, hingga satpam penjaga proyek ketakutan dan mengunci diri di gudang. Akhirnya, Lukman harus meng-



Lukman Edy saat berada di Tembilahan, Riau

ganti kembali semua sengketa itu.

Di masa krisis moneter, Lukman justru kebanjiran banyak proyek. Salah satunya membangun tower untuk Satelindo. Setelah selesai dibangun, ia tak mendapat pembayaran sesuai kontrak. Akhirnya, dari Riau ia datang ke kantor pusatnya di kawasan Daan Mogot, Jakarta Barat untuk menagih. Tapi, kantor itu kosong. Kondisi yang sedang dilanda krisis moneter membuat banyak perusahaan gulung tikar dan mem-PHK banyak karyawannya, termasuk Satelindo.

Karena tak mendapat uang tagihan, ia pun tinggal sejenak di Jakarta. Saat yang sama banyak aksi demonstrasi membanjiri Ibu Kota. Jiwa aktivis masih melekat pada dirinya. Melihat demonstrasi, ia pun terpanggil untuk ikut berunjuk rasa sambil membawa map tagihan. “Daripada menunggu tagihan tidak cair, saya ikut berdemo di Daan Mogot. Saat dikejar tentara semua berlarian ke gang kecil untuk bersembunyi,” kenang Lukman, penuh derai tawa.

Setelah itu proyek mulai sepi. Tapi tak lama kemudian masa pemilu perdana di era reformasi dimulai. Tahun 1999, Lukman mulai berkiprah di panggung politik. Baginya, dunia politik sudah

tak asing. Apalagi, sang ayah juga seorang politisi. Ketika banyak partai baru bermunculan, Lukman tak ketinggalan ikut mengarsiteki lahirnya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Lukman mendapat mandat menjadi deklarator PKB di Riau.

Pada 1999, ia terpilih menjadi Anggota DPRD Riau periode 1999-2004. Di PKB, Lukman pernah menduduki Wakil Bendahara DPW PKB Riau, yang kemudian menjadi Wakil Ketua DPW. Sempat pula menjadi Ketua DPC di Kepulauan Riau. Setelah itu, Lukman kembali menjadi Anggota DPRD Riau periode 2004-2009. Tapi, ia mengundurkan diri pada 2005, karena diangkat menjadi Sekjen DPP PKB.

Seiring pengangkatannya sebagai Sekjen, mantan Ketua LPNU ini hijrah ke Jakarta. Karir politiknya terus menanjak. Sebagai politisi muda, Lukman selalu mendapat kepercayaan. Tahun 2007, Presiden SBY waktu itu melakukan *reshuffle* kabinet. Lukman dipercaya menempati kursi Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal, menggantikan Saefulloh Yusuf. Ketika diangkat menjadi menteri, usia Lukman masih 36 tahun. Sebelum diangkat, SBY memanggilmnya ke Cikeas.

“Pak SBY melihat biodata saya. Beliau bilang, ‘Saya memerlukan orang yang mobilitasnya tinggi, semangat kerjanya tinggi, dan mempunyai kemampuan manajemen. Saya melihat biodata Anda lumayan, disamping sebagai sekjen PKB, pernah menjadi Ketua Gapensi, pernah menjadi Ketua Kadin. Jadi bisa diandalkan.’ Saya jawab, oke siap,” ungkap Lukman, mengutip percakapannya dengan SBY.

Mengawali profesinya sebagai menteri, Wakil Sekretaris Lembaga Adat Melayu Riau ini, merasa karir politiknya begitu cepat melejit. Padahal, ia baru dua tahun menjabat Sekjen PKB. Di kabinet, tidak saja paling muda, Lukman juga merasa paling rendah jam terbangnya duduk di birokrasi pusat. Namun, itu tak lantas membuatnya minder dan rendah diri. Justru jabatan baru ini membuatnya kian percaya diri.

Dia pimpin kementeriannya seperti ia memimpin sebuah perusahaan. Kinerja dan progres selalu diperhatikan betul. Pengalaman memimpin perusahaan membuatnya terbiasa bekerja dengan sangat terukur. “Kementerian saya itu cepat sekali naik progresnya. Dalam waktu setahun sudah melampaui kinerja kementerian lain. Kementerian PDT masuk dalam sembilan kementerian dan lembaga negara terbaik seluruh Indonesia,” terang Lukman.

Yang menarik, sebagai menteri ia belum mengetahui sepenuhnya aturan protokol di istana. Waktu itu ada tamu di istana. Peraturannya, semua menteri dan pejabat lainnya mengenakan jas warna gelap. Lukman yang belum lama jadi menteri, mengenakan jas warna coklat. Ia pun ditegur sekretaris militer agar mengenakan jas warna hitam atau gelap setiap menghadiri acara kenegaraan di istana.

Memasuki tahun 2009, Lukman menyudahi jabatannya sebagai menteri dan kembali terjun menjadi legislator pada pemilu 2009. Mantan Dirut

PT. Inti Grup tersebut menjadi caleg dari dapil Riau II (Kabupaten Kampar, Pelalawan, Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singingi). Lukman terpilih dan dilantik menjadi Anggota DPR RI untuk pertama kalinya. Pada periode 2009-2014, dia pernah duduk di Komisi III dan Komisi VI, sekaligus menjadi Ketua Fraksi PKB MPR RI.

Pada pemilu 2014 kembali terpilih dari dapil yang sama. Dan kini menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI. “Kenapa saya memilih Komisi II, karena ada misi pemekaran di Riau. Infrastruktur di sana sangat buruk dan mencakup daerah yang terlalu luas. Sekarang sudah ada 14 kabupaten kota. Butuh 8 kabupaten lagi untuk dimekarkan. Itu sangat mendesak. Apalagi, banyak daerah di Riau belum tersentuh pembangunan infrastruktur.”

Ditambahkan mantan Ketua Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO), Riau itu, akibat minimnya akses infrastruktur, masyarakat setempat harus menempuh perjalanan yang sangat jauh untuk mencapai ibu kota kabupaten atau provinsi. Banyak ibu hamil harus melahirkan di tengah jalan bahkan meninggal sebelum sampai ke rumah sakit.

SUKA TERI GORENG

Kota Riau, Malang, dan Jakarta menyimpan banyak kenangan bagi perjalanan hidup Lukman. Peraih gelar Magister Sains pada program Administrasi Pembangunan, UNPAD ini, merintis karir politik dan profesionalnya dengan tekun, percaya diri, dan penuh kesabaran. Ketika sudah menjadi pengusaha dan politisi, waktu kebersamaannya dengan keluarga memang banyak tersita. Saat berada di tengah keluarga, ia tetaplah ayah yang bersahaja.

Di rumahnya ada Gustini Zuliaty, istri tercinta yang dinikahinya pada tahun 1996. Gustini adalah alumni Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dari

pernikahan dengan Gustini, Lukman dikaruniai tiga anak. Anak sulungnya bernama Muhammad Syauqi, yang kini sedang kuliah di Fakultas Ekonomi Unibraw, Malang. Anak kedua Maulana Ali Lutfie, sedang menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Al Kaustar, Sukabumi. Dan si bungsu Muhamad Iyyas Shiddiq, masih duduk di kelas VI SD.

“ Kalau sampeyan ingin tahu isi hati rakyat atau bicara tentang bahasa rakyat dan segala persoalannya, cermati lirik- lirik lagu dangdut. Semua persoalan ada di liriknya ”



Bersama keluarga tercinta

Akhir pekan bila tak ada kesibukan, ia memanfaatkan waktunya bersama keluarga. Untuk wisata favorit keluarga, Lukman biasa berwisata ke Malang. Banyak objek wisata di kota apel itu. Malang adalah kota yang penuh kenangan, kebetulan anak sulungnya sedang kuliah di Unibraw. Jadi bila berwisata ke Malang sekalian menengok si sulung itu. Tak ketinggalan, Lukman juga suka mengajak keluarganya berkunjung ke kampung halamannya di Riau. Kebetulan masih ada ibu kan-

dung di sana.

Soal makanan favorit, pendiri tabloid politik PONDASI itu, suka sekali goreng teri yang dicampur dengan kacang. Apalagi, bila dipadu dengan sambal, wah, kenikmatannya seakan tak terkalahkan dengan menu apapun. Hampir setiap hari selalu tersedia stok teri dan kacang goreng di meja makan. Bila habis, biasanya segera terisi kembali.

Sementara bicara lagu dan penyanyi favorit, hampir semua lagu dan penyanyi ia sukai. Ketika kuliah dulu, Lukman mengaku suka dengan penyanyi Desy Ratnasari yang kini juga menjadi Anggota DPR dari Fraksi PAN. Lagu bergenre pop dan dangdut disukai Lukman. Sebut saja lagu-lagu dari DEWA, SAMSON, Afgan, Bebi Romeo, dan Rossa. Untuk dangdut, Lukman bahkan pernah menggelar musik dangdut di Ciganjur saat Gus Dur masih ada.

Lukman sempat minta izin pada Gus Dur untuk menggelar dangdutan. Gus Dur langsung menyatakan setuju. Bahkan, Gus Dur sempat berpetuah pada Lukman. “Kalau sampeyan ingin tahu isi hati rakyat atau bicara tentang bahasa rakyat dan segala persoalannya, cermati lirik- lirik lagu dangdut. Semua persoalan ada di liriknya,” imbuh Lukman, mengutip kata-kata Gus Dur. (mh) Foto: Andri, Jaka, dok. pribadi/ Parle/IW



Tim Kunker Komisi III DPR meninjau pelabuhan penyeberangan Batam

KOMISI III PANTAU BANYAKNYA WNA MASUK KEPRI

Provinsi Kepulauan Riau merupakan salah satu bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang wajib dijaga keutuhannya. Masuknya imigrasi legal (gelap) ke Indonesia membuat dampak negatif dalam bidang politik, sosial budaya dan keamanan.

Demikian dikatakan Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman saat menggelar pertemuan dengan Polda Kepri di ruang Lancang Kuning Polda Riau baru-baru ini.

Pimpinan Tim Kunker Spesifik ini mengatakan, faktor ekonomi dan keamanan merupakan alasan utama orang atau sekelompok orang asing melakukan perjalanan yang amat jauh dari tempat tinggal bahkan melewati rintangan yang berbahaya bagi keselamatan mereka. Maraknya arus imigran ilegal dan pencari suaka politik, akan memberikan ancaman baik di negara transit maupun di negara tujuan.

Selama ini tidak sedikit ditemukan WNA dengan visa wisatawan digunakan untuk bekerja di Indonesia

terutama di daerah Batam. Hingga saat ini Indonesia belum memiliki aturan hukum dan teknis penanganan imigran ilegal yang transit di Indobesia. “Sehingga membuat koordinasi antar-instansi terkait saat menangani imigran gelap menjadi terkendala,” kata Benny.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian belum mengatur penanganan imigran gelap yang jadi korban sindikat penyelundupan manusia. Undang-Undang Keimigrasian hanya me-

ngatur sanksi pidana bagi pelaku penyelundupan manusia. Sedangkan untuk imigran yang jadi korban tidak diatur.

Dia mengemukakan berdasarkan Ratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1951, Australia menyatakan sebagai negara penampung imigran. “Di Australia, mereka dapat dipekerjakan dan menjadi warganegara sana, namun melalui proses yang ketat,” tegasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat ini, ada dua jenis pelanggaran imigrasi yakni pelanggaran imigrasi murni dan penyelundupan manusia dengan korban imigran atau pengunjung ilegal. Sanksi pidana pelanggaran imigrasi murni terkait keabsahan dan penggunaan dokumen keimigrasian sudah diatur dalam undang-undang. Sedangkan sanksi bagi pelanggarnya akan dideportasi.

Sementara anggota Komisi III DPR Taufiqulah Hadi yang ikut dalam kunjungan spesifik juga mengatakan, fokus Kunker Spesifik



Anggota Komisi III DPR Taufiqulah Hadi

Komisi III DPR adalah untuk melihat maraknya tenaga kerja asing yang datang ke Provinsi Kepulauan Riau. Seperti diketahui Batam merupakan salah satu titik masuk yang sangat tinggi. Kemudian pemerintah mempunyai rencana untuk menggerakkan sektor wisata, salah satunya Batam, setelah Bali dan Jakarta.

Taufiqulah menegaskan, salah satu daerah tujuan wisata di Indonesia yang sangat potensial juga banyak Tenaga Kerja Asing (TKA) yang menggunakan visa turis. Seperti baru-baru ini warga negara Inggris dengan menggunakan visa turis

tetapi bekerja di Batam, dan masih banyak tenaga asing di luar Batam melakukan hal yang sama dan belum tertangani.

Selain itu, lanjutnya, para turis bukan hanya sebagai wisatawan akan tetapi bekerja bahkan menjadi instruktur diving, membuat film, bahkan banyak yang bekerja menjadi PSK. “Kesemuanya itu ilegal dan itulah yang sebenarnya kita lihat. Bagaimana penanganannya, Batam menjadi tempat berbagai kegiatan yang dilakukan secara ilegal, dan sudah seharusnya mereka ditangkap, didenda dan dideportasi,” tegas Taufiqulah.

Dia menegaskan kembali agar kepolisian bertindak tegas dan jangan setengah hati. “Tidak mungkin sebuah pulau sebesar Batam tidak bisa dikendalikan. Yang terjadi ada orang keluar masuk Batam bukan penduduk tradisional saja, tetapi pendatang dari daerah lain karena mereka ingin berkunjung ke negara tetangga secara ilegal,” katanya mengingatkan. (spy,mp) Foto: Supri/Parle/IW

Wakil Ketua Komisi III Benny K Harman memeriksa dokumen imigrasi





Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah, anggota Komisi IX DPR, dan Direksi Cemindo menemui pekerja asing asal Tiongkok

TEMUI GUBERNUR RANO KARNO, DPR SASAR PEKERJA ASING DI BANTEN

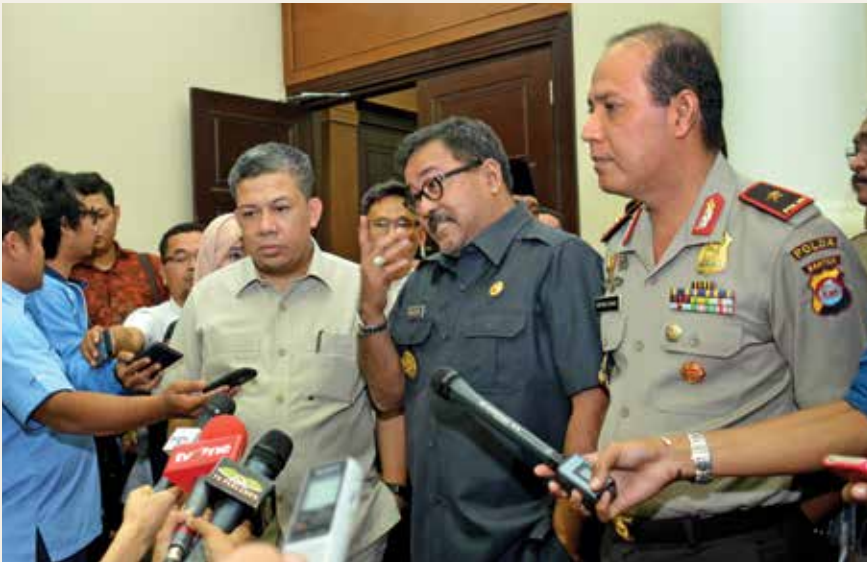
Rona memerah matahari semburat di pagi itu, seolah menambah energi Tim Kunker Spesifik DPR yang sudah membulatkan tekad ingin menemukan keberadaan para Tenaga Kerja Asing (TKA) di Banten. Jarum jam baru saja menunjuk angka 06.00 WIB namun nampak Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Fahri Hamzah didampingi Anggota Komisi IX DPR RI antara lain M. Ali Taher (Fraksi PAN), Siti Masrifah (Fraksi PKB) dan Djon Rolindrawan (Fraksi Hanura) sudah siap diatas Bus untuk menemui Gubernur Banten Rano Karno beserta jajaran SKPD di Pendopo

Gubernur Banten, KP3B baru-baru ini.

Dalam pertemuan itu Fahri Hamzah meminta penjelasan dan data terkini terkait keberadaan TKA yang masuk ke wilayah Banten dalam kurun waktu setahun terakhir. “Kami menerima banyak informasi terkait adanya Tenaga Kerja Asing yang masuk dan bekerja di perusahaan-perusahaan di wilayah Banten. Kedatangan kami bagian dari upaya untuk menjawab pertanyaan yang berkembang di masyarakat,” ungkap Fahri.

Lebih lanjut politisi PKS ini menyatakan bahwa trend maraknya buruh Tiongkok ke Indonesia antara lain ke wilayah Banten harus disikapi secara serius dan dipastikan bahwa mereka bukan kategori tenaga kerja tak terlatih (*unskilled labour*) karena jika terjadi maka *unskilled labour* tersebut jelas melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara kita.

Di lain pihak, Gubernur Banten Rano Karno mengatakan semua pekerja asing di Banten diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Menurutnya, dari seluruh TKA di



Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah bersama Gubernur dan Kapolda Banten

Banten, 98 persen legal dan sisanya merupakan keluarga dari tenaga legal tersebut. Industri di Provinsi Banten masih membuka peluang bagi tenaga kerja berketerampilan baik lokal maupun asing, namun juga harus sesuai dengan apa-apa yang telah diatur konstitusi.

“Banten butuh tenaga kerja berketerampilan, pekerja asing di sini harus diatur oleh konstitusi,” katanya.

Sementara itu, Kadisnaker Provinsi Banten, Hudaya Latuconsina mengatakan jumlah TKA di Provinsi Banten hingga Agustus 2015 sebanyak 10.082 orang. Dan diperkirakan pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi 25.200 orang.

Hudaya juga mengakui bahwa Pemerintah Provinsi belum bisa maksimal dalam mengontrol keberadaan TKA di Banten, hal ini dikarenakan keterbatasan ijin TKA yang hanya ada di Kementerian Tenaga Kerja.

“Kontrol kami ada masalah, karena ijin mempekerjakan tenaga kerja asing itu ada di Kementerian Tenaga Kerja. Kami tidak dapat data dan hanya menerima data dari perusahaan yang wajib lapor,” akunya.

TEMUKAN PEKERJA ASING

Usai bertemu Gubernur Banten, Tim Kunjungan Kerja Spesifik melanjutkan perjalanan ke pabrik Semen Merah Putih di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak Banten. Walau dihadang medan yang cukup berat, perjalanan darat selama 5 jam naik turun bukit dengan kondisi jalanan berlubang dan berdebu karena sedang dalam perbaikan, konvoi rombongan anggota DPR tanpa istirahat mampu mencapai lokasi pabrik yang berada tepat di atas perbukitan pinggir pantai Kecamatan Bayah, Lebak, Banten sekitar pukul 16.00 WIB.

Setiba di lokasi rombongan diterima oleh Jajaran Direksi PT. Cemindo Gemilang, Aparat Pemkab Lebak serta Camat Bayah untuk mendengarkan pemaparan sekilas mengenai sejarah pendirian perusahaan produsen Semen Merah Putih. Menurut Direksi Cemindo, pabriknya menempati area seluas 500 hektare dimana peletakan batu pertama dilakukan pada 11 September 2013 oleh Menko Perekonomian saat itu Hatta Rajasa. Proyek tersebut bagian dari program *Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)* di era

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Total investasi pembangunan seluruh fasilitas pabrik mencapai USD 600 juta.

“Kami datang untuk mengklarifikasi ada laporan di berbagai media bahwa ada Tenaga Kerja Asing *unskilled* (tanpa keahlian) asal Tiongkok yang dipekerjakan di sini,” sergah Fahri meminta penjelasan fokus pada permasalahan tersebut. Menurut Fahri, jika praktek tersebut ada maka tidak sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja dan sejumlah peraturan Menteri Tenaga Kerja.

“Hanya pekerja yang memenuhi syarat keahlian khusus yang diizinkan bekerja di Indonesia, karena itu kami (DPR) ingin memastikan persyaratan tersebut bisa ditunjukkan Cemindo,” tegas Fahri.

Menanggapi hal tersebut, pihak Cemindo mengakui masih ada 274 TKA asal Tiongkok yang masih dipekerjakan untuk menyelesaikan proyek di pabrik Semen Merah Putih. “Hingga 4 September 2015 masih ada 231 TKA asal Tiongkok dari Sinoma Project dan 43 TKA dari China Harbour yang mengerjakan pelabuhan,” kata Sigit Indrayana, General Manager PT Cemindo mengklarifikasi.

PT Cemindo juga menjamin bahwa para TKA tersebut memiliki izin kerja dan keahlian khusus sesuai peraturan yang berlaku, dimana pembinaan secara rutin dilakukan oleh Disnaker, Imigrasi dan Kepolisian. Keberadaan TKA hanya saat konstruksi *project*, setelah *project* selesai mereka akan kembali ke negaranya dan operasional pabrik semen akan ditangani oleh tenaga kerja lokal terbaik. “Mereka memberikan pelatihan (*transfer knowledge*) khusus kepada para pekerja lokal,” tukas Sigit. (Naefuroji)Foto: Naefuroji/Parle/IW



KETIKA RUU KEBUDAYAAN JADI KEBUTUHAN

Negeri ini terlalu kaya dengan ragam budaya. Dari bahasa, seni tradisional, hingga cagar budaya jadi kekayaan negeri yang harus dilindungi. Saat ini belum ada payung hukum yang mampu melestarikan semua itu. UU yang ada masih bersifat sektoral. Dan RUU Kebudayaan menjadi jawaban atas kebutuhan dan tantangan masa depan.

Dua provinsi dikunjungi secara bersamaan oleh tim kunjungan kerja (kunker) spesifik Komisi X DPR RI untuk menyosialisasikan RUU ini sekaligus menyerap banyak masukan dari para budayawan dan tokoh adat daerah. Pada awal September lalu, Komisi X mengunjungi Provinsi Sumatera Utara (Sumut) dan Sulawesi Tenggara (Sultra).

Pertemuan dengan para tokoh adat dan budayawan se-

tempat pun digelar. Pertemuan ini untuk menyamakan persepsi tentang muatan RUU Kebudayaan. Banyak tokoh adat dan budayawan daerah yang belum mengetahui lebih detail isi RUU tersebut. Di sinilah tim kunker Komisi X berperan memberikan pemahaman yang utuh atas kebutuhan produk undang-undang yang memayungi kekayaan budaya Nusantara.

DI SUMUT

Di Medan, Sumut, tim kunker Komisi X bertemu dengan Sekda dan para kepala dinas setempat untuk membincang RUU Kebudayaan. Akademisi, budayawan, dan tokoh adat ikut aktif memberi masukan untuk RUU ini. Tim kunker yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X Nuroji itu, mendapat masukan berharga soal budaya yang berkembang dan hidup di Sumut. Selama ini, menurut

para tokoh adat, ada kesalahan fatal dalam tradisi pemberian kain ulos bagi para tamu.

Kesalahan yang dimaksud adalah pejabat daerah kerap yang memberikan kain ulos tersebut kepada para tamu kehormatan. Padahal, mestinya tokoh adat yang layak memberikannya. Inilah kesalahan fundamental dalam memperlakukan tradisi adat oleh para pejabat daerah. Ini jadi masukan penting. Persoalan lain disampaikan akademisi bahwa sebaiknya istilah bahasa daerah dan kebudayaan daerah diganti menjadi bahasa etnik dan dan kebudayaan etnik.

Nuroji menjelaskan bahwa ada delapan pilar pembangunan kebudayaan di Indonesia. Pertama, penguatan hak kebudayaan. Kedua, pembangunan karakter bangsa. Ketiga, pelestarian sejarah. Keempat, pembinaan kesenian. Kelima, pengembangan industri kreatif. Keenam, penguatan diplomasi budaya. Ketujuh, pengembangan pranata dan SDM kebudayaan. Dan terakhir, pengembangan sarana dan prasarana budaya.

“Dari beberapa pilar pembangunan kebudayaan di atas, kunjungan kerja ke Sumatera Utara ini paling tidak kami mengharapkan mendapat masukan penguatan hak berkebudayaan, pembangunan jati diri dan karakter bangsa melalui warisan sejarah Kesultanan Deli,” kata Nuroji dalam pertemuan di Kantor Gubernur Sumut.

Sekda Sumut Hasban Ritonga menjelaskan, di Sumut ada delapan etnis yang diakui, yaitu Melayu, Batak Toba, Karo, Simalungun Pakpak, Angkola, Mandailing, Pesisir, dan Nias. Kedelapan etnis ini memiliki bahasa dan kearifan lokalnya masing-masing. Dan sudah ada Peraturan Gubernur untuk melindungi kekayaan etnis di Sumut ini.

Usai menggelar pertemuan, tim kunker Komisi X juga mengunjungi Situs Kota Cina di Marelan, Medan. Ini temuan situs baru yang belum mendapat perhatian pemerintah setempat. Banyak temuan benda-benda purbakala yang sangat berharga di sini. Tim bertemu dengan Ichwan Azhari dosen Universitas Medan yang begitu peduli menjaga areal temuan situs tersebut. Ia mendirikan museum mini untuk menyimpan benda-benda purbakala hasil temuan di lokasi situs.

Temuan yang tersaji di antaranya, koin mata uang, gerabah, emas, patung Buddha, rangka kapal, fosil kayu, hingga batu purba dari ledakan Gunung Sinabung yang terlempar ke lokasi situs. Saat ini lokasi situs masih menjadi areal hunian rumah penduduk. Berdasarkan keterangan Ichwan, lokasi itu diduga dahulunya meru-

pakan kawasan pelabuhan niaga internasional. Bahkan, di bawah tanah rumah penduduk ada bangunan candi yang belum dieskavasi.

Pelabuhan ini diduga sudah ada sejak abad ke-12 hingga ke-14 M. Bila sudah dieskavasi seluruhnya, mungkin akan menyerupai kompleks candi di Muara Jambi atau kompleks kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur. Bila benar Situs Kota Cina di Medan merupakan kawasan pelabuhan, maka ini menjadi temuan berharga yang harus dilindungi. Sayangnya, Pemda setempat tak kuasa melindungi temuan situs, karena tak memiliki pos anggaran yang cukup.



Wakil Ketua Komisi X DPR RI Nuroji

Tim Komisi X menyarankan agar Pemda setempat mengajukan registrasi temuan cagar budaya ini ke pemerintah pusat. Bila sudah teregistrasi, kelak ada anggaran yang dialokasikan untuk itu. Nuroji menjelaskan, selama ini anggaran untuk museum dan pemeliharaan cagar budaya hanya Rp50 miliar di APBN untuk seluruh Indonesia. Anggaran tersebut tentu tak cukup untuk melestarikan cagar budaya dan museum yang sangat banyak di Tanah Air.

DI BUTON

Di Buton, Sulawesi Tenggara (Sultra), tim kunker mengunjungi kawasan benteng Keraton Buton. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam yang memimpin tim ini menyatakan, Keraton Buton butuh perlindungan UU tersendiri untuk menyelamatkannya. “Kalau perlu kita buat UU bukan Perda, tentang kawasan khu-



Tim Kunker Komisi X DPR RI tiba di bandara Betoambari disambut Walikota Baubau dan Bupati Buton

sus benteng keraton dari Pemerintah Pusat, sehingga dia akan dikembalikan seperti aslinya dan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus Pariwisata,” kata Ridwan.

Namun merumuskan UU tersendiri untuk menyelamatkan cagar budaya Keraton Buton masih harus menunggu RUU Kebudayaan rampung dibahas, karena ini merupakan aturan induknya. Ridwan mencontohkan, Tembok Cina saja memiliki UU sendiri, sehingga dia menjadi kawasan pariwisata yang menghasilkan devisa cukup besar bagi pemerintah Cina.

Bupati Buton Samsu Umar Abdul Samiun mengatakan, Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan tua di Nusantara. Bila merujuk dari pelantikan raja pertama Wakaka hingga berakhirnya pemerintahan Kesultanan Buton pascabergabung dengan NKRI (1960), maka budaya Kerajaan Buton telah berusia lebih dari 600 tahun. Dari peninjauan langsung ke Buton, tim kunker mendapat banyak masukan berharga untuk penyempurnaan RUU Kebudayaan.

Di kawasan keraton ini banyak sekali temuan benda-benda purbakala berupa artefak. Bila melihat kompleks keraton tersebut, peradaban Buton masa lalu dinilai sangat tinggi. Dari Kerajaan Buton lahir tradisi seni dan adat istiadat yang tetap bertahan hingga kini. Warisan naskah kuno juga terpelihara dengan baik. Ini bisa menjadi peninggalan cagar budaya dunia yang sangat menakjubkan.

Selain meninjau keraton, tim kunker Komisi X sempat berkunjung ke Kota Baubau untuk melihat sarana

olahraga. Komisi X setuju atas usulan Pemda setempat untuk membangun gedung olahraga. “Kita akan perjuangkan usulan itu di Komisi X DPR RI,” ujar Ridwan singkat saat berdialog dengan Masri Kadis Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikmudora) Kota Baubau.

Baubau memang membutuhkan semacam *sport center*. Rencananya, pembangunan *sport center* itu akan menempati areal seluas 20 hektar. Prioritasnya adalah membangun stadion utama dan fasilitas kolam renang. Rencana ini sangat tepat, karena Kota Baubau akan mempersiapkan diri menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke XIV.

“Selama ini atlet renang Baubau selalu menyumbang medali emas terbanyak. Namun mereka latihan di laut, karena Baubau tidak memiliki kolam renang,” ungkap Masri. Anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana olahraga sekitar Rp250 Miliar. Pengerjaannya diupayakan mulai dibangun pada tahun 2016 dengan sistem anggaran *multiyears*. (mh/iw) Foto: Iwan Armanias, Husen/Parle/IW



Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam meninjau Batu Popaua didampingi Walikota Baubau



M Suryo Alam saat memimpin pertemuan di Pemda Kab. Jember

DPR KAWAL PEMASANGAN LISTRIK DI PELOSOK JEMBER

Permasalahan listrik masuk desa di Jember, Jawa Timur tidak kunjung usai. Bahkan semakin berbelit karena adanya dugaan oknum yang bermain di lingkungan desa maupun kemungkinan dari kalangan PLN. Anggota Komisi VII DPR RI akhirnya turun langsung ke Jember untuk mengetahui sejauh mana persoalan tersebut saat ini. Pertemuan antara DPR RI, pihak PLN, SKPD dan DPRD Jember Komisi B dilaksanakan di ruang rapat Pemkab Jember, baru-baru ini.

Persoalan listrik masuk desa untuk masyarakat kecil 450-900 watt yang seharusnya memakai biaya pokok sesuai ketentuan yaitu 450 ribu - 850 ribu rupiah, ternyata pada pelaksanaannya dipungut sampai 4 juta rupiah. Hal ini terjadi di Dusun Baban, Desa Mulyorejo, Kecamatan Silo, Kabupaten Jember

“Inilah yang membuat kita prihatin kalau PLN ternyata tidak bisa mengatasi, padahal itu bagian tanggungjawabnya. Apalagi peraturan-peraturan pemasangan, misalnya mengenai tanggung jawab instalasi

dibebankan pada siapa, ketentuan listrik subsidi harus mendapatkan surat keterangan tidak mampu yang ternyata bisa dipermainkan oleh oknum-oknum,” ungkap ketua rombongan tim Kunjungan Spesifik Mohammad Suryo Alam, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Partai Golkar Dapil Jawa Timur VIII.

Menanggapi hal tersebut Direktur Keuangan PLN Nicke Widyawati mengutarakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan pendekatan langsung ke warga di pelosok. Upaya jemput bola ini memang baru



Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi memberi masukan tentang permasalahan listrik desa

dilakukan di beberapa wilayah saja.

Upaya ini dianggap salah satu upaya yang baik, bila juga diikuti sosialisasi yang jelas untuk semua kalangan masyarakat. DPR menyarankan agar PLN memberikan penerangan pada masyarakat tata cara penyambung-

an, besaran biayanya, persyaratan dan sebagainya yang apabila tidak dipahami warga akan dapat dimanfaatkan pihak lain untuk mengeruk keuntungan.

“Petugas PLN harus inspeksi orang-orang yang hidup di desa, di pelosok

mereka warga negara yang punya hak untuk memperoleh listrik juga. Dan sebenarnya mau bayar juga. Cuma ketidakmengertian mengenai prosedur inilah yg dipergunakan pihak lain untuk mengambil keuntungan. Kalau PLN berniat mau turun jemput bola ke pelosok ini termasuk pemenuhan kebutuhan dasar. Bisa meningkatkan keamanan juga untuk pendidikan bahkan kesehatan” ujar Suryo.

Lebih lanjut DPR menekankan waktu sebulan untuk penyelesaian kasus ini, dikarenakan begitu lamanya masalah ini bergulir padahal listrik adalah kebutuhan yang mendasar. “Tiga puluh hari harus teraliri listrik, tidak boleh dipersulit. Bahkan PLN harus membuat patokan harga seminimal mungkin untuk rakyat jelata, karena mereka bukan objek,” tandas Bambang Haryadi anggota DPR fraksi Gerindra Dapil Jawa Timur IV meliputi Jember dan Lumajang yang sejak awal mengawasi kasus ini. (ray) foto:ry/parle





PEMERINTAH PERLU BANTU MASYARAKAT TERDAMPAK TOL CIPALI

Tol Cikopo-Palimanan atau yang akrab disebut sebagai tol Cipali merupakan ruas jalan tol terpanjang di Indonesia yakni 116,75 kilometer. Dibalik keberadaan tol yang diresmikan Presiden Joko Widodo 13 Juni 2015 tersebut ternyata ada sejumlah permasalahan yang menarik untuk diketahui dan dianalisis sebagai bahan pertimbangan perencanaan kebijakan penyediaan infrastruktur jalan ke depan. Berikut wawancara Parlementaria dengan Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi dari dapil Jawa Barat 8 (meliputi Kab. Cirebon, Kab. Indramayu, Kota Cirebon) .

Yoseph Umar Hadi menjelaskan tol Cipali ini adalah bagian dari membangun 1.000 km jalan tol yang menghubungkan Jakarta-Surabaya. “Sebenarnya sangat terlambat keberadaan Tol Cipali ini. Karena sejak tahun 2006/2007 Komisi V DPR terus mendesak BUJT (Badan Usaha Jalan Tol) agar jalan tol ini segera terealisasi, sudah hampir 7 tahun, dan baru terlaksanakan sekarang,” ungkap Yoseph.

DAMPAK EKONOMI CIPALI

Menurut Yoseph, pembangunan jalan tol ini semestinya sudah selesai sejak lama namun baru dioperasikan lebaran 2015 kemarin. “Akibat keterlambatan pembangunan

jalan tol tersebut, APBN kita selama ini banyak terserap di Pantura. Banyak diberitakan, kenapa pantura ini sering menyerap anggaran begitu besar, bisa lebih dari 1 Triliun. Karena memang kondisi tanah di Pantura itu labil, apabila di Indramayu dan Cirebon banyak sekali sungai, banyak sekali gorong-gorong yang ketika hujan lebat itu sudah pasti banjir dan kedua, gorong-gorong tidak mampu menampung lalu diterjang air kemudian putus. Kerugian ekonomi akibat putusnya jalan pantura itu menjadi sangat besar, kemudian setiap tahun selalu diadakan rehabilitasi perbaikan dan menghabiskan energi anggaran yang besar,” terang Yoseph panjang lebar.

Jadi dampak ekonomi yang menguntungkan dari adanya tol Cipali ini adalah anggaran APBN untuk pantura sudah berkurang. “Dengan adanya jalan tol itu, maka APBN tidak terlalu banyak lagi untuk memelihara di pantura, karena beban kendaraan (kendaraan berat) sudah melewati jalan tol,” tegas Yoseph.

Sejumlah pengendara telah membuktikan, perjalanan Jakarta Cirebon lewat Jalan Tol Cipali hanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam. Sementara bila lewat pantura, Jakarta-Cirebon harus ditempuh dalam tempo sekitar 5-6 jam. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, memperkirakan, jalan tol sepanjang 116,7 km tersebut dapat menurunkan beban kendaraan di

jalur pantura sekitar 40 persen.

Meskipun demikian, Yoseph memberikan catatan bagi Badan Pengelola Jalan Tol yaitu Tol Cipali masih sepi, belum banyak kendaraan besar yang melewati tol ini. Karena bus-bus dan kendaraan berat masih lewat pantura karena biaya yang cukup mahal harganya tol. "Hanya kendaraan pribadi saja yang lebih banyak melewati tol," imbuhnya.

Lebih lanjut Yoseph memaparkan arti penting keberadaan jalan tol manakala terjadi hal-hal yang menghambat perjalanan transportasi di jalan pantura seperti pasar tumpah yang menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan pantura. "Dan tentu dalam upaya kita untuk mempercepat arus lalu lintas, jalan bebas hambatan menjadi suatu kebutuhan. Bebas hambatan itu artinya tidak ada kendala-kendala, seperti pasar tumpah, kendaraan umum yang berhenti sembarangan sehingga membuat kemacetan, keberadaan jalan tol itu menjadi suatu kebutuhan dan keharusan," tandasnya.

Dampak ekonomi lainnya dari keberadaan tol Cipali dapat diukur dari tingkat efisiensi. "Jika sebelum ada tol Cipali dapat ditempuh dalam waktu 5 jam. Dengan adanya tol Cipali maka diperkirakan waktu tempuh 3 jam atau hampir setara dengan waktu tempuh dengan kereta," jelas Yoseph. Efisiensi waktu tempuh tersebut tentunya akan berdampak dengan efisiensi penggunaan bahan bakar.

Dampak ekonomi yang menguntungkan antara lain, di daerah-daerah yang terlewati jalan tol itu menjadi berkembang, seperti kenaikan harga tanah. "Tanah-tanah di pintu-pintu keluar tol menjadi daerah yang cukup berkembang, tidak seperti dahulu. Dulu daerah terpinggir, terpencil sekarang men-

jadi terbuka," terang Yoseph.

Dampak negatif keberadaan tol Cipali terhadap sektor perdagangan khususnya di wilayah pantura juga menjadi perhatian Dewan. "Kegiatan-kegiatan ekonomi penunjang dalam rangka perjalanan itu menjadi berkurang. Seperti di Pantura banyak restoran yang mati, SPBU berkurang penjualannya," kata Yoseph dengan nada prihatin.

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) Cirebon telah menempuh upaya serius guna mengukur dampak ekonomi dari tol Cipali dengan melakukan survey yang dilakukan pada sekitar 1.000 tempat usaha dari berbagai sektor antara lain seperti SPBU dan Restoran terutama yang berada di sepanjang Pantura sampai kepada titik-titik pintu tol.

Survey yang dilakukan tidak hanya menyoroti dampak perekonomian terhadap sektor pariwisata saja, melainkan juga survey sektor perdagangan, khususnya di wilayah Pantura yang menjadi kekhawatiran BI. Pihak BI memprediksi di wilayah keluar masuk pintu tol akan muncul

pusat-pusat perekonomian. Namun yang patut diperhatikan adalah nasib para pedagang yang memiliki modal minim sehingga tidak mampu pindah ke *rest area*. Karenanya Komisi V dengan berkoordinasi dengan Komisi VI dan Komisi IX dapat berkoordinasi guna mendorong pemerintah dan dunia perbankan untuk segera mengucurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada para pedagang yang terdampak.

EMPAT PR CIPALI

Kritik keras atas pengoperasian Jalan Tol Cipali adalah tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Polda Jawa Barat mencatat, sejak diresmikan Presiden Joko Widodo hingga 23 Juni 2015, atau selama 10 hari, terjadi 30 kecelakaan di Jalan Tol Cipali. Sebagian di antaranya menelan korban jiwa. Menurut data Polda Jawa Barat, salah satu titik rawan kecelakaan adalah Km 94 dan mayoritas kendaraan yang mengalami kecelakaan adalah kendaraan yang mengarah ke Cikampek. Sementara dilihat dari jenisnya, kecelakaan yang kerap terjadi di Cipali adalah tabrak belakang dan kecelakaan tunggal.



Anggota Komisi V DPR Yoseph Umar Hadi



Pintu Tol Palimanan

Terkait dengan tingginya angka kecelakaan lalu lintas tersebut, Ketua Komisi V DPR Fary Djemi Francis menegaskan setidaknya ada empat poin untuk perbaikan tol Cipali. Pertama, tol Cipali masih membutuhkan informasi dan penelitian mengenai tingginya angka kecelakaan.

Kedua, perlu penambahan rambu-rambu lalu lintas di beberapa titik jalan tol. “Kami telah memberi masukan dan mengirim jajaran ke sana, terkait peningkatan jumlah rambu-rambu,” terang Fary.

Lebih lanjut wakil rakyat dari Fraksi Gerindra ini menjelaskan PR ke-3 yang harus diselesaikan adalah menyediakan *rest area* yang mencukupi di sepanjang tol Cipali. “Dibutuhkan banyak *rest area* di jalan tol terpanjang di Indonesia itu. Sementara catatan keempat adalah perlu evaluasi audit kemantapan jalan di titik rawan kecelakaan.

Menurut Fary, aspek kesiapan kendaraan yang masuk ke tol Cipali juga perlu diperhatikan. Sebab, dengan panjang jalan mencapai 116 kilometer, kondisi kendaraan harus benar-benar prima. “Jadi, jika ada kendaraan yang memang tidak layak masuk tol Cipali, maka harus ditahan dan tidak boleh masuk. Untuk itu, perlu perencanaan penjagaan kendaraan,” tandas Fary.

Faktor demografi membuat konstruksi jalan tol Cipali dibuat berbelok-belok, mirip aksara S. Sebuah tanjakan diikuti tikungan ke kiri mengakhiri jalanan lurus sepanjang sekitar 90 km dari pintu tol Cikopo, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Tanjakan itu diapit tebing sepanjang kurang lebih 300 meter. Pada tebing sisi selatan, bertengger sebuah batu raksasa yang disebut oleh masyarakat sekitar dengan nama batu Bleneng. Konstruksi jalan tol Cipali yang unik, dengan bentuk jalan yang menikung dan membelah bukit hanya ada di Km 181-182. Lokasi tersebut masuk wilayah Desa Walahar, Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Bagi pelintas Jalan Tol Cipali dari Cirebon ke Jakarta, Batu Bleneng terdapat di sisi kiri sedangkan pelintas dari Jakarta, batu itu ada di sisi kanan. Akibat pemotongan Gunung Salam, Batu Bleneng kini berada di bibir tebing sisi selatan. Terkesan bahwa area terluar pemotongan kurang dari 10 meter dari Batu Bleneng. Pemotongan Gunung Salam menciptakan tebing yang mengapit jalan tol. Kedua tebing itu telah disemen sehingga menutup kemungkinan guguran batu dan tanah ke badan jalan. Panjang masing-masing tebing sekitar 300 meter sedangkan puncak tebing tingginya sekitar 40 meter. Konstruksi jalan tol Cipali inilah yang memerlukan

perhatian khusus untuk mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan pengguna jalan tol Cipali yang berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan lalu lintas di wilayah tol Cipali tersebut.

“Karena itu kami berharap, fasilitas di jalan tol seperti rambu-rambu harus ditambah, seperti kecepatan terendah maupun tertinggi berapa, ada rambu-rambu yang mengingatkan itu. Selain itu juga perlu diberi jalan kejut itu untuk mengingatkan agar terbangun dan mengurangi resiko kecelakaan. Selain itu tempat istirahat dan pengisian BBM masih terbatas baik di kanan maupun di kiri jalan tol. Fasilitas lainnya yang kami harapkan segera tersedia di tol Cipali adalah pohon-pohon karena Tol Cipali terlihat sangat panas sekali,” tegas Yoseph.

Secara filosofis, keberadaan tol Cipali merupakan kebutuhan bagi Indonesia untuk menghubungkan ruas-ruas ekonomi antar kota di Jawa. Kebutuhan secara ekonomis, untuk mengoptimalkan efisiensi, merupakan arti penting dari tol Cipali. Waktu perjalanan yang singkat memenuhi hukum ekonomi terkait perkembangan distribusi, aliran finansial, taraf hidup masyarakat antar kota yang dilalui dan desa-desa disekitar dan berbagai dampak lain dari tol Cipali membuat keberadaannya perlu dioptimalkan dengan meningkatkan berbagai sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar guna menekan dampak negatif yang ditimbulkan. Karenanya dampak negatif yang ditimbulkan tol Cipali akibat keberadaannya yang masih setengah hati, yang dibuktikan dengan masih tingginya angka kecelakaan lalu lintas di wilayah tol Cipali harus segera ditekan seminimal mungkin dengan segera melengkapi berbagai fasilitas yang dibutuhkan bagi pengguna jalan tol. (skr&sc Foto: Iwan Armanias, Naefuroji/Parle/IW



SIDANG APA DI JAKARTA DELEGASI BESAR, HASILNYA OPTIMAL

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf tersenyum lebar ketika menyampaikan kepada wartawan delegasi parlemen dari negara-negara Asia yang datang Sidang APA (*Asian Parliamentary Assembly*) tercatat 105 orang dari 22 negara. Kehadiran pada sidang yang berlangsung 19-20 Agustus ini dianggap terbesar dan tentunya merupakan kehormatan bagi Indonesia khususnya DPR RI sebagai tuan rumah. “Ini delegasi terbesar di *standing committee meeting*, ada 105 anggota parlemen dari 22 negara. Sedangkan kuorum yang telah disepakati cukup dihadiri 7 negara saja. Ini artinya peran DPR dan Indonesia dalam dunia internasional dianggap penting sehingga memerlukan hadir,” kata Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR Nurhayati Ali Assegaf usai upacara pembukaan sidang di Hotel Intercontinental, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Bagi politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini pelaksanaan sidang memiliki makna penting ketika sejumlah negara di Asia sedang menghadapi masalah ekonomi. Ia berharap peserta sidang dapat menghasilkan resolusi yang mendorong pemerintah negara di kawasan Asia untuk dapat meningkatkan kerja sama. “Pertemuan ini sangat menarik karena di Asia sendiri banyak negara yang masih belum satu faham sehingga diperkirakan akan ada perdebatan dalam pembahasan draf resolusi nanti. DPR sendiri akan berupaya memberi warna sesuai kepentingan Indonesia,” ujar dia. Dari data yang disampaikan BKSAP negara peserta sidang diantaranya Cina, Siprus, India, Iran, Jordan, Kazakhstan, Kuwait, Malaysia, Maldives, Pakistan, Palestina dan Thailand. Dua delegasi dipimpin langsung oleh wakil ketua parlemen yaitu Kamboja dan Indonesia.

USUL DPR DITERIMA

Sidang Asian Parliamentary Assembly (APA) Standing Committee on Economic and Sustainable Development menyetujui dua draf resolusi usulan DPR yaitu, *Financial Affairs Ensuring Effort for Economic Growth* dan *The Role of APA Parliaments in adopting SDGs*. Usulan draf resolusi DPR yang bertajuk *The Role of APA Parliaments in adopting SDGs* bahkan disetujui secara bulat oleh seluruh anggota APA. Draf tersebut mendorong negara anggota APA untuk mengevaluasi struktur dan mekanisme internal masing-masing parlemen agar pengarusutamaan SDGs dapat terakomodasi. Demikian disampaikan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon saat memberikan keterangan pers didampingi Ketua BKSAP Nurhayati Ali Assegaf dan Anggota BKSAP Arief Suditomo. Fadli mengatakan, draf tersebut juga menekankan agar parlemen terlibat aktif dalam

beragam aktivitas terkait SDGs, termasuk dalam hal membangun rasa kepemilikan nasional dalam isu SDGs.

Sidang APA *standing committee* tersebut digelar dengan tema *Linking Economic Growth to Sustainable Development for Peace and Prosperity* merangkul beragam pembahasan yang menjadi *concern* parlemen negara-negara di Asia, dua diantaranya usulan DPR. Selain itu, tiga draf usulan lainnya yaitu *Integrated Energy Market in Asia*, *Global Warming* dan *Poverty Eradication*. Fadli menambahkan, DPR mencetuskan ide untuk membentuk dana stabilisasi regional untuk kawasan Asia. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengaman jika seandainya negara-negara di Asia mengalami krisis finansial berkelanjutan. “Langkah tersebut juga sebagai upaya mengurangi pengaruh dana moneter internasional (IMF) yang terkadang sering mencantumkan syarat-syarat yang memberatkan dalam pemberian dana talangan,” katanya.

Ide ini, tambah Fadli, bersamaan dengan usulan DPR lainnya agar Parlemen di Asia dapat menyusun sebuah protokol krisis yang disepakati dalam satu paket resolusi terkait isu financial affairs yang dibahas oleh Parlemen negara-negara se-Asia dalam sidang ini. Dalam isu pasar energi, APA menghasilkan kesepakatan agar Grup Penasehat APA (*advisory Group on Energy*) dapat memperluas aktifitasnya demi pengembangan energi berkelanjutan, sehingga dapat mendukung pencapaian SDGs. Draf *Poverty Eradication* memperjelas beberapa strategi legislasi dalam pengentasan kemiskinan yang keseluruhannya berfokus pada peningkatan IPM, termasuk pada legislasi yang mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Pada bagian lain politisi Fraksi Partai Gerindra ini menambahkan ada sejumlah tantangan yang dihadapi negara-negara Asia saat ini. Per-ekonomian kawasan ini masih menyisakan serangkaian persoalan penting ke depan. Menurut Fadli, serangkaian persoalan ini dapat dilihat semakin tingginya ketimpangan pendapatan masyarakat akan semakin mempersulit upaya pengentasan kemiskinan penduduk. Situasi seperti ini, katanya, jika dibiarkan dapat mengganggu soliditas sosial dan menciptakan keresahan politik, situasi yang pada akhirnya akan menggerogoti kesinambungan

dari 400 juta penduduk perkotaan Asia yang diperkirakan akan mengalami risiko banjir akibat peningkatan permukaan air tanah pada tahun 2025. Selain itu, tambahnya, diperkirakan 35% emisi karbon yang berkaitan dengan penggunaan energi dunia dihasilkan oleh negara-negara di kawasan Asia, angka yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan emisi yang sama pada tahun 1990 yang hanya mencapai 17%. Fadli mengatakan, pembangunan yang berkelanjutan merupakan prasyarat bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi dan pengurangan tingkat kemiskinan,



Wakil Ketua DPR Fadli Zon memimpin pertemuan bilateral dengan delegasi Tiongkok

pertumbuhan ekonomi itu sendiri dalam jangka panjang. Pendek kata, tantangan pertumbuhan ekonomi yang masih belum sepenuhnya inklusif merupakan pekerjaan rumah besar kawasan ini. Selain itu, agenda tujuan pembangunan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pertumbuhan ekonomi kawasan ini pun masih menjadi persoalan yang harus segera dikelola dengan kemauan politik yang semakin besar.

Sebagaimana diketahui, cadangan sumber daya alam mineral penting dan migas akan menyusut menjelang tahun 2050. Tantangan berat yang harus dikelola bersama-sama juga menyangkut nasib lebih

langkah-langkah nyata dan bersifat terobosan dalam serangkaian upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim kiranya perlu diintegrasikan ke dalam strategi dan perencanaan pembangunan kawasan ini. “Upaya ini semua tentunya diarahkan, tidak hanya untuk mengurangi beban biaya yang semakin besar jika terlambat menanganinya tapi yang lebih penting adalah untuk mengawal Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Global,” kata Fadli.

BERTEMU PARLEMEN TIONGGOK

DPR RI meminta Parlemen Tiongkok memberi perhatian dan jaminan agar investasi di Indonesia tidak diembel-embeli keharus-

an menerima tenaga kerja level pekerja dari negara tirai bambu tersebut. Hal ini menjadi bahasan dalam pertemuan bilateral parlemen dua negara disela-sela sidang Komisi Tetap Masalah Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan Asian Parliamentary Assembly (APA) di Jakarta 19-20 Agustus. “Saya konsen sekali pada pemberitaan yang menyebut investasi Tiongkok di Indonesia harus dengan syarat memberi lapangan kerja bagi buruh murah atau pekerja kasar dari sana. Tadi kami sampaikan secara blak-blakan kepada Parlemen Tiongkok agar memperhatikan hal ini, karena itu akan membahayakan lapangan kerja bagi warga negara Indonesia,” kata anggota BKSAP Charles Honoris usai pertemuan.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini menyebut sangat menghargai keinginan Tiongkok untuk meningkatkan kerja sama ekonomi, melakukan investasi pada sejumlah proyek infrastruktur di Indonesia. Namun kerja sama hendaknya dilakukan dengan mengedepankan prinsip saling menguntungkan dan aturan hukum yang jelas. Anggota delegasi Indonesia yang cukup aktif menyampaikan pendapatnya dalam persidangan komisi tetap APA ini, juga menyambut baik ajakan untuk membangun sinergi pada program *silk road* maritim yang sedang dikembangkan pemerintahan Tiongkok. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Indosia yang juga mengedepankan pembangunan kamartiman.

“Nah pada kesempatan pertemuan saya juga memimpa parlemen Tiongkok untuk peduli pada isu penegakan hukum di wilayah laut. Indonesia saat ini sangat *concern* pada masalah *illegal fishing* dan siap bertindak tegas sesuai rambu-rambu hukum yang ada,” tekannya. Ketua Delegasi Tiongkok Zhao Baige menerima sejumlah masukan

yang disampaikan delegasi DPR. Terkait isu buruh murah Tiongkok yang didatangkan ke Indonesia, ia berjanji akan membahasnya di dalam negeri termasuk membicarakan dengan pemerintahnya.

NUANSA INDONESIA

Setiap menjadi tuan rumah sidang parlemen internasional DPR selalu membawa misi mempromosikan budaya dan pariwisata Indonesia. Ini yang dilakukan ketika Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen - BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf menggelar acara *Welcome Reception* untuk menyambut kehadiran anggota parlemen dari 22 negara di Asia. Ia secara khusus menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh anggota delegasi peserta sidang *standing committee* Bidang Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan, Asian Parliament Assembly (APA) yang akan berlangsung 19-20 Agustus nanti.

“Selamat datang di Jakarta, Indonesia. Selamat mengikuti persidangan yang kita harapkan dapat menjadi langkah kita menemukan solusi terbaik bagi pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia. Di Jakarta ini kadang kita tidak perlu bicara banyak, biarkan makanan yang menjadi kekayaan kuliner kita yang bicara,” ujarnya.

BKSAP selaku panitia pelaksana juga menyajikan menu khas Indonesia seperti gado-gado, iga bakar khas Makasar serta sejumlah jajanan pasar seperti kelepon. Anggota delegasi Bangladesh Dilara Begum mengaku sangat menikmati sajian dan keramahan sambutan selamat datang yang diterimanya dalam *Welcome Reception* terse-



Delegasi Sidang APA mencoba goyang dangdut

but. Sejumlah delegasi seperti dari Palestina dan Siprus juga terlihat mengenakan busana batik khas Indonesia.

Nuansa Indonesia lainnya adalah ketika anggota delegasi diajak untuk mencoba bergoyang dangdut. Momen ini terjadi ketika penyanyi dari Orkes Keroncong Tugu yang sedang membawakan lagu Kopi Dangdut versi keroncong mengajak delegasi dari Siprus untuk mencoba bergoyang dangdut bersamanya. Gayung bersambut Mrs Stella Mishiaouli Demetriou anggota parlemen dari Siprus ini segera bangkit dan dengan gaya sedikit kaku mencoba mengikuti goyang dangdut penyanyi perempuan di sampingnya. Aksi ini mendapat apresiasi tepuk tangan dari hadirin yang memenuhi ruang restoran. “Ternyata goyang dangdut itu menyenangkan ya, saya sebenarnya juga suka bergoyang tapi kalau di Siprus gerakannya banyak dipengaruhi budaya Latin,” kata Stella. Keberanian anggota delegasi Siprus nampaknya membuat tuan rumah merasa sungkan untuk tidak ikut bergoyang dangdut. Akhirnya Fadli Zon bersama anggota delegasi lain seperti Melani Leimena Suharli, Teguh Juwarno serta peserta sidang APA lain sama-sama mencoba bergoyang dangdut. Ini seperti melepas ketegangan ketika berdebat membahas dua draf resolusi beberapa jam sebelumnya. (tt/iky) Foto: Iwan Armanias/Parle/IW



GLENN FREDLY **Terus Jalankan** **Kontrol Sosial**



Hati gelisah, Melihat diri merana...

Apa kau rasa hal yang sama..

Musim berganti, Alam tak lagi berseri, Teriknya panas menjadi...

Apakah kita peduli..Demi masa depan nanti, Dunia rumah kita sendiri...

Ya petikan lirik lagu “Sayang Bumi Hari ini” karya Glenn Fredly ini seolah menjadi curahan hati akan kegalauannya selama ini melihat

alam yang kerap menjadi “korban” pembangunan dan modernisasi. Ditemui Ayu dan Rizka dari Parlemenaria usai Konferensi Pers film “Surat dari Praha” yang diproduserinya sendiri, pria kelahiran Jakarta 30 september 1975 ini menceritakan ikhwal kegalauannya tersebut.

“Lagu itu merupakan bentuk keprihatinan saya akan kondisi lingkungan dan alam Indonesia yang terus di eksploitasi atas nama pembangunan, tapi malah menjadi “korban” dari pembangunan itu sendiri,” jelas Glenn.

Kepedulianya terhadap lingkungan

an itu tentu tidak hanya diungkapkan melalui musik semata, beberapa kali ia pun terlibat langsung dalam beberapa “gerakan” penyelamatan alam, sebut saja *Save Aru*, *Bali Tolak Reklamasi*, dan gerakan *Jogja ora didol*.

Menurutnya pembenahan infrastruktur, membangun ekosistem, investasi, yang akhirnya akan menghasilkan pajak negara semua itu memang dilakukan untuk kebutuhan masyarakat. Namun tentunya semua itu harus dilakukan lewat *eco friendly*.

Jakarta misalnya dengan sederet permasalahannya tidak bisa lagi dilihat secara parsial. Satu sisi menurutnya, kondisi ibukota ini secara konstruksi menggambarkan akan tenggelam pada tahun 2050 akibat banyaknya gedung tinggi yang minim penyerapan, *plus* sungai yang sudah beralih fungsi. Kebutuhan masyarakat di area tempat tinggal yang layak huni, dan kebutuhan akan air bersih. Secara bersamaan juga memikirkan bagaimana keberadaan masyarakat. Kebijakan yang dibuat akan bersinggungan dengan kepentingan sosial masyarakat yang semakin kompleks. Misalnya masalah penggusuran dalam pembuatan tanggul, bisa menjadi polemik politik.

“Nah,disinilah media berperan dalam menyampaikan hal yang faktual, untuk menjadi kajian agar masyarakat bisa menilai dan mendapatkan informasi yang baik. Oleh karena itu menurut saya butuh sinergi antara *stake holder*, pemerintah, DPR (baik DPRD maupun DPR RI), masyarakat dan juga media untuk dapat bersama-sama menjawab dan menemukan solusi atas permasalahan yang kompleks itu,” ujarnya.

KONTROL SOSIAL

Sangat peduli terhadap lingkungan

sosial dan alam, serta memahami perpolitikan dalam negeri, sejatinya bisa menggiringnya untuk masuk ke panggung politik tanah air, baik sebagai anggota legislatif maupun duduk dalam pemerintahan. Namun ia mengaku tidak pernah berniat, bermimpi dan berkeinginan untuk masuk ke dunia politik. Baginya sangat menyenangkan dan memberikan kepuasan tersendiri ketika ia mampu memberikan kontribusi yang nyata diluar sistim, ketimbang berada dalam sebuah sistim yang harus memulai dari nol lagi dan malah akhirnya tidak dapat melakukan apa-apa.

Lewat musik dan film ia bisa mengekspresikan segala yang dilihat, dialami dan dirasakannya, baik itu suka ataupun duka. Bahkan saat pemilihan Presiden 2014 lalu lewat musik pemilik nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamallo ini pun mampu mempengaruhi masyarakat untuk mendukung salah satu capres nya.

“Jika kita bisa *support* orang-orang yang bisa berbenah dan bisa kita masukkan kedalam sistim kenapa tidak?” jelasnya.

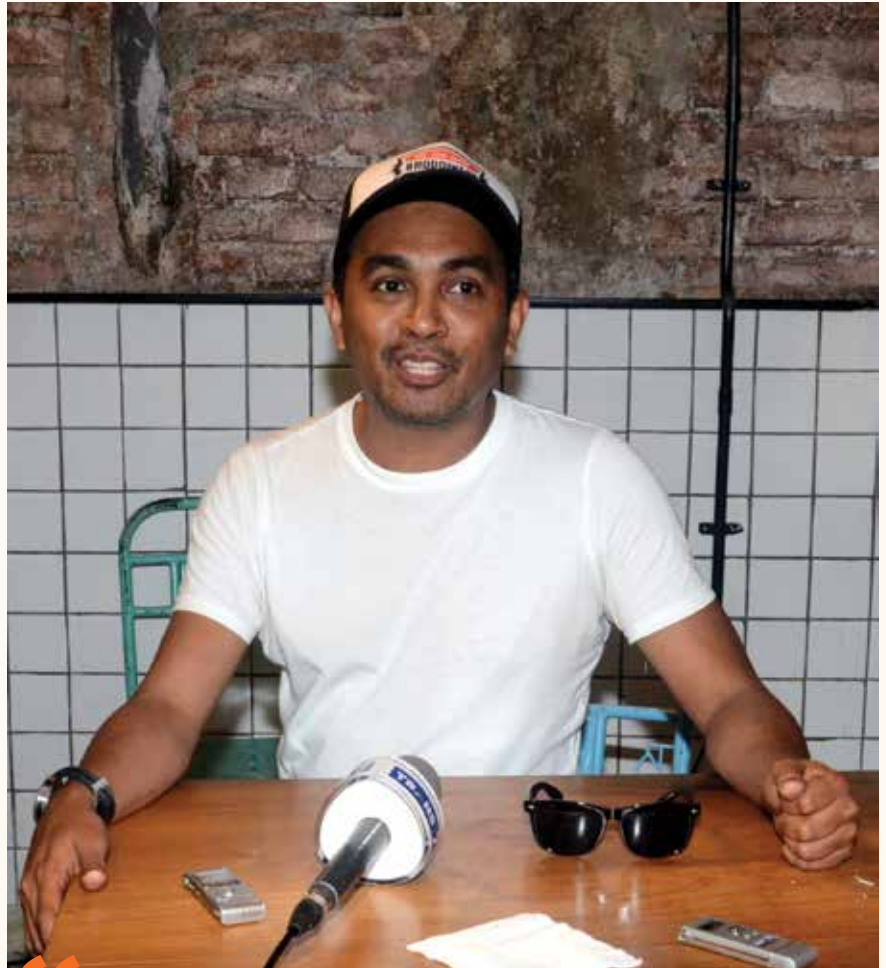
Dan ketika Jokowi telah menjadi Presiden, bukan berarti lepas begitu saja, putra dari Hengky David Latuihamallo dan Linda Siahaya Latuihamallo ini mengatakan masyarakat masih harus berperan disini. Masih ada kontrol sosial yang harus terus berjalan, termasuk kontrol dirinya sebagai masyarakat terhadap para pemimpin baik di eksekutif maupun legislatif. Bagaimana pembuktian dalam janji-janji saat kampanye.

“Biarlah waktu yang menjawab bagaimana peran mereka dimasyarakat. Dan masyarakat pun semakin cerdas dan semakin *aware* melihat dan mengamati setiap persoalan,” ungkapnya.

KARIR MUSIK

Karir di dunia seninya diawali pada tahun 1990-an ketika ia bergabung dalam grup band *Funk Section*, tahun 1995 grup ini meluncurkan al-

Tiga tahun berikutnya ia kembali mengeluarkan album terbarunya berjudul *Selamat Pagi, Dunia*. Lagu Januari dalam album tersebut sempat menduduki deretan lagu teratas berbagai radio dan stasiun TV. Tidak



“MASIH ADA KONTROL SOSIAL YANG HARUS TERUS BERJALAN, TERMASUK KONTROL DIRINYA SEBAGAI MASYARAKAT TERHADAP PARA PEMIMPIN BAIK DI EKSEKUTIF MAUPUN LEGISLATIF”

bum. Selang tiga tahun kemudian, ia mengeluarkan album solo bertajuk Glenn yang berisikan delapan buah lagu. Pada tahun 2000 ia kembali mengeluarkan album solo keduanya bertitle Kembali. Glenn kemudian merambah ke dunia layar lebar dengan memproduseri sejumlah film, seperti film *Cahaya Dari Timur: Beta Maluku*, *Filosofi Kopi*, dan terakhir yang akan segera beredar film *Surat Dari Praha*.

hanya itu penjualan album tersebut pun cukup memuaskan. Bahkan pada tahun 2004 pihak Sony Music Indonesia yang menaunginya membuat album *repackage*. Akibat kesertaannya di dunia musik itu ia dianugerah beberapa penghargaan salah satunya Anugerah Musik Indonesia sebagai lagu terbaik dan penyanyi lagu terbaik kategori musik R&B.

(Ayu) Foto: Rizka, Ist/Parle/IW



Corey Kilpatrick dan Edmee Kenny ikut Pesta Rakyat di DPR

PESTA RAKYAT DPR, BAGUS

Ia berteriak, sekali waktu terlihat sedikit melompat, tangannya mengepal. Sepertinya gemas ketika menyaksikan para peserta lomba panjat betung merosot sebelum mencapai puncak. Itu ekspresi Edmee Kenny warga Australia yang turut menyaksikan acara Pesta Rakyat dalam rangka HUT RI ke-70 di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, beberapa waktu lalu. Pesta Rakyat yang digelar DPR benar-benar menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang ke gedung parlemen yang pada hari kemerdekaan tampil berbeda. Pada hari biasa penuh dengan persidangan tetapi pada hari istimewa ini, masyarakat tumpah ruah menyaksikan beragam kegiatan, menyemarakkan peringatan kemerdekaan.

“Wah saya menikmati kegiatan yang dilaksanakan di gedung parlemen

Indonesia ini, DPR ya. Saya tadi lihat panjat pinang eh betung terus menyaksikan lomba catur simultan, puluhan orang melawan anggota DPR yang *grand master* catur. Bagus ya, Pesta Rakyatnya bagus,” kata Edmee. Lomba catur yang dimaksudnya adalah pertandingan anggota Komisi X DPR Utut Adianto dengan sejumlah penantangannya. Edmee Kenny datang ke Gedung DPR bersama temannya Corey Kilpatrick yang telah berada di Indonesia selama satu tahun mengikuti program Australian Volunteers for International Development (AVID). Ia sudah tinggal menghitung hari sebelum kembali ke negaranya Australia. Ketika mendapat informasi tentang Pesta Rakyat di DPR, ia dengan antusias ingin menontonnya.

Edmee tidak sendiri, Pesta Rakyat

sehari penuh itu mengubah wajah gedung parlemen. Masyarakat tumpah mengikuti aneka lomba, panjat betung, lomba gerak jalan indah, catur simultan menghadapi *Grand Master* Utut Adianto yang juga anggota Komisi X DPR, ada juga lomba menggambar dan tentu saja hiburan rakyat sajian musik dangdut yang mengajak semuanya bergoyang. Menurut Ketua DPR Setya Novanto peringatan hari kemerdekaan harus menjadi harinya rakyat. Semua anggota masyarakat dengan bergairah datang mengikuti upacara bendera baik di sekolah, di kantor bahkan di lingkungan perumahan. DPR secara khusus juga menggelar upacara HUT RI dengan pembina upacara Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Upacara ini juga diikuti oleh sejumlah anggota dewan dengan sukarela, dengan semangat bersama mengenang perjuangan



Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan sambutan didampingi Jaya Suprana

para pahlawan bangsa. Anggota Komisi I Darizal Basri yang mengikuti jalannya upacara bendera di Gedung DPR mengaku terkesan.

“Saya merasa upacara bendera di halaman gedung DPR ini sangat mengesankan. Ini yang pertama kali diikuti oleh anggota DPR bersama karyawan Setjen, baik sekali pesan yang mengemuka dalam upacara ini di depan bendera merah putih kita sama-sama mengucapkan tekad, negara yang sudah diperjuangkan para pahlawan ini harus kita bangun menjadi lebih baik. Jadi saya rasa upacara bendera bersama ini positif, patut dilanjutkan di masa akan datang,” kata wakil rakyat dari daerah pemilihan Sumbar I ini.

Peringatan kemerdekaan khas Indonesia memang tidak lengkap tanpa pesta ala rakyat, mengusung aneka lomba asli Indonesia seperti panjat betung, pacu karung, makan kerupuk dan lain sebagainya. Sebagian dari lomba itulah yang dibawa ke gedung rakyat di Senayan. Ada sinergi juga disana karena beragam hadiah mulai dari perangkat elektronik sampai sepeda motor merupakan hasil *urunan* anggota dewan. “Nah ini menarik perlu saya sampaikan hadiah Pesta Rakyat ini bukan diambil dari anggaran dewan atau anggaran setjen tetapi hasil

sumbangan dari pimpinan dewan, anggota dan semua fraksi yang ada di DPR. Hal seperti ini membuktikan pimpinan, anggota DPR ingin selalu bersama rakyat, menikmati kemerdekaan bersama rakyat. Saya harap tahun selanjutnya ada ide-ide lain yang lebih semarak,” tutur dia.

REKOR MURI

Lomba panjat betung dalam Pesta Rakyat kali ini menjadi lebih istimewa karena dilengkapi dengan penyerahan rekor MURI oleh langsung dari pendirinya Jaya Suprana. Ia menyebut lomba panjat betung kali ini adalah yang pertama dan terbanyak di dunia khusus dianugerahkan kepada DPR RI. Baginya pilihan menggunakan batang bambu ini jelas lebih pro lingkungan karena berbeda dengan pinang yang semakin langka, bambu sangat banyak dan mudah dibudidayakan. Tokoh kelirumologi ini juga mengemukakan aneka lomba dalam pesta rakyat ini tidak ada relevansinya dengan peringatan kemerdekaan.

“Saya cuman bisa mengelus dada ada yang punya pendapat itu. Dewan Perwakilan Rakyat sudah membuktikan, bahwa ada niat baik disini. Coba yang mengatakan bahwa lomba panjat bambu betung itu

tidak ada relevansinya dengan kemerdekaan, cobalah ngomong sama rakyat langsung. Mohon maaf yang bicara itu apa buta, atau malah apa tuli, lihat saja rakyat disini begitu bergembira dengan diadakannya acara seperti ini. Saya terharu dulu saya ingin bertemu dengan Pimpinan DPR sangat-sangat susah, dan saya pernah dicegat polisi, dipentungin sekarang pimpinan berbaur di acara ini bersama rakyat,” tekan dia.



Ketua DPR Setya Novanto memberi semangat

Wakil ketua DPR Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada Museum Rekor Indonesia yang telah memberikan penghargaan rekor Lomba Panjat Betung 70 batang, sama dengan usia kemerdekaan Indonesia. Ia sendiri mengaku terharu melihat betapa antusiasnya masyarakat, berkumpul di Gedung DPR. “Saya baru pertama kali melihat Pesta rakyat seperti ini, karena pesta rakyat ini ada di rumah rakyat. Rakyat begitu gembira mengikuti tradisi ini dan ini perlu terus kita lakukan setiap tahun,” ujarnya. Tidak hanya aneka lomba, Pimpinan DPR juga menikmati aneka jajanan pasar dan makanan khas Indonesia seperti ketupat sayur, bakso bersama warga masyarakat. Lebih menarik semua makanan hari itu, gratis. Wah enaknyanya. (spy/iky) Foto: Jaka/Parle/IW



NORWEGIA SEBAGAI MODEL NEGARA KESEJAHTERAAN DI DUNIA



Oleh Sasmitaningtyas P. L, Sa'dan Mubarak, Tita Adelia (Peneliti pada CEPP FISIP UI)

Pada awal abad ke-20 Norwegia termasuk dalam kategori negara miskin dan tertinggal di Kawasan Eropa. Kini, Norwegia bertransformasi dari negara miskin menjadi negara paling mapan di dunia berdasarkan tiga indikator utama yaitu; aspek ekonomi makro, aspek pembangunan manusia, dan aspek demokrasi. Pencapaian Norwegia sebagai model negara kesejahteraan terbaik di dunia adalah hasil sebuah perencanaan politik melalui serangkaian kebijakan publik. Kesuksesan Norwegia menciptakan model kesejahteraan merupakan hasil keputusan politik yang melibatkan pemerintah eksekutif dan storting atau parlemen.

Potret Politik Norwegia

Norwegia merupakan negara monarki konstitusional yang terletak di kawasan Eropa Utara. Bersama dengan Swedia dan Denmark negara ini disebut sebagai Skandinavia. Norwegia memiliki sistem pemerintahan parlementer yang

mana terdapat Perdana Menteri dan Presiden Storting sebagai kepala pemerintahan dan Raja sebagai kepala negara. Adanya dua posisi yang memegang kekuatan legislatif sekaligus menjadi keunikan dari sistem pemerintahan Norwegia. Namun yang membedakan adalah posisi perdana menteri sebagai

representasi raja dalam pemerintahan yang membawahi Kabinet sedangkan posisi Presiden Storting yang membawahi anggota parlemen. Sistem unik ini tidak serta merta menjadikan Norwegia sebagai negara bikameral, karena sejak tahun 2009 sistem parlemen Norwegia berubah menjadi unikameral.



Gedung Stortinget di Oslo

Dalam menjalankan fungsi legislasi, storting tidak berbeda dengan parlemen dunia lainnya termasuk Indonesia. Rancangan undang-undang dapat diusulkan baik oleh pemerintah maupun oleh anggota dewan. Seorang juru bicara dipilih untuk menjelaskan RUU yang diajukan, kemudian masukan dari seluruh pihak dikumpulkan dan dibuat rekomendasinya untuk dilanjutkan menjadi UU atau dihentikan. Dalam mengambil keputusan terhadap suatu RUU, separuh dari total anggota dewan wajib hadir dan memilih (setuju/ tidak) terhadap suatu RUU.

Stortinget dipimpin oleh enam pimpinan dewan; yang terdiri dari seorang ketua dewan dan lima orang wakil dewan. Dalam Stortinget terdapat 12 komisi dengan jumlah anggota bervariasi antara 8 – 18 orang. Mekanisme penempatan

anggota didistribusikan secara proporsional antara partai pro pemerintah dan partai oposisi. Adapun kedua belas komisi storting adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Komisi di Stortinget
(Parlemen Norwegia)

Nama Komisi
Komisi Bisnis dan Industri
Komisi Pendidikan, Penelitian dan Gereja
Komisi Energi dan Lingkungan
Komisi Keluarga dan Budaya
Komisi Keuangan dan Ekonomi
Komisi Hubungan Luar Negeri dan Pertahanan
Komisi Kesehatan
Komisi Hukum
Komisi Buruh dan Hubungan Sosial
Komisi Pemerintah Lokal dan Administrasi Publik
Komisi Pengawasan dan Konstitusi
Komisi Perhubungan dan Komunikasi

Sumber: <https://www.stortinget.no/en/In-English/Stottemeny/Sitemap/>

Sebagai sebuah negara yang mengadopsi model kesejahteraan, kebijakan publik yang dihasilkan oleh Storting pada dasarnya memiliki ciri-ciri berikut ini:

1. Menciptakan sistem pajak yang tinggi antara 40-60% yang ditujukan pemerataan pendapatan. Bagi pembayar pajak akan diberikan beberapa keuntungan seperti pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis. Hasil pendapatan pajak akan digunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan publik.
2. Kebijakan investasi publik diarahkan kepada pembangunan manusia melalui pendidikan dan kesehatan. Arah kebijakan ini yang membuat tingkat pendidikan Norwegia mencapai angka

sempurna 100% serta tingkat harapan hidup rakyat Norwegia menjadi salah satu yang tertinggi di dunia.

3. kebijakan pertumbuhan ekonomi diarahkan kepada ekonomi makro.
4. Kebijakan tenaga kerja yang bersifat flexicurity yang mana kebijakan diarahkan untuk upah kerja yang maksimum dengan mendorong produktifitas kerja yang tinggi. Kebijakan ini juga berupaya untuk menciptakan lapangan kerja yang besar guna menekan angka pengangguran
5. Menciptakan kebijakan ekonomi yang terbuka dan ramah terhadap kompetisi dalam hal perdagangan.

Kunci utama keberhasilan undang-undang yang dihasilkan oleh Storting dalam mewujudkan model negara kesejahteraan terletak pada orientasi kebijakan publik yang benar-benar memprioritaskan kepentingan publik sehingga tidak ada bias kepentingan. Hal ini yang jarang sekali ditemukan di negara lain yang mana negara tidak lagi otonom. Pemerintah maupun parlemen tidak lagi berpihak terhadap kepentingan publik akibat pengaruh kepentingan segelintir kelompok kepentingan. Selain itu, Storting bersama-sama dengan pemerintah menggunakan prinsip pemerataan, kesetaraan, keadilan, egaliter, dan sosialisme dalam merumuskan sebuah kebijakan publik.

Keberpihakan Storting terhadap kepentingan publik serta prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan di sektor ekonomi, sosial masyarakat, dan sosial politik menghasilkan sebuah rekayasa kehidupan sosial yang sangat maju dan modern yang dapat dilihat melalui tabel di bawah ini:



Tabel 2

Tiga Indikator Norwegia sebagai Model Negara Kesejahteraan Terbaik di Dunia

Aspek Ekonomi Makro		
Pendapatan Perkapita	US\$ 97.000 (2nd)	2014
Indeks Gini	22,7	2013
Aspek Pembangunan Manusia		
Indeks Pembangunan Manusia	0,944 (1st)	2014
Tingkat Harapan Hidup	81 Tahun	2014
Tingkat Pendidikan	100%	2014
Aspek Demokrasi		
Indeks Demokrasi	9,93 (1st)	2014
Indeks Integritas Pemilu	87 (1st)	2013

Sumber: Tim Penulis

Dalam aspek ekonomi makro, Norwegia merupakan negara dengan pendapatan perkapita terbesar kedua di dunia berdasarkan data IMF dan World Bank sekaligus memiliki tingkat kesenjangan yang rendah berdasarkan skor indeks gini. Dalam aspek pembangunan manusia, Norwegia merupakan negara dengan indeks pembangunan manusia tertinggi di dunia sehingga tidak heran apabila kualitas dan standar pendidikan dan kesehatan sangat tinggi. Dalam aspek demokrasi, Norwegia merupakan negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia berdasarkan ranking yang dibuat oleh *Economist Intelligence Unit's* dan juga berdasarkan indeks integritas pemilu (*electoral integrity index*) yang dibuat oleh *Harvard Kennedy School of Government*.

Untuk melihat sejauh mana implementasi kebijakan publik yang berorientasi kepada kepentingan publik, penulis akan menjelaskan dua kebijakan yaitu pertama kebijakan terkait isu pemberdayaan keluarga, anak, dan perempuan sebagai upaya untuk membangun manusia. Kedua, kebijakan manajemen sumber daya alam yaitu *petroleum fund* yang digunakan untuk mensejahterakan rakyat Norwegia.

KEBIJAKAN TERKAIT ISU PEMBERDAYAAN KELUARGA, ANAK, DAN PEREMPUAN.

Kebijakan keluarga merupakan bagian esensial dari kebijakan di negara kesejahteraan Skandinavia termasuk Norwegia. Dalam model kesejahteraan norwegia (*Norwegian Welfare State Model*), disadari bahwa reformasi dalam kebijakan keluarga dapat memberikan benefit dalam perekonomian di Norwegia. Kombinasi unik antara partisipasi kekuatan kerja yang tinggi dan angka kelahiran yang tinggi adalah faktor krusial bertahannya performa ekonomi Norwegia yang baik. Dimulai dari tahun 1998 ketika *Storting* menempatkan kebijakan *child care* yang bersifat lebih progresif dibanding Negara-negara Skandinavia yang lain, hingga pada puncaknya tahun 2009 dengan masuknya agenda *political fatherhood* yang menempatkan Norwegia pada posisi teratas perihal *gender advancement*.

Reformasi dalam kebijakan keluarga ini tidak lepas dari semangat kesetaraan gender yang dimiliki Norwegia. Negara-negara Skandinavia memang merupakan pionir dalam memasukkan perspektif gender dalam menentukan kebijakan keluarga, dengan tujuan mencapai kesetaraan antara partisipasi perempuan dan laki-laki di ranah publik. Semangat kesetaraan gender ini lahir dari karakteristik negara kesejahteraan yang dimiliki oleh negaranegara di wilayah Skandinavia. Tipe rezim sosial-demokratik merupakan tipe yang dimiliki oleh negara-negara Skandinavia dalam berbagai macam kategori negara kesejahteraan.

Penekanan pada universalisme, peran negara yang kuat, integrasi kebijakan ekonomi dan sosial serta prioritas penghapusan pengangguran merupakan karakteristik

dari tipe rezim Sosial-Demokratik Norwegia. Kesetaraan gender di negara-negara kesejahteraan Skandinavia merupakan bagian sentral dari citra politik mereka. Negara-negara tersebut terkenal dengan potensi woman-friendly dimana potensi tersebut terkait dengan political presence perempuan serta integrasi perempuan dalam *working force* yang relatif tinggi.

Negara yang memiliki karakter *woman-friendly* tidak akan memaksakan pilihan yang lebih sulit kepada perempuan dibandingkan dengan laki-laki, atau mengizinkan perlakuan tidak adil berdasarkan pada jenis kelamin. Di negara *woman-friendly* perempuan akan melanjutkan perannya untuk memiliki anak, namun tetap terbuka jalan-jalan lain untuk merealisasikan diri. Di negara tersebut perempuan tidak harus memilih masa depan yang meminta pengorbanan lebih banyak daripada apa yang diharapkan kepada laki-laki. Secara singkat, negara tersebut akan menjadi negara dimana ketidakadilan yang berdasar pada gender akan sebagian besar lenyap tanpa pertambahan ketidakadilan dalam bentuk lain, seperti yang terjadi pada beberapa kelompok perempuan.

Dalam negara-negara kesejahteraan di Skandinavia, perihal keluarga dan pengurusan anak telah lama ikut diatur oleh negara. Peran pengurusan anak yang pada awalnya adalah urusan privat yang antara orang tua dan anak, kemudian turut pula diatur oleh negara. Hal ini disebut oleh Ellingsaeter sebagai *politicizing parenthood* atau politisasi kedudukan sebagai orang tua. Norwegia mengadopsi kebijakan kesejahteraan universal (*universal welfare policies*) yang memperluas tanggung jawab publik untuk tugas-tugas reproduksi seperti mengurus anak dan manula.

Peran perempuan sebagai *citizen the carer* dicoba dialihkan menjadi *citizen the wage-earner* dengan difasilitasinya pengurusan anak oleh Negara agar perempuan dapat berpartisipasi di ranah publik, sebagaimana laki-laki berpartisipasi. Hal ini memiliki kaitan erat dengan perspektif gender dalam praktek politik kewarganegaraan, dimana dikotomi publik dan privat sudah tidak lagi menjadi tembok yang membatasi perempuan dalam partisipasinya di ranah publik.

KEBIJAKAN MANAJEMEN SUMBER DAYA ALAM BERUPA UU GOVERNMENT PETROLEUM FUND

Norwegia menyadari bahwa sumber daya alam yang terkandung di perut bumi berupa minyak dan gas bumi memiliki keterbatasan jumlah. Mereka berpikir bahwa minyak dan gas bumi tidak hanya bermanfaat untuk generasi sekarang, melainkan juga untuk generasi masa depan. Oleh karena itu, sejak tahun 1974 Storting bersama pemerintah mencari formula yang sesuai untuk mengatur pemanfaatan penghasilan dari produksi minyak dan gas bumi. Mereka menyadari bahwa memanfaatkan penghasilan minyak dan gas bumi dalam sektor konsumtif tidak memiliki efek jangka panjang. Terlebih harga minyak dunia terus berfluktuasi menyesuaikan dengan dinamika *supply-demand* dan kondisi geopolitik yang kerap menurunkan harga minyak bumi.

Pada akhirnya tahun 1983, komite sementara Storting yang dipimpin oleh mantan Gubernur Bank Sentral Norwegia, Hermod Skånland menyampaikan laporan yang berisi pembentukan dana yang memungkinkan pemerintah dapat menyektor sebagian pendapatan minyak dan gas bumi untuk dan kemudian dimanfaatkan melalui mekanisme tertentu. Ini yang melatarbelakangi disahkannya Undang-Undang

Government Petroleum Fund oleh Storting pada tahun 1990 yang mendukung manajemen pemanfaatan penghasilan minyak dan gas bumi. Enam tahun kemudian, Kementerian Keuangan Norwegia menyetorkan sebanyak 46 miliar Krone Norwegia sebagai *Government Petroleum Fund*.



Dana yang setorkan oleh Kementerian Keuangan yang diberikan kepada Bank Sentral Norwegia sebagai pengelola Manajemen Investasi setiap tahunnya dapat mencapai 60% dari total pendapatan minyak dan gas bumi sehingga pada tahun 2005 dana *Government Petroleum Fund* telah mencapai 1.784 miliar Krone Norwegia atau setara dengan 100 miliar dollar AS. Pada tahun yang sama Storting mengesahkan perubahan Undang-Undang pengganti *Government Petroleum Fund* menjadi *The Government Pension Fund Global*. Perubahan undang-undang menyebabkan porsi dana ekuitas mengalami peningkatan dari 40% menjadi 60% dari total dana abadi. Porsi dana komersial menjadi 35% dan sisanya sebanyak 5% merupakan dana *real estate*.

Kebijakan ini menyebabkan peningkatan yang sangat signifikan dalam hal total aset dana abadi terlebih dipicu oleh kenaikan harga minyak dunia sepanjang periode 2004-2015 yang rata-rata meningkat dari 30

dollar AS per barel menjadi 75 dollar AS per barel. Tidaklah mengherankan apabila pada tahun 2012 jumlah aset dana abadi mencapai 3.816 miliar Krone Norwegia atau setara dengan 648 miliar dollar AS. Jumlah aset dana abadi terus meningkat pada tahun 2015 yang menembus angka 6.800 miliar Krone Norwegia atau setara dengan 1.150 miliar dollar AS. Pada tahun 2015 jumlah dana abadi minyak dan gas bumi telah mencapai dua kali lipat dari Pendapatan Domestik Bruto Norwegia atau setiap warga negara Norwegia memiliki aset sebanyak 220.500 dollar AS.

Jumlah aset *The Government Pension Fund Global* telah mencapai 1% dari total aset global yang diinvestasikan ke lebih dari 8.000 perusahaan dunia. Pemerintah Norwegia hanya memanfaatkan maksimal 4% dari total aset setiap tahunnya yang masuk ke dalam APBN. Keberhasilan Pemerintah Norwegia dalam membangun model kesejahteraan dengan memanfaatkan penghasilan minyak dan gas bumi tidak terlepas dari peran besar Storting. Model kesejahteraan dalam manajemen sumber daya alam yang dilakukan oleh Norwegia menginspirasi banyak negara sesama produsen minyak dan gas bumi seperti Arab Saudi, Qatar, Kuwait, dan Timor Leste. Sayangnya kebijakan ini tidak diimplementasikan di Indonesia yang memiliki jejak rekam yang sangat lama dalam mengelola penghasilan minyak dan gas bumi. Oleh karena itu, sudah saatnya DPR RI memikirkan manajemen sumber daya alam khususnya migas dengan menerapkan model kesejahteraan yang sesuai dengan karakteristik Indonesia. Model kesejahteraan yang dapat mengkonversi penghasilan dari produksi minyak dan gas bumi dalam jangka panjang yang tidak hanya dirasakan manfaatnya oleh generasi sekarang, melainkan yang lebih penting untuk generasi anak cucu kita, generasi masa depan. ■



LEBIH MERAKYAT

Berbeda dengan peringatan menyambut HUT Kemerdekaan dan DPR sebelumnya, rangkaian acara pada HUT tahun ini lebih semarak dan lebih merakyat. Ini ditandai dengan aneka lomba yang melibatkan banyak orang.



Ketua DPR Setya Novanto membuka Lomba Panjat Bambu Betung

Dari pagelaran wayang kulit yang sepertinya sudah menjadi acara yang rutin, lomba panjat 70 batang betung, lomba mewarnai gambar anak-anak, pameran batu akik (jasper), pameran filateli dan pameran foto warna-warni DPR yang disajikan para awak media DPR. Satu lagi yang menarik, pertandingan catur simultan puluhan anggota masyarakat melawan *Grand Master* Utut Adianto yang juga anggota Komisi X DPR.

Tak ketinggalan ada juga lomba gerak jalan indah, dan hiburan yang cukup akrab dengan masyarakat berupa sajian musik dangdut yang mengajak semuanya bergoyang, lantaran yang tampil adalah artis-artis KDI.

Ketua DPR Setya Novanto yang ikut menyaksikan aneka lomba menyatakan, peringatan hari kemerdekaan harus menjadi harinya rakyat. Semua anggota masyarakat dengan bergairah datang mengikuti upacara bendera baik di sekolah, di

kantor bahkan di lingkungan perumahan. DPR secara khusus juga menggelar upacara HUT RI dengan Pembina upacara Wakil Ketua DPR Fadli Zon.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyampaikan apresiasi kepada Museum Rekor Indonesia yang telah memberikan penghargaan rekor Lomba Panjat Betung 70 batang, sama dengan usia kemerdekaan Indonesia.

Ia sendiri mengaku terharu melihat betapa antusiasnya masyarakat, berkumpul di Gedung DPR. “Saya baru pertama kali melihat Pesta rakyat seperti ini, karena pesta rakyat ini ada di rumah rakyat. Rakyat begitu gembira mengikuti tradisi ini dan ini perlu terus kita lakukan setia tahun,” ujarnya. Tidak hanya aneka lomba, Pimpinan DPR juga menikmati aneka jajanan pasar dan makanan khas Indonesia seperti ketupat sayur, bakso bersama warga masyarakat. Pesta rakyat kali ini lebih semarak dan lebih merakyat. (tim) Foto: Jaka/Parle/IW

Bung PARLE

PASAR BEBAS ASIA
TENGGARA AKAN SEGERA
DIBERLAKUKAN...

HARUSNYA KITA GEMBIRA
DENGAN MEA, KARENA KATANYA
KOMUNITAS REGIONAL,
STABILITAS POLITIK DAN KEAMANAN
REGIONAL ASEAN DAPAT TERJAGA

MENINGKATKAN
DAYA SAING KAWASAN
SECARA KESELURUHAN DI PASAR DUNIA,
MENDORONG PERTUMBUHAN EKONOMI
KAWASAN, MENGURANGI KEMISKINAN
DAN MENINGKATKAN STANDAR HIDUP
PENDUDUK NEGARA ANGGOTA ASEAN
AKAN TERWUJUD

INDONESIA
GIMANA...SUDAH SIAPKAH
MENGHADAPINYA ?
APAKAH INDONESIA AKAN
MENJADI PEMENANG BERSAMA
DENGAN KESEPULUH ANGGOTA
ASEAN LAINNYA ATAUKAH
JUSTRU INDONESIA HANYA
AKAN MENJADI
PASAR?

BETUL...INI AKAN MENJADI
TANTANGAN BUAT INDONESIA,
MAMPUKAH KITA MENINGKATKAN
SDM DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG,
AGAR KITA TAK TERGILAS
NANTINYA...